DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

OLEH :

M. ERWIN PRAWIRA NEGARA, SH. M.Kn.

NIM : 103012000225

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Oleh

M. ERWIN PRAWIRA NEGARA, SH. M.Kn.
NIM : 103012000225

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.
Proposal Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor
Pada Tanggal

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH. Mhum	**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH. MH.**
NIDN. 210303040	**NIDN. 20047305**

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Prof.Dr.Anis Mashdurohatun.SH.MHum
NIDN.210303040

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggiini.

Semarang, ... Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

M. ERWIN PRAWIRA NEGARA, SH. M.Kn.
NIM : 103012000225

ABSTRAK

Bahwa Bantuan hukum untuk rakyat tidak mampu dipandang sebagai suatu kewajiban Negara atas hak-hak warganya. Bahwa pemerintah di dalam kebijakannya untuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Menganalisis dan menemukan regulasi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila. 2)Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi bantuan hukum. 3)Untuk menemukan gagasan baru tentang rekonstruksi regulasi akreditasi bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan adalah Teori keadilan john rawls dan Teori keadilan Pancasila sebagai grand theory serta Teori negara hukum sebagai middle theory. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Kualitatif, dan menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis.

Dari hasil penelitian disimpulkan: 1. Bahwa regulasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu selama ini belum berbasis keadilan Pancasila, karena berkenaan dengan kategori penerima bantuan hukum, hanya orang atau kelompok orang tidak mampu, pemberian bantuan hukum dibatasi oleh Undang-Undang 16 tahun 2011 Pasal 8 tentang Pemberi Bantuan Hukum , Peraturan menteri Hukum dan Ham No.3 Tahun 2013 Pasal 29 dan 30 tentang akreditasi dan kualifikasi akreditasi, Peraturan Pemerintah No.42 Pasal 4 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum, bahwa OBH atau Pemberi Bantuan Hukum harus terakreditasi dan Pemberi Bantuan Hukum atau OBH yang terakreditasi hanya sedikit oleh sebab itu menghambat proses pemenuhan keseimbangan hak hak masyarakat tidak mampu untuk akses bantuan hukum, 2. Kelemahan pada substansi hukum yaitu berupa peraturan perunda-undangan yang di anggap belum berkeadilan; struktur hukum, ketentuan akreditasi lembaga pemberian bantuan hukum menyebabkan kelemahan lembaga dalam operasional; dan kultur hukum, menyangkut lemahnya akses masyarakat tidak mampu untuk terpenuhinya hak mereka atas bantuan hukum. 3. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam,regulasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Indonesia adalah dengan mengedepankan pendekatan nilai keadilan Pancasila dengan berbasis pada keseimbangan dan pemerataan pemenuhan hak warganegara akan akses terhadap bantuan hukum sebagai implementasi equality before the law. Nilai-nilai keadilan pancasila tersebut sebagai dasar dalam merekontruksi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 16 tahun 2011 dan Peraturan Hukum dan Ham No.63 tahun 2016 Pasal 1 angka 3 bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu atau masyarakat yang tidak manpu secara ekonomi, dan atau/tidak mampu secara fisik, mental maupun intelektual (disabilitas)

Kata kunci ; *Rekonstruksi , Bantuan Hukum , Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum*

ABSTRACT

That legal aid for the people cannot be seen as an obligation of the State for the rights of its citizens. That the government in its policy to provide legal assistance to people seeking justice who can't afford it, is stated in Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid. The purpose of this research is 1) To analyze and find regulations for legal aid for underprivileged communities which are not based on the values of Pancasila justice. 2) To analyze the weaknesses of legal aid regulation. 3) To find new ideas on the reconstruction of legal aid accreditation regulations for underprivileged communities based on the value of justice. The theory used is the John Rawls theory of justice and the Pancasila justice theory as the grand theory and the rule of law theory as the middle theory. The paradigm used is the constructivism paradigm. The research in writing this dissertation is qualitative research, and uses a sociological juridical approach.

From the results of the study it was concluded: 1. That the regulation on the provision of legal aid to the poor so far has not been based on Pancasila justice, because with regard to the category of legal aid recipients, only people or groups of people cannot afford, the provision of legal aid is limited by Law 16 of 2011 Article 8 concerning Legal Aid Providers, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2013 Articles 29 and 30 concerning accreditation and accreditation qualifications, Government Regulation No. 42 Article 4 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid, that OBH or Legal Aid Providers must be accredited and only a few accredited Legal Aid or OBH providers therefore hinder the process of fulfilling the balance of rights of the poor to access legal aid, 2. Weaknesses in legal substance, namely in the form of statutory regulations which are considered unfair; legal structure, provisions for accreditation of legal aid institutions that cause institutional weaknesses in operations; and legal culture, regarding the weak access of people who are unable to fulfill their rights to legal aid. 3. Reconstruction of the Value of Justice in the regulation of legal aid for the underprivileged in Indonesia is by prioritizing the approach to the value of Pancasila justice based on balance and equity in fulfilling citizens' rights to access legal aid as the implementation of equality before the law. The values of Pancasila justice serve as the basis for reconstructing the provisions of Article 1 point 2 of Law 16 of 2011 and Law and Human Rights Regulation No. 63 of 2016 Article 1 number 3 that the recipient of legal aid is an underprivileged person or group of people or a society that is not capable economy, and/or physically, mentally or intellectually incapacitated (disabled)

Keywords ; *Reconstruction , Legal Aid , Accreditation of Legal Aid Institutions*

.

RINGKASAN DISERTASI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya bantuan hukum senantiasa terkait dengan implikasi bagi pemenuhan akses hukum untuk masyarakat. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan keadilan menjadi motto utama dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kesetaraan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksudkan di atas.

Kondisi ini membawa problematika ketika pada pelaksanannya berbagai upaya menciptakan kesetaraan hukum itu menghadapi perlawanan. Perlawanan dimaksud adalah menghadapi kondisi di dalam masyarakat berupa ketidakadilan struktural yang terjadi dalam bingkai ketidakadilan hukum. Hal ini merupakan kondisi obyektif dalam masyarakat akibat adanya tarik ulur kepentingan dan pertarungan berbagai akses, dari para pemilik akses dominan dalam masyarakat.[1]

Bahwasanya di dalam masyarakat secara alamiah akan senantiasa terdapat masyarakat yang berpunya (*the have*) dan masyarakat tidak berpunya (*the have not*). Khususnya dicermati dari aspek ekonomis, kemampuan terhadap akses finansial itu bisa dicermati secara terukur. Ukurannya adalah pendapatan perkapita.[2] Sementara dalam hal bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin ukurannya tidak semata berdasarkan parameter

[1] Teti Marsaulina, *Op.Cit.*hlm. 3

[2] Badan Pusat Statistik. 2016: Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.*https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11*

ekonomi. Artinya masih ada ukuran lain yang justru jauh lebih mendasar.

Permasalahan berikutnya menyangkut niat baik atau *goodwill*. Persoalannya memang sangat mendasar, ketika dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Hal ini konkretnya menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam secara teknis berhubungan dengan prosesperadilan, yang menjadi acuan konkret di dalam praktik pemberian bantuan hukum. Lebih dari itu, permasalahan bantuan hukum ini berhubungan erat dengan suatu proses pendidikan hukum *(legal education).* Konkretnya adalah bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum *(legal conciousness)* agar masyarakat mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum di masyarakat.[3]

Elemen penting pada posisi ini adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam kaitan ini, kesadaran hukum dengan beroperasinya hukum mempunyai kaitan yang erat. Dalam hubungan dengan hal di atas misalnya menyangkut kriteria utama bahwahanya orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan menjadi permasalahan tersendiri ketika diaplikasikan di dalam pemberian bantuan hukum. Di dalam arti materiil, dasar tidak mampu sebagai prasyarat memperoleh bantuan hukum ini menjadi elemen mendasar di dalam memenuhi permintaan untuk pemberian bantuan hukum, di dalam kerangka mendorong tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keharusan normatif adalah bahwa di dalam penegakan hukum tidak ada perbedaan dari golongan masyarakat mampu dan golongan masyarakat tidak mampu atau golongan masyarakat miskin.

Di dalam pemenuhan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin ini, peran lembaga bantuan hukum sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang secara formal memberikan pelayanan sangat sentral. Artinya bahwa keberadaan

[3] *Ibid.* hlm. 4

dan kehadiran organisasi bantuan hukum memang sangat dibutuhkan. Namun kehadiran Organisasi Bantuan Hukum tidak serta merta dapat diwujudkan. Keberadaannya memerlukan akomodasi dari berbagai dimensi, baik dimensi politik berupa dukungan politik, secara ekonomis dengan penyediaan anggaran yang memadai dan keberadaan sumber daya manusia yang menguasai permasalahan serta peran dimensi lainnya.

Pada perkembangan konsep bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengalami perubahan pengaturannya, secara historis normative pengaturan tentang bantuan hukum dan organisasi pemberi bantuan hukum diatur sekarang ini dalam UU Bantuan Hukum, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang undang ini masih dianggap belum dapat memenuhi hakekat bantuan hukum yaitu meringankan beban bagi masyarakat miskin pencari keadilan (yang bermasalah dengan hukum), diantaranya:

1. Problematika secara yuridis normative yakni adanya pengaturan tentang kareditasi organisasi pemberi bantuan hukum yang dirasakan masih belum menghambat implemnetasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Problemtika teoritis berupa pergeseran konsep Pemberian Bantuan Hukum, dari tidak mampu membayar ongkos perkara menjadi orang yang tidak mampu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan.
3. Problematika Sosiologis yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan orang atau kelompok miskin mengalami kesulitan dalam mendapatkan Bantuan Hukum, apalagi eksistensi Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum harus menjalani berbagai proses verifikasi dan akreditasi yang lumayan sulit, sehingga implementasi

perwujudan pemenuhan akan hak asasi masyarakat atas bantuan hukum terabaikan.

4. Problematika Filosofis bahwa dengan adanya aturan mengenai akreditasi Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum yang terkesan sulit da nada kualifikasi akreditasi A, B dan C bahkan tidak semua terakreditasi, maka demikian itu menunjukkan nilai keadilan yang tidak terpenuhi, khsusus nya nilai keadilan bagi pemenuhan hak masyarakat miskin atas akses bantuan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti berminat melakukan penelitian berbentuk disertasi yang berjudul: REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian tentang rekonstruksi regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin indonesia berbasis nilai keadilan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu di Indonesia belum berbasis nilai Keadilan Pancasila
2. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu yang berbasis nilai keadilan Pancasila. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis regulasi bantuan hukum lebih terarah pada regulasi tentang akreditasi organisasi bantuan hukum sebagai

pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Indonesia yang belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi bantuan hukum di Indonesia pada saat ini.
3. Untuk menemukan gagasan baru tentang rekonstruksi regulasi akreditasi bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretik maupun secara praktis. Manfaat secara teoretik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian secara komprehensif terhadap permasalahan politik hukum dalam pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat tidak mampu dalam memperoleh haknya di bidang pelayanan hukum melalui peran organisasi bantuan hukum (OBH)
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan gagasan baru berkenaan regulasi bantuan hukum tentang akreditasi organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum, agar bernilai keadilan Pancasila untuk pemenuhan hak asasi masyarakat miskin atas akses bantuan hukum.

Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan kebijakan yang berimplikasi pada penyempurnaan peraturan perundang-undangan, berkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
2. Sebagai sumbang pikir untuk perspektif ke depan dari aktivitas penegakan hukum dan dimensi yang lebih luas yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

a. Nilai Keadilan

Dalam elaborasi permasalahan ini secara konseptual berangkat dari peermasalahan apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.

b. Kebijakan Penegakan Hukum

Untuk itu kiranya sebagai dasar perlu diingat kembali, rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam GBHN. Pada butir ke-2 TAP MPR No IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang arah kebijakan bidang hukum dikatakan: Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*

Pembahasan yang melandasi pemberian bantuan hukum, maka secara teoritik didasarkan pada teori negara hukum. Pembicaraan tentang negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pembahasan Politik Hukum dalam pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dalam kerangka negara hukum didasarkan pada pemberian Hak Asasi Manusia.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.[4]

b. Teori Keadilan sebagai *applied theory*

1) Teori Keadilan John Rawls

Teori yang dijadikan dasar untuk elaborasi permasalahan beerikutnya adalah teori keadilan, Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawl, dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice* mematok ukuran nilai keadilan pada dasarnya adalah *justice as fairness.*[5]

Grand theory yang dimaksud adalah teori yang utama. Pokok analisis filosofis terhadap permasalahan bantuan hukum adalah berdasarkan teori keadilan. Dari pengkajian yang dilakukan, pada akhirnya John Rawl menggariskan prinsip keadilan itu ada dua sebagaimana dinyatakannya :

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compartible with a similar system of liberty for all. Adapun syarat kedua: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both :to the gretes*

[4] M. Sastrapratedja. 2002.*Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius. Hlm. Lihat [pula pada buku Bander Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 2.

[5] John Rawl, *Theory of Justice.* hlm. 20, sebagaimana disebutkan dalam Hilaire McCoubrey. (Terjemahan). Jogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 267.

benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principles, and attached to aoficce and position open to all under condition of fair equality of opportunity.[6]

Dua prinsip keadilan Rawls[7] dibawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama,* adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya *(principle of greatest equal liberty).* Prinsip ini mencakup:

1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2) Teori Keadilan berdasarkan Pancasila

Teori keadilan di Indonesia, adalah keadilan yang didasarkan pada Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Telaah tentang keseimbangan sebagai dasar keadilan dalam Pancasila tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Aspek filosofis dimaksud secara konstitusional dicantumkan pada alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Di dalam konstruksi yuridis dari keadilan berdasarkan Pancasila didasarkan atas keseimbangan antara keadilan itu sendiri, kepastian hukum dan kemanfatan bagi penyelesaian konflik di dalam

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid*. hlm. 110.

interaksi antara subyek hukum. Makna dari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan ini dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.[8]

II. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

   Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigm konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Kualitatif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis dari sudut pandang sosiologi sebagai interpretasi atau penafsiran (*Interpretation Understanding*).[9] Dalam pendekatan sosiologis lebih kedalam mempelajari fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bisa melihat dari sudut pandang implementasi atau pelaksanaan undang-undang, sehingga penelitian

[8] Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 156-157.

[9] Esmi Warassih. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 23-24.

ini mengunakan penelitian langsung untuk mendapatkan data seakurat mungkin.[10]

4. Sumber Data Penelitian

Terkait dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2) Data Sekunder, adalah data penelitian hukum yang diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan data-data tersebut diperoleh melalui perantara atau sumber lain seperti halnya buku, majalah, maupun jurnal, dari data sekunder tersebut tentunya telah diklompokan sebagai berikut:
   a. Bahan Hukum Primer
      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
      3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   b. Bahan Hukum Sekunder

      Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar keilmuan hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[11] Selain buku bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan hukum baik berupa artikel maupun jurnal.[12] Terkait penelitian ini maka bahan hukum

[10]Muhammad Zainuddin, Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paraadigma, dan susunan Pembentukan), (Yogyakarta: CV.Istana Agency, 2019), hlm. 22.

[11]Peter Muhammad Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Group, hlm. 182-183.

[12]*Ibid.*

sekunder yang digunakan adalah buku tentang hukum, artiker, dan juga jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data penelitian yang berasal dari bahan-bahan selain hukum dapat digunakan oleh seorang peneliti, mengingat seorang yang melakukan penelitian hukum juga diperkenankan mengambil data yang bukan dari bahan hukum, tentunya bahan non hukum tersebut sepanjang diangap masih relefan terhadap permasalahan yang dikaji serta mampu menjadi pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[13]

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan).

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[14]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan

[13]Muhammad Zainuddin, *Op.Cit*, hlm. 40.
[14]*Ibid.*

lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.[15]

6. Instrumen Penelitian

   Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci

7. Teknik Analisis Data

   Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

8. Teknik Validasi Data

   Upaya untuk memvalidkan data ialah dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran dan penafsiran data. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dan diluar dari itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

III. Hasil Penelitian

A. Regulasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Belum Memenuhi Nilai Keadilan Pancasila

Pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disingkat UU Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disingkat UU Bantuan Hukum telah memberikan ruang bagi advokat atau

[15]H. Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 54.

penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. UU Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.[16] Sedangkan UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[17]

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).[18]

UU Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi, sehingga dapat diberlakukan sanksi.[19]

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebut Hak Asasi Manusia rakyat miskin yang telah cukup lama ditawan orang-orang kaya, meski harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup.

Di dalam praktek, terkadang seorang terdakwa sejak masih berstatus sebagai tersangka ketika diinformasikan akan haknya

[16]Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[17]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[18]Freke F. Kambey, Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 34.

[19]Erry Meta. *Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum* ….. Loc. Cit.

untuk didampingi oleh penasihat hukum, ia telah menolak sejak awal. Barulah ketika masuk di dalam proses persidangan dan ternyata ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum, terdakwa tersebut ini menerima untuk didampingi penasihat hukum. Ini bersifat penunjukkan dari pihak pengadilan terhadap penasihat hukum si terdakwa. biasanya penasihat hukum yang ditunjuk adalah penasihat hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pihak pengadilan dengan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Atau dapat saja, ketika ada satu atau beberapa orang lembaga bantuan hukum yang sedang bertugas piket, yang sedang bertugas piket inilah yang langsung ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa.

Selain pemberian bantuan hukum melalui litigasi oleh lembaga bantuan hukum sebagai jalur *access to justice*, dapat pula ditempuh melalui jalur non litigasi. Penerapan bantuan hukum melalui jalur non litigasi ini dilakukan melalui upaya penyelesaian perkara dengan mengupayakan damai *win win solution* bagi kedua belah pihak.

Hal yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakatyang tidak mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pihak Pengadilan, maupun LBH mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya di daerah pelosok, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju tempattempat tersebut. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari masyarakat khususnya yang tidak mampu belum mengetahui akan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, kemudian keterbatasan dana yang

disediakan oleh Pemerintah menjadi salah satu penyebab kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

B. Kelemahan Regulasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Mampu di Indonesia

Mengingat relatif belum optimalnya perlindungan terhadap hak saksi dan korban untuk mendapatkan bantuan hukum dalam KUHAP, patut disayangkan ketika ketentuan UU Bantuan Hukum (yang seharusnya menguatkan hak-hak korban/saksi) ternyata belum sepenuhnya mengadopsi jaminan terhadap hak atas bantuan hukum bagi saksi/korban, sebagaimana yang telah disediakan dalam UU PSK misalnya. UU Bantuan Hukum tidak secara tegas menyatakan hak bantuan hukum litigasi meliputi pula hak bantuan hukum untuk korban dalam setiap proses peradilan.

Mereka yang tergolong kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal) sesungguhnya juga berhak mendapatkan bantuan hukum. Sehingga perlu adanya perluasan dalam UU Bantuan Hukum meliputi kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal). Selanjutnya menentukan prioritas dalam memberikan layanan hukum kepada penerima bantuan hukum dengan melihat urgensi dari penerima bantuan hukum seperti halnya seberapa dampak yang mereka dapatkan akibat dari perlakuan yang mereka dapatkan.

Layanan bantuan hukum juga harus bisa mengakomodir kebutuhan baik penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap penerima bantuan hukum bagi pra dan pasca peradilan seperti kebutuhan korban di luar pengadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti pembiayaan *visum et repertum* yang sampai hari ini masih dibebankan kepada pelapor/ korban, kemudian ketika pelapor/korban adalah penyandang disabilitas seperti tunarungu maka dibutuhkan seorang ahli bahasa dan pemeriksaan psikologi oleh psikolog yang sampai hari ini sulit mendapatkan secara gratis dan juga rumah aman. Selain dari hal itu

bentuk litigasi pra dan pasca peradilan terhadap korban perlu adanya penguatan hukum, pemberdayaan kepada korban agar tidak menjadi korban kembali.

Peranan Pemerintah dalam setiap rencana dan Program Bantuan Hukum dalam berpartisipasi dan mengawasi penegakan hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan aturan hukum sangat diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut. Negara telah selayaknya lebih memperhatikan pelaksanaan dari Program Bantuan Hukum ini sehingga tujuannya dapat tercapai dan setiap masyarakat dapat mencicipi keadilan dalam kehidupan mereka. Bantuan hukum betujuan untuk memberikan pertolongan dan menumbuhkan serta membina kesadaran dari masyarakat akan hak-hak nya sebagai subjek hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak ketinggalan zaman dan jelas tujuannya.

Dengan tidak sebandingnya jumlah advokat dengan jumlah penduduk di Indonesia, minat advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma pun masih rendah. Dibuktikan dari sekitar 15 ribu anggota Peradi, tercatat baru 100-an orang yang terdata memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tak mampu.

Rendahnya minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain disebabkan oleh, pertama, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melakukan kewajiban ini. UU Advokat bahkan tidak mengatur sanksi apapun bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya.

Landasan terbentuknya uu bantuan hukum:

1. Landasan Filosofis

   Landasan filosofis menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang NRI Tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslad, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis dan mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idde der gerechtigheid*), dan cita-cita kesusilaan (*idge der zedelijkheid*).[20] Makna filosofis akan pentingnya kemakmuran atau kesejahteraan akan mengacu pada nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersifat mendasar. Nilai-nilai dasar keberlakuan hukum dapat diwujudkan dengan terpenuhinya hak-hak bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang NRI Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.[21] Dengan demikian, secara filosofis adanya kewajiban negara dalam pengaturan bantuan hukum kepada masyarakat

[20]I Gde Pantja Astawa and Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 77–81.

[21]Widhi Handoko. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

miskin menjadi penting sebagai bentuk implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hakasasi warga negara untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

2. Landasan Sosiologis

   Landasan sosiologis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag, sociologische gelding*), apabila ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perUndang-Undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*annerken nungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dimensi sosiologis ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Apabila dihubungkan dengan konsep pengaturan pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat, maka adanya bantuan hukum kepada masyarakat dapat menghindari terjadinya dugaan ketidakadilan maupun kesewenang-wenangan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

3. Landasan Yuridis

   Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah,

atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara yuridis, apa yang diamanatkan Undang-Undang NRI Tahun 1945 mengandung arti landasan mendasar bagi lahirnya instrumen-instrumen hukum dalam politik hukum sebagai konsep negara hukum. Suatu peraturan perUndang-Undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan lahir.

Menyikapi beberapa problematika yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya lainnya belum efektif, maka sangat diperlukan upaya secara kongkrit dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum dimaksud adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Menurut ketentuan Bantuan Hukum Belanda, penerima bantuan hukum merupakan orang atau badan yang kemampuan kekuangan atau kekayaannya tidak mencapi jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai publik.

Lembaga Bantuan Hukum di Belanda akan menangani semua jenis perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180 Euro.[22]

Bantuan hukum di Australia dibentuk dan dibiayai sebesar $AU9.700.000 oleh Negara Persemakmuran serta $AU20.400.000 dari sumber dana lain[23] yang pelaksanaannya dilakukan secara sinergi dengan Komisi Bantuan Hukum dan Pengaca Profesional atau Pengacara Sipil.[24] Australia tidak mencantumkan hak bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam undang-undang federalnya, namun diakui dalam yurisprudensi dan undangundang negara bagian yang menciptakan komisis bantuan hukum.[25]

Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus diuji melalui tiga kriteria, yakni:

a. Uji kriteria pendapatan;
b. Uji kelayakan perkara; dan
c. Uji keriteria jenis perkara.[26]

Dalam pengujian tersebut, pemohon akan diuji dalam aspek tingkat kemungkinan menang, perbandingan efesiensi biaya berbanding dengan manfaat pemohon, dan kelayakan biaya.[27] Bantuan hukum di Thailand dibiayai oleh negara sebesar US$1,3 juta pertahun[28] dan dilaksanakan oleh pengadilan, kantor perdana menteri, kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand. Masing-masing lembaga tersebut menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin. *Section* 242 Konstitusi Thailand mengaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari

[22]Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 26.

[23]*Loc.cit*

[24]Goldie, Cassandra. *Legal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote Access to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights*, Makalah ini disampaikan pada seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006, hlm. 3-4.

[25]*Ibid*

[26]*Loc.cit*

[27]*Loc.cit*

[28]*Ibid*, hlm. 29

negara. Thailand juga telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang memberikan jaminan untuk hak tersebut. Namun, tidak diturunkan dalam peraturan perundang-undangan.[29]

Di Taiwan kondisinya lebih bervariasi, bantuan hukum dapat dilakukan dalam wadah sebuah organisasi, yaitu organisasi-organisasi yang berada di pemerintahan daerah, asosiasi-asosiasi pengacara tingkat lokal, dan organisasi-organisasi non pemerintah. Pada tahun 2004 Taiwan memiliki undang-undang bantuan hukum (*Legal Aid Act*). Berdasar undang-undang tersebut dibentuk Yayasan Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan yang merata dan mewujudkan sumber daya yang terintegrasi serta mengatur pendanaan secara lebih efektif. Ada tiga alasan pokok keluarnya undang-undang tersebut, yaitu:

1. Biaya pengacara tidak dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum,
2. Biaya putusan pengadilan yang sangat tinggi sehingga tidak terjangkau masyarakat yang tidak mampu dan
3. Adanya kewajiban untuk menyetorkan uang jaminan yang besarnya sepertiga dari nilai eksekusi. Untuk mengatasi hal tersebut negara hadir tidak hanya sebagai regulator, akan tetapi juga aktor dan fasilitator.[30]

Lembaga Bantuan hukum di Thailand menangani semua jenis perkara.[31]Pada negara Inggris, kelayakan yaitu pemenuhan syarat untuk bantuan hukum akan tergantung pada: jenis kasus dan keadaan keuangan. Untuk kasus perdata (non-pidana) yaitu mencakup hal-hal seperti utang, keluarga atau masalah perumahan

[29]*Ibid*, hlm. 29-30

[30]Jerry Cheng. 2006. *Legal Aid Movement in Taiwan and Its Present Status*, Makalah Seminar Internasional Tentang "Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinan dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006, hal 5-6

[31]Pasal 173 *Criminal Procedure Code* mewajibkan pengadilan untuk menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa tersebut adalah anak. Lembaga Bantuan hukum di Thailand menangani semua jenis perkara.

hanya perlu menunjukkan tidak mampu membayar biaya hukum dan masalahnya serius. Pada umumnya calon klien harus memberikan perincian dan bukti penghasilan, manfaat, tabungan dan properti pemohon batuan hukum, dan orang-orang dari pasangan calon klien. Jika berusia di bawah 18 tahun, perlu memberikan informasi tentang penghasilan orang tua atau wali.

Tetapi untuk kasus-kasus tertentu situasi keuangan calon klien tidak diperhitungkan dalam hal seperti: Tribunal kesehatan mental; anak-anak dalam perawatan; dan penculikan anak. Hal menarik dari bantuan hukum di Inggris, penerima bantuan hukum dapat membayar sebagaian biaya kasus. Biaya tersebut dapat berupa: membayar sebagian biaya di muka atau membayar kembali sebagian biaya jika orang yang berperkara tersebut memenangkan uang atau properti dari kasus.

Membandingkan layanan bantuan hukum (oleh negara) antara Indonesia dengan Afrika Selatan mungkin dapat dianggap tidak berimbang. Afrika Selatan sudah memulai program bantuan hukum ini melalui *Legal Aid Board* sejak tahun 1969 (*Legal Aid* Act No. 22 of 1969) dan mulai dilaksanakan pada tahun 1971. Dari segi dana yang dialokasikan oleh negara, Afrika Selatan mengalokasikan 1,5 milyar Rand (Rp 1,5 trilyun) untuk bantuan hukum dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22 juta jiwa (sekitar Rp 68.000,00 per kapita penduduk miskin). Sementara, Indonesia dengan anggaran bantuan hukum sekitar Rp 48 milyar dan penduduk miskin sekitar 28 juta jiwa, alokasi anggaran bantuan hukum per kapita penduduk miskin hanya sekitar Rp 1.700,00 saja. Meski demikian, kita bisa belajar banyak dari bagaimana bantuan hukum Afrika Selatan dirumuskan dan diimplementasikan.[32]

Jika calon penerima layanan *pro bono* adalah kelompok yang mewakili para individu yang tidak mampu, maka ketidakmampuan kelompok tersebut dapat ditunjukkan melalui dokumen pendukung

[32]Donny Ardianto. 2017. Penyediaan Bantuan Hukum di Afrika Selatan: Perbandingan dengan Indonesia, buletin bantuan hukum edisi 03 2017, hlm. 22.

lain, seperti laporan keuangan selama beberapa bulan terakhir atau data individu-individu yang diwakilinya.[33]

Dalam keadaan mendesak, advokat mempunyai diskresi untuk menentukan apakah seorang individu atau suatu kelompok layak menerima layanan *pro bono* tanpa terlebih dahulu meminta dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan di atas. Jika tidak menggunakan dokumen, penentuan diberikan atau tidaknya layanan *pro bono* juga dapat didasarkan pada wawancara antara advokat dengan calon penerima layanan *pro bono*.[34]

Dengan mekanisme pengisian *timesheet*, kantor hukum pada dasarnya mengandalkan sistem penilaian sendiri. Sama halnya dengan organisasi advokat, penghitungan jam yang disampaikan oleh advokat juga tidak melalui proses verifikasi lebih lanjut.[35]

Terkait dengan kualitas layanan *pro bono*, kantor hukum dapat menunjuk partner yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan kegiatan *pro bono*, termasuk pemantauan dan evaluasi kualitas pelaksanaan layanan *pro bono* yang diberikan oleh para advokat di kantor hukumnya. Partner tersebut dapat melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara mandiri atau menunjuk senior *associate* yang mempunyai jam terbang dalam memberikan layanan *pro bono* sebagai perpanjangan tangannya.[36]

Selain mekanisme yang di atas, untuk mengevaluasi kualitas layanan *pro bono*, kantor hukum juga dapat meminta evaluasi dari klien yang menerima layanan *pro bono* dan/atau membentuk unit yang terpisah (misalnya: unit yang terdiri dari advokat yang tidak terlibat dalam layanan *pro bono* yang sedang dievaluasi) untuk melakukan evaluasi secara independen.[37]

Organisasi advokat perlu membentuk infrastruktur jaringan dan basis data yang dapat menampung seluruh informasi relevan

[33]*Ibid*
[34]*Ibid*
[35]*Ibid*.
[36]*Ibid*
[37]*Ibid*

mengenai *pro bono*, mulai dari permohonan-permohonan *pro bono hingga* daftar para advokat yang tersedia untuk memberikan layanan tersebut. Bersamaan dengan infrastruktur jaringan dan basis data, organisasi advokat juga perlu membentuk berbagai sistem yang dapat mempermudah pelaksanaan dan pemantauan layanan *pro bono*, seperti sistem pengajuan permohonan dan sistem pelaporan pelaksanaan layanan *pro bono*.[38]

Saat ini, pemberian sanksi atas tidak dilakukannya *pro bono* dianggap tidak efektif untuk mendorong para advokat dalam memberikan lebih banyak layanan *pro bono* karena kultur *pro bono* itu sendiri belum terbangun. Pemberian penghargaan dan insentif dianggap lebih menarik. Oleh karenanya, organisasi advokat perlu menciptakan suatu mekansime pemberian penghargaan dan insentif untuk menghargai advokat yang sudah melaksanakan kewajiban *pro bono* dengan baik dan mendorong advokat lainnya untuk melakukan *pro bono*.[39]

Bantuan hukum struktural mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang. Apabila paradigma lama bantuan hukum hanya bertumpu pada bantuan hukum melalui jalur hukum saja, tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut. Kajian ini membahas problematika pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural.[40]

Ruang lingkup Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Pelaksanaan pemberian

[38]*Ibid.*
[39]*Ibid*, hlm. 35-36.
[40]*Ibid.*

bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah Persyaratan untuk pemberi bantuan berbadan hukum, kantor yang tetap, memenuhi persyaratan dapat disebut sebagai hukum antara lain terakreditasi, memiliki memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum. Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum *pro bono* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam mengurus perkara cumacuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.[41]

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin buta hukum dan tertindas ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan *acces to justice* merupakan refleksi asas *equality before the law*. Dalam praktiknya, pendampingan bagi masyarakat miskin menjadi sebuah tugas yang diharuskan dalam mencari keadilan bukan berdasarkan atas hati nurani. Kondisinya saat ini, asas *equality before the law* belum dijadikan patokan utama dalam pemberian bantuan hukum. Padahal, jika secara benar dan patut asas ini direfleksikan ke dalam penegakan hukum di Indonesia, seyogyanya tidak ada lagi masyarakat miskin mengalami diskriminasi dan ketidakadilan hukum.[42]

[41]*Ibid*
[42]*Ibid*

IV. Kesimpulan

1. Bantuan hukum adalah hak konstitusional warganegara. Pemenuhan hak warganegara atas bantuan hukum adalah kewajiban Negara, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum. UU ini telah memberikan hal yang mendasarkan yang diperlukan dalam menjalankan atau mengimplimentasi konsep bantuan hukum yang merupakan salah satu amanat konstitusi dan hak warga Negara. Namun pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu masih belum memenuhi nilai keadilan Pancasila karena eksistensi lembaga atau organisasi bantuan hukum untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi pemberi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu masih digantungkan dengan regulasi yang tidak mendukung implementasi tujuan itu, karena adanya ketentuan pasal 7 UU Bantuan Hukum dan Permenkumham No 30 Tahun 2013 yang merupakan regulasi tentang akreditasi dan kulaifikasi akreditasi yang menghambat proses pemenuhan keseimbangan hak hak masyarakat miskin untuk akses bantuan hukum.
2. Kelemahan dalam regulasi Undang Undang Bantuan Hukum berkenaan dengan ketentuan akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum menyebabkan kelemahan lembaga dalam operasional, dan lemahnya akses masyarakat tidak mampu untuk terpenuhinya hak mereka atas bantuan hukum, secara kelembagaan juga mengalami kurangnya pendanaan, kurangnya penegasan mengenai teknik siapa saja yang menjadi penerima bantuan hukum, standart ukuran yang selama ini dipakai adalah ukuran secara formil saja, yakni dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dan sejenisnya. Kelemahan berikutnya adalah mengenai teknis pelaporan kegiatan bantuan hukum oleh lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum yang mengaharuskan organisasi bantuan hukum harus sering bolak-balik ke kanwil hukum HAM untuk melengkapi kelengkapan adminstrasi.

3. Rekonstruksi regulasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Indonseia saat ini adalah dengan mengedepankan pendekatan nilai keadilan Pancasila dengan berbasis pada keseimbangan dan pemerataan pemenuhan hak warganegara akan akses terhadap bantuan hukum sebagai implemnetasi equality before the law.

V. Implikasi

1. Implikasi Teoritik

   Dibutuhkan sebuah langkah yang konsisten khususnya dari pemerintah untuk membenahi persoalan bantuan hukum ini, dengan langkah pertama merevisi UU No 16 Taun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham No 3 Tahun 2013 berkenaan dengan ketentuan kualifikasi akreditasi organissi /lembaga Pemberi bantuan hukum di Indosesia.

2. Implikasi Praktik

   Hambatan dalam pemenuhan hak Bantuan Hukum di Indonesia secara khusus harus dievaluasi sejak berlakunya UUNo 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sampai dengan sekarang, inventarisasi akan persoalan yang menghambat pelaksanaan bantuan dapat diselesaikan ketika adanya sinergitas yang presisi antara stakeholder terkait untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan pembentukan norma baru dalam level UU untuk menyelesaian perosalan Bantuan Hukum ini, karena ketika UU telah direvisi dan semua masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum sudah termaktub dalam UU Bantuan Hukum yang baru maka dengan sendirinya akan diikuti oleh aturan pelaksana dari UU Bantuan Hukum baru tersebut, yang pada akhirnya membetuk system yang bekerja dengan solid dan rapi untuk menyujudkan access to justice kepada masyarakat miskin sesuai dengan amanat konstitusi.

DISSERTATION SUMMARY

I. Introduction

A. Background

Basically, legal aid is always related to the implications for the fulfillment of legal access for the community. The principles for upholding democracy, human rights and justice are the main mottos in relation to efforts to realize equality before the law as referred to above.

This condition brings problems when in its implementation various efforts to create legal equality face resistance. The intended resistance is to face conditions in society in the form of structural injustices that occur within the framework of legal injustice. This is an objective condition in society as a result of the tug-of-war between the interests and struggles of various accesses, from the owners of dominant access in society.

That in society naturally there will always be people who have (the have) and people do not have (the have not). Especially from the economic aspect, the ability to access finance can be measured in a measurable way. The measure is per capita income. Meanwhile, in terms of legal aid aimed at the poor, the size is not only based on economic parameters. This means that there are other measures that are far more basic.

However, from this perspective, the measurement of poverty as the basis for the poor is not clear. This ambiguity stems mainly from the understanding of poverty measures which are based on economic parameters. While actually poverty in the perspective of legal aid has a wider dimension, in this case it concerns the generality of the legal field. Of course, generality in the field of law is a basis that is not solely based on ability in an economic sense.

The next issue concerns goodwill or goodwill. The problem is very basic, when it comes to providing legal aid to the community. This

concretely involves many aspects. It is not only technically related to the judicial process, which is a concrete reference in the practice of providing legal aid. Moreover, the issue of legal aid is closely related to a process of legal education (legal education). The concrete thing is how to grow a legal awareness (legal consciousness) so that people understand their rights and obligations in legal relationships in society.

An important element in this position is the level of legal awareness of the community. In this regard, legal awareness with the operation of the law has a close relationship. In connection with the above, for example, it concerns the main criteria that only people who cannot afford it. Inability to become a separate problem when applied in the provision of legal aid. In a material sense, the basic inadequacy as a prerequisite for obtaining legal aid is a fundamental element in meeting requests for legal aid, within the framework of encouraging the upholding of the principle of equality before the law (equality before the law). The normative requirement is that in law enforcement there is no difference between the rich and the poor or the poor.

In the fulfillment of legal aid, especially for the poor, the role of legal aid institutions as organizations that formally provide services is very central. This means that the existence and presence of legal aid institutions is really needed. However, the presence of legal aid institutions cannot be realized immediately. Its existence requires accommodation of various dimensions. Both the political dimension in the form of political support, economically with the provision of an adequate budget and the presence of human resources who control the problems and the role of other dimensions.

In the development of the concept of legal aid, the Legal Aid Institute (LBH) popularized the "concept of structural legal aid" which in fact later received very good responses and discussions

within LBH itself and outside LBH. Even the concept of structural legal aid remains actual and becomes a material for reflection or thought to develop the concept of legal aid in Indonesia.

Axiologically, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid cannot fulfill the nature of legal aid, namely easing the burden for poor people seeking justice (who have problems with the law), including:

1. Juridical Problems, namely the existence of ambiguity about the criteria for being unable for the community.
2. Theoretical problem is a shift in the concept of providing legal aid, from being unable to pay court fees to being unable to have the right to food, clothing, health services, education services, employment and business, housing.
3. Sociological Problems, in this case poor people or groups have difficulty in obtaining Legal Aid.

Based on the background of the problems above, the researchers will Inat conducts research in the form of a dissertation entitled: RECONSTRUCTION OF LEGAL AID REGULATIONS FOR THE POOR COMMUNITY IN INDONESIA BASED ON THE VALUE OF JUSTICE.

B. Problem Formulation

The problem in research on the reconstruction of legal aid regulations for the poor in Indonesia based on the value of justice is formulated as follows:

1. Why is the regulation of legal aid for the poor in Indonesia not based on the value of justice?
2. What are the current weaknesses in the regulation of legal aid for the poor in Indonesia?
3. How is the reconstruction of legal aid regulations for the poor in Indonesia based on the value of justice?

C. Research Objectives

The objectives to be achieved in writing this dissertation are as follows:

1. To analyze the regulation of legal aid for the poor in Indonesia, which is not based on the value of justice.
2. To analyze the current weaknesses in the regulation of legal aid for the poor in Indonesia.
3. Finding and analyzing the reconstruction of legal aid regulations for the poor in Indonesia based on the value of justice.

D. Research Benefits

The writing of this dissertation is expected to provide benefits both theoretically and practically. The theoretical benefits are as follows:

1. As a material for a comprehensive study of legal political issues in the provision of legal aid, especially to the poor in obtaining their rights in the field of legal services.
2. As a contribution of thought for the development of the concept of legal aid in Indonesia, especially for the poor in the perspective of justice enforcement.

The practical benefits are as follows:

1. As a contribution of thought for the improvement of policies that have implications for the improvement of legislation, in relation to the provision of legal aid for the poor.
2. As a brainstorm for the future perspective of law enforcement activities and a broader dimension, namely the fulfillment of human rights.

E. Conceptual Framework, Theoretical Framework, Thinking Framework

1. Conceptual Framework
   a. Value of Justice

In the elaboration of this problem, conceptually, it departs from the issue of whether the regulation has fulfilled the sense of justice and is useful for the community, which is beyond prioritizing the value of legal certainty. Likewise, if we are more inclined to stick to the value of usability, then as a value it will shift the value of legal certainty and the value of justice, because what is important for usability value is the fact whether the law is useful or useful for society.

b. Law Enforcement Policy

For this reason, as a basis, it is necessary to recall the formulation of national legal politics contained in the GBHN. In point 2 of TAP MPR No IV/MPR/1999 concerning Outlines of State Policy regarding the direction of policy in the field of law, it is stated: To organize a comprehensive and integrated national legal system by acknowledging respect for religious law and customary law and renewing colonial heritage legislation and discriminatory national laws, including gender inequality and their incompatibility with demands for reform through legislation programs.

2. Theoretical Framework

a. Rule of Law theory

The discussion that underlies the provision of legal aid is theoretically based on the theory of the rule of law. Talks about the rule of law cannot be separated from human rights. Therefore, the discussion of Legal Politics in providing assistance to the poor within the framework of the rule of law is based on the provision of Human Rights. The concept of a state of law according to Aristotle (384-322 BC) is a state that stands above the law that guarantees justice for its citizens. Justice is a condition for

achieving happiness in life for its citizens, and as a basis for justice it is necessary to teach morals to every human being in order to become a good citizen. For Aristotle, the ruler of the state is not a real human being, but a just mind, while the ruler is actually only the holder of law and balance.

b. Theory of Justice as an applied theory

1) John Rawls's Theory of Justice

The theory that is used as the basis for the next elaboration of the problem is the theory of justice. This theory, as stated by John Rawl, in his book entitled A Theory of Justice, sets the measure of the value of justice as basically justice as fairness.

Grand theory in question is the main theory. The main philosophical analysis of the problem of legal aid is based on the theory of justice. From the studies carried out, in the end John Rawl outlines the two principles of justice as stated:

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. The second condition is : Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both : to the gretes benefit it of the least advantaged, consistent with the just savings principles, and attached to office and position open to all under conditions of fair equality of opportunity.

Rawls's two principles of justice below are solutions to the main problem of justice. First, is the principle of greatest equal liberty. These principles include:

a. Freedom to participate in political life (right to vote, right to stand for election).

b. Freedom of speech (including freedom of the press).
c. Freedom of belief (including religious belief).
d. Freedom to be yourself (person).
b. The right to retain private property.

2) Theory of Justice based on Pancasila

The theory of justice in Indonesia, is justice based on Pancasila in its position as the basis of the state and the philosophy of the Indonesian nation. The study of balance as the basis of justice in Pancasila cannot be separated from its philosophical aspects. The philosophical aspects referred to are constitutionally stated in the 2nd and 4th paragraphs of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945).

In the juridical construction of justice based on Pancasila, it is based on a balance between justice itself, legal certainty and benefits for conflict resolution in interactions between legal subjects. The meaning of the balance between justice and legal certainty and benefit is oriented towards the realization of welfare. This is understood as the needs of the Indonesian people, both spiritual and physical. Juridically this, of course, refers to how big the legal capacity is to be able to provide benefits to the community.

II. Research Methods

1. Research Paradigm

The paradigm used in this study is the constructivism paradigm. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the notion that puts observation and objectivity in finding a reality or science.

2. Research Type

The research in writing this dissertation is qualitative research. Writing aims to provide an overview of a society or a certain group of people or a description of a symptom or between two or more symptoms.

3. Research Approach

The approach (approach) in this study uses a sociological juridical approach from a sociological point of view as an interpretation or interpretation (Interpretation Understanding). using direct research to get data as accurate as possible.

4. Research Data Sources

Related to this research, the data sources used in this study are:

1) Primary Data, is data obtained from the statements and information from respondents directly obtained through interviews and observations.
2) Secondary Data, is legal research data obtained directly from the main source, but the data is obtained through intermediaries or other sources such as books, magazines, and journals.
    a. Primary Legal Material
        1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
        2) The Criminal Code
        3) Law Number 8 of 1981, State Gazette of 1981 Number 76; Supplement to the State Gazette Number 3209 concerning the Criminal Procedure Code
    b. Secondary Legal Material

        Secondary legal materials are mainly textbooks, because textbooks contain the basic principles of legal scholarship and the classical views of scholars who have high qualifications. In addition to books, secondary legal materials can be in the form of legal writings in the form of articles or journals. Related to this research, the

secondary legal materials used are books on law, articles, and journals.

c. Tertiary Law Material

Sources of research data originating from materials other than law can be used by a researcher, considering that someone who conducts legal research is also allowed to take data that is not from legal material, of course the non-legal material as long as it is considered still relevant to the problem being studied and is able to become a supporter. from primary legal materials and secondary legal materials.

5. Data Collection Method

a. Observation

Observation is a way of collecting data by involving social interactions between researchers and informants in a research setting (observation of research objects in the field).

b. Interview

Interviews are data collection by asking a number of questions orally to be answered orally as well. Interview is a form of communication between two people involving someone who wants to obtain information from someone else by asking questions based on a specific purpose.

c. Documentation

Documentation is a data collection technique that is not directly addressed to the research subject, but as supporting data that is needed by researchers. Documentation can be in the form of published documents or personal documents such as photos, videos, diaries and other notes. Documentation carried out by researchers is all forms of written or unwritten documentation that can be used to complete other data.

6. Research Instruments

   The instrument used in this study was the researcher himself who was directly involved in the research. In qualitative research, the researcher is the key instrument

7. Data Analysis Techniques

   Qualitative data analysis is the process of searching for, and systematically compiling data obtained from interviews, field notes and documentation by organizing data into categories, describing them into units, synthesizing, compiling into patterns, choosing names that are important and what will be studied. and draw conclusions so that they are easily understood by themselves and others.

8. Data Validation Techniques

   Efforts to validate the data are data triangulation techniques. Triangulation technique is used to check the correctness and interpretation of the data. According to Moleong, triangulation is a technique of checking the validity of data that utilizes something and beyond that it is necessary to check or compare the data. The validity test in this research is by using source triangulation technique.

III. Research Result

A. Regulation of Legal Assistance for the Poor

In principle, the enactment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, abbreviated as Law on Advocates and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, abbreviated as Law on Legal Aid, has provided space for advocates or legal advisors to provide legal assistance to the poor. The Law on Advocates states that legal aid is legal aid services provided by advocates free of charge to clients who cannot afford it. Meanwhile, the Law on Legal Aid states that Legal Aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients.

The obligation to provide free legal aid by advocates cannot be separated from the principle of equality before the law and the right of everyone to be accompanied by an advocate without exception. Free legal aid is also provided for non-litigation (out of court) cases.

The Law on Advocates has clearly regulated the obligation of advocates to provide free legal aid as part of professional obligations. In the event that the advocate does not carry out professional obligations, it can be categorized as having committed acts that are contrary to professional obligations, so that sanctions can be imposed.

Legal aid institutions are non-profit institutions whose establishment aims to provide legal aid services for free (free of charge) to people who need legal assistance, but cannot afford even those who do not understand the law. Through the legal aid movement, we must seize the human rights of the poor who have been held captive by the rich for a long time, although it must be realized that legal aid alone is not enough.

In practice, sometimes a defendant since he was still a suspect when he was informed of his right to be accompanied by legal counsel, he had refused from the start. It was only when he entered the trial process and it turned out that the threat of punishment was more than 5 years, then the Panel of Judges who examined the case gave his right to be accompanied by legal counsel, the defendant accepted to be accompanied by legal counsel. This is an appointment from the court to the defendant's legal counsel. Usually the appointed legal adviser is a legal advisor who comes from a legal aid institution that has collaborated with the court with the Legal Aid Post program (POSBAKUM). Or it could be that, when there is one or several legal aid agencies on duty, it is the person on picket duty who is immediately appointed as legal counsel for the defendant.

In addition to providing legal assistance through litigation by legal aid agencies as an access to justice route, it can also be taken through non-litigation channels. The application of legal aid through non-litigation channels is carried out through efforts to resolve cases by seeking a win-win solution for both parties.

The thing that hinders the implementation of providing legal aid for the poor is influenced by the lack of legal aid funds provided by the Government through the Ministry of Law and Human Rights.

There is still a lack of socialization carried out by both the Court and LBH regarding the provision of free legal aid to the community poor people, especially in remote areas, due to the lack of facilities and infrastructure to get to these places. This has resulted in most of the community, especially those who cannot afford it, not yet aware of the provision of free legal aid, then the limited funds provided by the government are one of the causes of the lack of socialization regarding the provision of free legal aid to communities in the regions. isolated.

B. Weaknesses Of the Regulation of Legal Assistance for the Poor

Given the relative lack of optimal protection of the rights of witnesses and victims to obtain legal assistance in the Criminal Procedure Code, it is unfortunate when the provisions of the Legal Aid Law (which should strengthen the rights of victims/witnesses) have not fully adopted guarantees for the right to legal assistance for witnesses/victims, as provided for in the PSK Law, for example. The Law on Legal Aid does not explicitly state that the right to legal aid in litigation includes the right to legal aid for victims in every judicial process.

Those belonging to vulnerable and marginalized groups are actually also entitled to legal assistance. So it is necessary to expand the Law on Legal Aid to cover vulnerable and marginalized groups. Next, determine priorities in providing legal services to legal aid recipients by looking at the urgency of legal aid recipients

as well as how much impact they get as a result of the treatment they get.

Legal aid services must also be able to accommodate the needs of both out-of-court settlement of cases for pre- and post-trial legal aid recipients such as the needs of victims outside the court requiring medical examination activities such as visum et repertum financing which to this day is still borne by the complainant/victim. when the complainant/victim is a person with a disability such as deafness, then a linguist and psychological examination by a psychologist are needed which until now is difficult to obtain for free and also a safe house. Apart from that, pre- and post-trial litigation forms against victims need legal strengthening, empowering victims so they don't become victims again.

The role of the Government in every plan and Legal Aid Program in participating and supervising the enforcement of the rights and obligations of each individual in accordance with the rule of law is indispensable as a form of implementation of the Law on Legal Aid. The state should pay more attention to the implementation of this Legal Aid Program so that its objectives can be achieved and every community can experience justice in their lives. Legal aid aims to provide assistance and grow and foster awareness of the community about their rights as legal subjects by conducting legal reforms in accordance with the development needs of the community so that they are not outdated and have clear objectives.

With the disproportionate number of advocates with the population in Indonesia, the interest of lawyers to provide free legal aid is still low. It is proven that from around 15 thousand members of Peradi, only 100 people have been registered to provide legal assistance to the poor.

The low interest of lawyers in carrying out the obligation to provide free legal aid is partly due to, first, the form of sanctions that are too light for advocates who do not carry out this obligation.

The Law on Advocates does not even stipulate any sanctions for advocates who do not carry out this obligation. Sanctions for advocates who refuse applications for free legal aid are regulated in Article 14 PP Number 83 of 2008 in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissal from their profession for 3 (three) to 12 (twelve) consecutive months; or permanent dismissal from the profession.

The basis for the formation of the legal aid law:

1. Philosophical Foundation.

   The philosophical foundation describes the regulations that are formed taking into account the views of life, awareness, and legal ideals which include the spiritual atmosphere and the philosophy of the Indonesian nation which originates from Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. A regulation per Act is said to have a philosophical basis (filosofische grondslad, philosophical gelding), if its formulation or norms get justification (rechtsvaardiging) if it is studied philosophically and has justifiable reasons when thought about deeply, especially philosophy of the way of life of a nation that contains moral and ethical values of the nation. Universally it must be based on civilization, the ideals of humanity in the association of people's lives. It is also in accordance with the ideals of truth (idee der waarheid), the ideals of justice (idde der gerechtigheid), and the ideals of morality (idge der zedelijkheid). Philosophical meaning will be important The desire for prosperity or welfare will refer to the fundamental value of justice for all Indonesian people. The basic values of the rule of law can be realized by fulfilling the rights of legal aid for all citizens. This is in line with one of the objectives of the establishment of the Republic of Indonesia as mandated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,

which is to realize general welfare. Thus, philosophically, the state's obligation to regulate legal aid to the poor becomes important as a form of implementation of the rule of law that recognizes and protects and guarantees the rights of citizens to obtain justice (access to justice) and equality before the law (equality before the law). especially for poor people or groups of people.

2. Sociological Foundation

   The sociological basis describes the regulations that are formed to meet the needs of the community in various aspects. A statutory regulation is said to have a sociological basis (sociologische grondslag, sociologische gelding), if the provisions stipulated are in accordance with general belief or public awareness. This is important so that the laws and regulations made are obeyed by the community and do not become mere dead letters. On this sociological basis, it is hoped that a law that is made will be accepted by the community fairly and even spontaneously. Legislation that is reasonably accepted will have the power to be effective and will not require much institutional mobilization to implement it. In recognition theory (annerken nungstheorie) it is emphasized that the rule of law applies based on acceptance from the community where the law applies. This sociological dimension reflects the reality that lives in society. When connected with the concept of regulating legal aid management to the community, the existence of legal aid to the community can avoid allegations of injustice or arbitrariness by the strong against the weak.

3. Juridical Foundation

   The juridical basis describes the regulations that are formed to overcome legal problems by taking into account the existing rules, which will be changed, or which will be revoked in order to ensure legal certainty and a sense of justice for the

community. Juridically, what is mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains the basic foundation for the birth of legal instruments in legal politics as the concept of a state of law. A statutory regulation is said to have a juridical basis (juridische grondslag, juridische gelding), if it has a legal basis (rechtsgrond) or legality, especially in higher laws and regulations so that regulations are born.

Responding to some of the problems faced in the implementation of the implementation of legal aid services for the poor as regulated in Law Number 16 of 2011 and other implementing regulations that have not been effective, it is very necessary to make concrete efforts from the government to realize the objectives of the issuance of the Law on Legal Aid The purpose of this is to guarantee and fulfill the rights of Legal Aid Recipients to gain access to justice, to realize the constitutional rights of all citizens in accordance with the principle of equality under the law, to guarantee certainty that the implementation of Legal Aid is carried out evenly throughout the territory of the Republic of Indonesia, and to realize an effective, efficient and accountable judiciary.

C. Reconstruction of Legal Assistance Regulations for the Poor in Indonesia

According to the provisions of Dutch Legal Aid, the recipient of legal aid is a person or entity whose financial capacity or wealth does not reach a certain maximum amount of expenditure. The Legal Aid Institute program in the Netherlands is led by a publicly funded independent agency. The Legal Aid Institute in the Netherlands will handle all types of cases with a minimum case value of more than 180 Euros.

Legal aid in Australia is established and financed of $AU9.7 million by the Commonwealth of Nations and $AU20.4 million from other funding sources implemented in synergy with the Legal

Aid Commission and Professional or Civil Lawyers. Australia does not include the right to legal aid in its constitution, nor does it have this right in its federal laws, but it is recognized in the jurisprudence and state laws that created legal aid commissions.

To obtain legal assistance, applicants must be tested through three criteria, namely:

a. Test income criteria;
b. Case feasibility test; and
c. Test the criteria for the type of case.

In the test, the applicant will be tested in terms of the likelihood of winning, the comparison of cost efficiency with the applicant's benefits, and cost feasibility. Legal assistance in i Thailand is financed by the state at US$1.3 million per year and implemented by the courts, the prime minister's office, the attorney general's office, and by the Thai Council of Advocates. Each of these institutions appointed an advocate to defend the defendants who were poor. Section 242 of the Thai Constitution affirms the right of the people to obtain legal assistance from the state. Thailand has also ratified the International Covenant on Civil and Political Rights which guarantees this right. However, it is not stated in the legislation.

In Taiwan the conditions are more varied, legal assistance can be provided within an organization, namely organizations in local government, local level lawyer associations, and non-governmental organizations. In 2004 Taiwan had a legal aid law (Legal Aid Act). Based on the law, a Legal Aid Foundation was formed to provide equitable services and realize integrated resources and manage funding more effectively. There are three main reasons for the issuance of the law, namely:

1. Lawyers' fees cannot be reached by the general public,
2. The cost of court decisions is very high so that it is not affordable for the poor and

3. There is an obligation to deposit a security deposit in the amount of one third of the execution value. To overcome this, the state is present not only as a regulator, but also as an actor and facilitator.

The Legal Aid Institute in Thailand handles all types of cases. In the UK, eligibility i.e. eligibility for legal aid will depend on: the type of case and financial circumstances. For civil (non-criminal) cases that cover things like debt, family or housing problems, you just need to show that you are unable to pay legal fees and the problem is serious. In general, the prospective client must provide details and proof of the applicant's legal income, benefits, savings and property, and those of the prospective client's spouse. If you are under 18 years of age, it is necessary to provide information about the income of your parent or guardian.

But in certain cases the financial situation of the prospective client is not taken into account in matters such as: Mental health tribunal; children in care; and child abduction. The great thing about legal aid in the UK is that legal aid recipients can pay part of the cost of the case. These costs can take the form of: paying part of the costs upfront or paying back part of the costs if the litigant wins money or property from the case.

Comparing legal aid services (by country) between Indonesia and South Africa may be considered unbalanced. South Africa has started this legal aid program through the Legal Aid Board since 1969 (Legal Aid Act No. 22 of 1969) and was implemented in 1971. In terms of funds allocated by the state, South Africa allocated 1.5 billion Rand (Rp. 1.5 trillion) for legal aid with a poor population of around 22 million people (around Rp. 68,000.00 per capita of the poor). Meanwhile, Indonesia with a legal aid budget of around IDR 48 billion and a poor population of around 28 million people, the budget allocation for legal aid per capita for the

poor is only around IDR 1,700,000. However, we can learn a lot from how South African legal aid is formulated and implemented.

If the prospective recipient of pro bono services is a group that represents individuals who cannot afford it, then the inability of that group can be demonstrated through other supporting documents, such as financial reports for the last few months or data on the individuals they represent.

In urgent circumstances, advocates have the discretion to determine whether an individual or a group is eligible to receive pro bono services without first requesting the supporting documents mentioned above. If you do not use documents, the determination of whether or not to provide pro bono services can also be based on interviews between advocates and potential recipients of pro bono services.

With the timesheet filling mechanism, the law office basically relies on its own scoring system. Similar to advocate organizations, the number of hours submitted by advocates also does not go through a further verification process.

With regard to the quality of pro bono services, the law office may appoint a partner who will be responsible for the overall management of pro bono activities, including monitoring and evaluating the quality of pro bono service implementation provided by advocates in their law offices. The partner can carry out monitoring and evaluation activities independently or appoint a senior associate who has experience in providing pro bono services as an extension of his arm.

In addition to the mechanisms above, to evaluate the quality of pro bono services, law offices can also request an evaluation ation from clients who receive pro bono services and/or form a separate unit (for example: a unit consisting of advocates who are not involved in the pro bono service being evaluated) to conduct an independent evaluation.

Advocate organizations need to establish a network infrastructure and database that can accommodate all relevant pro bono information, from pro bono applications to a list of lawyers available to provide these services. Along with network infrastructure and databases, advocate organizations also need to establish various systems that can facilitate the implementation and monitoring of pro bono services, such as application submission systems and pro bono service delivery reporting systems.

Currently, the imposition of sanctions for non-compliance pro bono is considered ineffective to encourage advocates to provide more pro bono services because the pro bono culture itself has not yet been developed. Giving awards and incentives is considered more attractive. Therefore, advocate organizations need to create a mechanism for giving rewards and incentives to reward advocates who have carried out their pro bono obligations well and encourage other advocates to do pro bono.

Structural legal aid assumes that community poverty is more due to unequal structural conditions. If the old paradigm of legal aid only relied on legal aid through legal channels, without being supported by a structural approach, the legal aid movement would not be effective, then the strategy for aid through legal channels must be supported by a movement that breaks down this inequality. This study discusses the problems of providing legal aid to the community and how to reflect on the principle of equality before the law through the provision of structural and non-structural legal aid.

The scope of legal aid includes exercising power of attorney, accompanying, representing, defending, and/or taking other legal actions for legal purposes. The implementation of the provision of legal aid according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Legal Aid is only carried out by legal aid providers who have the requirements for legal aid providers, permanent offices,

meeting the requirements can be called legal, including being accredited, having management , and has a legal aid program. Apart from being regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the provision of pro bono legal aid is also regulated in Law Number 18 of 2003 concerning advocates. The provision of legal aid by legal aid providers as described above does not eliminate the obligation for an advocate to provide legal aid services free of charge. An advocate is still obliged to provide free legal assistance to justice seekers who cannot afford it in accordance with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Advocates in dealing with free cases must pay the same attention to cases for which they receive fees.

The provision of legal aid to the poor, lawless and oppressed is aimed at nothing but to provide access to justice, which is a reflection of the principle of equality before the law. In practice, assistance for the poor becomes a duty that is required in seeking justice, not based on conscience. The current condition is that the principle of equality before the law has not been used as the main benchmark in providing legal aid. In fact, if this principle is properly and properly reflected in law enforcement in Indonesia, there should no longer be poor people experiencing discrimination and legal injustice.

IV. Conclusion

1. Legal aid in Indonesia is currently covered by Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Normatively, the Law on Legal Aid has provided the basic things needed in carrying out or implementing the concept of legal aid which is one of the constitutional mandates. However, as a regulation or regulation of the Legal Aid Act, it is felt that it has not been able to solve legal problems, especially for the poor who are in the regions, many factors have caused this to happen, but the main factor is the funding factor felt by Legal Aid Organizations as implementers. sufficient especially when the case

being handled is geographically far from the office of the legal aid organization.

2. Weaknesses in the Legal Aid Law can be seen from the lack of funding, the lack of confirmation of the technique of who is the recipient of legal aid, the measure that has been used so far is only a formal measure, namely by showing a certificate of incapacity or SKTM and the like. The next weakness is regarding the technical reporting of activities that require legal aid organizations to frequently go back and forth k the regional office of human rights law to complete administrative completeness, which can actually be handled by paying attention to the file to get a replacement of funds from BPHN.
3. The current reconstruction of legal aid regulations for the poor in Indonesia is by prioritizing a geographical approach, which emphasizes more on the location of the area where legal aid is given to the poor, cannot be funded evenly, if it is generalized it will not accommodate the principle of justice. So that in the future it is hoped that the Legal Aid Law will provide provisions regarding the amount of funds given to legal aid providers based on the distance of kilometers traveled. It is hoped that this will maximize legal aid providers in carrying out the mandate of the Law on Legal Aid with enthusiasm and responsibility

V. Implications

1. Theoretical Implications

   A consistent step is needed, especially from the government to fix this legal aid issue, with the first step being to revise the Law on Legal Aid and put forward the issue of funding to legal aid providers better.

2. Practical Implications

   In overcoming obstacles in the implementation of Legal Aid in Indonesia, in particular, evaluation must be seen since the enactment of the Legal Aid Law until now, an inventory of problems that

hinder the implementation of aid can be completed when there is precise synergy between the relevant stakeholders to resolve them. It takes the formation of a new norm at the level of the Law to resolve this Legal Aid problem, because when the Law has been revised and all problems encountered in the implementation of legal aid have been enshrined in the new Legal Aid Law, the implementing regulations of the new Legal Aid Act will automatically follow. , which in the end formed a system that worked solidly and neatly to provide access to justice for the poor in accordance with the constitutional mandate.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta & Keluarga

Kampusku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta kepada teman-teman satu angkatan di PDIH Unissula Semarang dan Rekan Kerja di Dispora Provinsi Banjarmasin yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan Kuliah Program Doktor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan. Disertasi Dengan Judul "**REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**". Disertasi ini merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstrusi dalam kasus kegagalan bangun yang berbasis nilai keadilan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini

3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan sekaligus Promotor Disertasi penulis yang senantiasa bersabar membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Disertasi ini;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum, M.Hum., selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH. MH., selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini.

Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

M. Erwin Prawira Negara, SH. M.Kn.
NIM. 10301900111

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
RINGKASAN DISERTASI.....iii
DISSERTATION SUMMARY xxxii
ABSTRAK..... liii
ABSTRACT..... lvi
PERSEMBAHAN..... lv
KATA PENGANTAR lvi
DAFTAR ISI..... lviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 20
C. Tujuan Penelitian..... 21
D. Manfaat Penelitian..... 21
E. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran..... 22
1. Kerangka Konseptual 22
2. Kerangka Teoritik..... 26
3. Teori Keadilan sebagai *Applied Theory* 42
F. Metode Penelitian..... 56
G. Originalitas Penelitian 67
H. Sistematika Penulisan..... 68
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 70
A. Pengertian Bantuan Hukum di Indonesia 70
B. Konsep Bantuan Hukum dalam Perspektif Islam..... 77
C. Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Bantuan Hukum 91
BAB III REGULASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU 94

A. Pengaturan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu dalam Hukum Positif Indonesia 94
B. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum 117
C. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Belum Berbasis Keadilan Pancasila..... 140

BAB IV KELEMAHAN REGULASI TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU 163

A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum 163
B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum 184
C. Kelemahan dari Aspek Kultur Hukum 212

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERBASIS KEADILAN PANCASILA 236

A. Kajian Perbandingan dengan Beberapa Negara Asing.... 236
B. Rekonstruksi Nilai Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu agar Bernilai Keadilan Pancasila 259
C. Rekonstruksi Norma Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Berbasis Nilai Keadilan Pancasila 282

BAB VI PENUTUP 312

A. Kesimpulan 312
B. Saran 313
C. Implikasi Kajian 314

DAFTAR PUSTAKA 316

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Satu di antara yang mendasar dalam hubungan dengan perlindungan pada dimensi HAM ini adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum secara konkret ketika warga negaranya menemui masalah hukum.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam hubungan ini penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum. Hal demikian menjadi dasar dari pengakuan dan perlindungan serta penjaminan hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Demikian pula hal ini menjadi dasar dari kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).[43]

Bahwasanya elemen penting dari pemenuhan HAM adalah *equality before the law* atau kesetaraan dalam distribusi hukum bagi

[43]Teti Marsaulina. 2011. *Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*. Bandung: Universitas Parahyangan, hlm.1.

semua orang. Untuk itu, bagian terpenting dari pemenuhan kesetaraan ini adalah pemerataan pelayanan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Dalam pelaksanannya, asas *equality before the law*, tergantung dari subyek hukum di dalam penerapannya. Dalam hal ini keseluruhan sistem, mulai dari aparat penegak hukum, fasilitas dan kondisi masyarakat secara penuh harus mendukung pelaksanaannya.[44]

Hubungan dari keduanya adalah merujuk pada akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dengan demikian persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.[45] Dalam hal ini persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai akses untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Dengan demikian acuan normatif itu tidak sekadar ketentuan yang bersifat konstitusional namun demikian bersifat aplikatif.

Pada dasarnya bantuan hukum senantiasa terkait dengan implikasi bagi pemenuhan akses hukum untuk masyarakat. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan keadilan menjadi motto utama dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kesetaraan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksudkan di atas.

Kondisi ini membawa problematika ketika pada pelaksanannya berbagai upaya menciptakan kesetaraan hukum itu menghadapi perlawanan. Perlawanan dimaksud adalah menghadapi kondisi di dalam

[44]Artidjo Alkostar. 2001**.** *Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Univeritas Islam Indonesia, hlm. 12.

[45]*Ibid.*

masyarakat berupa ketidakadilan struktural yang terjadi dalam bingkai ketidakadilan hukum. Hal ini merupakan kondisi obyektif dalam masyarakat akibat adanya tarik ulur kepentingan dan pertarungan berbagai akses, dari para pemilik akses dominan dalam masyarakat.[46]

Bahwasanya di dalam masyarakat secara alamiah akan senantiasa terdapat masyarakat yang berpunya (*the have*) dan masyarakat tidak berpunya (*the have not*). Khususnya dicermati dari aspek ekonomis, kemampuan terhadap akses finansial itu bisa dicermati secara terukur. Ukurannya adalah pendapatan perkapita.[47] Sementara dalam hal bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin ukurannya tidak semata berdasarkan parameter ekonomi. Artinya masih ada ukuran lain yang justru jauh lebih mendasar.

Mendasarnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini secara konseptual didasarkan kepada kemiskinan struktural. Sebuah konseptual yang ditujukan bahwa sejatinya bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin itu tidak semata dalam bentuk pendampingan di pengadilan. Namun demikian jauh dari itu lebih mendasarnya adalah bantuan hukum yang lebih luas, meliputi

[46]Teti Marsaulina, *Op.Cit.*hlm. 3

[47]Badan Pusat Statistik. 2016: Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.*https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11*

pendidikan hukum yang arahnya adalah kepada kesadaran untuk mentaati hukum dan menciptakan keadilan di dalam masyarakat.[48]

Bantuan hukum masyarakat miskin atau dengan kata lain masyarakat tidak mampu secara umum berhubungan dengan negara berkembang. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa konsepsi, peranan dan pada akhirnya aplikasi dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum, kebutuhan hukum dan tentunya pengetahuan tentang hukum yang tidak sama antara negara yang dikualifikasikan sebagai negara berkembang dengan negara maju.

Sebagai implikasi berikutnya adalah keterkaitan dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan pemberian batuan hukum. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentu saja yang tidak seragam pada seluruh masyarakat Indonesia, melainkan berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan tingkat intelektual masyarakat, mobilitas sosial, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat.

Namun demikian pada perspektif ini ukuran mengenai kemiskinan sebagai landasan masyarakat miskin itu tidak jelas.

---

[48]Lihat: Frans Hendrawinata. 2009. *Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Mermperoleh bantuan Hukum.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Buku ini mengulas secara komprehensif tentangperkembangan bantuan hukum di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin. Juga memaparkan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*). Termasuk peran penting bantuan hukum struktural pada masa lalu. Selain itu, juga dipaparkan konsep bantuan hukum responsif yang meliputi semua bidang hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa membedakan pembelaan perkara individual maupun kolektif yang lebih sesuai diaplikasikan di Indonesia pada masa sekarang (tahun 2009).

Ketidakjelasan ini khususnya bersumber pada pemahaman ukuran kemiskinan yang didasarkan pada parameter ekonomi. Sementara sejatinya kemiskinan di dalam perspektif bantuan hukum itu mempunyai dimensi lebih luas, dalam hal ini menyangkut keawaman bidang hukum. Tentu saja keawaman di bidang hukum itu sebagai dasar yang tidak semata didasarkan kepada kemampuan dalam arti ekonomis.

Permasalahan berikutnya menyangkut niat baik atau *goodwill*. Persoalannya memang sangat mendasar, ketika dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Hal ini konkretnya menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam secara teknis berhubungan dengan prosesperadilan, yang menjadi acuan konkret di dalam praktik pemberian bantuan hukum. Lebih dari itu, permasalahan bantuan hukum ini berhubungan erat dengan suatu proses pendidikan hukum *(legal education).* Konkretnya adalah bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum *(legal conciousness)* agar masyarakat mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum di masyarakat.[49]

Elemen penting pada posisi ini adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam kaitan ini, kesadaran hukum dengan beroperasinya hukum mempunyai kaitan yang erat. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Menurut pendapatnya yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka Undang-Undang yang tidak sesuai dengan

[49]*Ibid.* hlm. 4

kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.[50]

Kesadaran hukum[51] menyangkut distribusi terhadap nilai keadilan yang menjadi cita penegakan hukum. Untuk ini berbagai teori yang menganalisis mengenai kesadaran hukum. Di antara sekian banyak tokoh, kiranya perlu digarisbawahi bahwa Krabbe dan juga Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.[52]

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia.

Dalam hubungan dengan hal di atas misalnya menyangkut kriteria utama bahwahanya orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan

---

[50]Sudikno Mertokousumo. 1989. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.

[51]Analisis secara komprehensif mengenai hal ini, khususnya dalam masyarakat Indonesia, misalnya dalam Buku: AW. Wijaya. 1985. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: Era. Swasta.

[52] Sudikno. *Op.Cit.* hlm. 25.

menjadi permasalahan tersendiri ketika diaplikasikan di dalam pemberian bantuan hukum. Di dalam arti materiil, dasar tidak mampu sebagai prasyarat memperoleh bantuan hukum ini menjadi elemen mendasar di dalam memenuhi permintaan untuk pemberian bantuan hukum, di dalam kerangka mendorong tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keharusan normatif adalah bahwa di dalam penegakan hukum tidak ada perbedaan dari golongan masyarakat mampu dan golongan masyarakat tidak mampu atau golongan masyarakat miskin.

Di dalam pemenuhan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin ini, peran lembaga bantuan hukum sebagai organisasi yang secara formal memberikan pelayanan sangat sentral. Artinya bahwa keberadaan dan kehadiran lembaga bantuan hukum memang sangat dibutuhkan. Namun kehadiran lembaga bantuan hukum tidak serta merta dapat diwujudkan. Keberadaannya memerlukan akomodasi dari berbagai dimensi. Baik dimensi politik berupa dukungan politik, secara ekonomis dengan penyediaan anggaran yang memadai dan keberadaan sumber daya manusia yang menguasai permasalahan serta peran dimensi lainnya.

Tentang bantuan hukum itu sendiri telah melalui sejarah panjang. Diawali dengan kenyataan terjadinya ketidaksetaraan secara hukum dalam segala dimensinya yang membawa implikasi kepada terjadinya ketidakadilan. Secara formal hal ini mengharuskan terwujudnya pelayanan hukum yang berkesadaran bagi semua warga masyarakat.

Dalam perkembangannya, secara yuridis, upaya yang merupakan *goodwill* pemerintah Indonesia dalam merefleksikan masalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui Undang-Undang ini pemberian bantuan hukum di Indonesia mendapatkan suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang berkepastian dan terukur, disertai dengan pemenuhan berbagai fasilitas yang dibutuhkan kendatipun masih sangat terbatas, dan masih jauh dari ideal.

Namun demikian berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah sebagai implementasinya, dalam Bahasa optimistis memang sudah dapat dipandang memadai, untuk kondisi Negara saat sekarang. Untuk itulah, demi peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas, dibutuhkan suatu klarifikasi dan elaborasi lebih mendalam, sehingga dapat lebih mewujudkan kepastian hukum bagi perlindungan hak masyarakat. Khususnya masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) dan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan akses pada pemberi bantuan hukum.

Menilik pada perkembangannya, secara konsepsional bantuan hukum di Indonesia masih terus berkembang. Keberadannya terkait dengan berbagai dimensi yang sifatnya kompleks. Eksistensi lembaga bantuan hukum senantiasa berkembang dinamis, dalam hal bila dikaitkan dengan masalah tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi

golongan miskin dan buta hukum di Indonesia. Kompleksitas ini pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yakni konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.[53]

Prinsip dari bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dan bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dari segi konsep, bantuan hukum mengalami pergeseran yaitu dari individu ke bantuan hukum yang sifatnya struktural. Dari istilah, juga bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah *legal assistance* menjadi *legal aid*. Istilah *legal aid* selalu dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Sementara itu, istilah *legal assistance* merujuk kepada pelayanan hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Untuk konteks Lembaga Bantuan Hukum (LBH) misalnya, istilah yang tepat adalah *legal aid* karena memang kerja-kerja LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum. Hal ini merupakan eksistensi kemiskinan yang sebenarnya, khususnya untuk negara berkembang.[54]

[53]Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Dalam Majalah Prisma. No. 1 Januari 1981, hlm. 40.

[54]*Ibid.* hlm. 42

Orientasi dan tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan bagi si miskin menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat memberikan derma dalam bentuk membantu si miskin, dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai kemuliaan dan kesatriaan yang sangat diagungkan orang. Motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya berdasarkan semangat berderma, melainkan telah bergeser serta lebih mengkaitkan dan atau menampilkan hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan konstitusi modern.[55]

Menurut Nusantara, konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti :

1. Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum,
2. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.[56]

Dibandingkan dengan bantuan hukum tradisional, sifat dan jenis bantuan konstitusional ini lebih aktif, sasarannya tidak saja individual tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal legal juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak melalui jalur hukum semata, tetapi juga jalur politik dan negosiasi. Demikian pula, ruang geraknya pun lebih luas seperti kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

---

[55]*Ibid*.
[56]*Ibid*. hlm. 35.

Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain. Penyadaran ini dipandang sebagai suatu motivasi, untuk berikutnya akan memberikan penyadaran pada dimensi yang lebih luas. Misalnya penyadaran akan hak dalam pemerataan bidang ekonomi, pemerataan dan kebersamaan dalam pelayanan bidang sosial dan sebagainya.

Pada sisi lain, konsep tentang bantuan hukum konstitusional dinilai lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional atau tradisional itu. Hal demikian bisa dipahami, dengan mencermati pada konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu semata. Namun demikian juga yang lebih penting ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Kolektivitas di dalam melakukan pembelaan terhadap klien, para pelayan hukum khususnya para Advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi semata. Namun demikian mereka ini juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Oleh karena itu keberadaan bantuan hukum konstitusional dipahami lahir seiring dengan munculnya idealisme penegakan supremasi hukum sebagai dasarnya.

Di dalam perkembangannya, konsep bantuan hukum konstitusional mendapatkan kritik dari ilmuwan sosial. Hal demikian

pada dasarnya memang wajar, sebagai suatu konskuensi dari konsep yang memang pada akhirnya diuji di dalam masyarakat. Ilmuwan sosial lebih melihat bahwa konsep bantuan hukum konstitusional masih bersifat formalistik dan belum menembus permasalahan dasar yang dihadapi dan justru menjadi masalah mendasar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional dinilai sebagai sebuah konsep yang hanya dimiliki oleh kelas menengah di Indonesia seperti akademisi, advokat, atau mahasiswa terhadap permasalahan sosial di Indonesia.[57]

Sementara jumlah terbesar, yaitu masyarakat miskin justru tidak terjangkau oleh konsep bantuan hukum konstitusional ini. Padahal justru jumlah masyarakat pada tingkatan ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelas menengah. Hal inilah yang kiranya juga menjadi problem mendasar di dalam kaitannya dengan eksistensi pemberian bantuan hukum, khususnya bagi golongan rakyat atau masyarakat miskin di Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, setelah konsep bantuan hukum konstitusional, maka lahirlah kemudian konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Dimaksudkan dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat berperan serta menikmati, atau menggunakan sumber-sumber pendapatan yang

[57]*Ibid*

sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal demikian disebabkan oleh ketiadaan atau keterbatasan akses kehidupan yang tidak terjangkau oleh mereka.[58]

Pada makna empiris, bahwa istilah kemiskinan struktural dengan kemiskinan buatan karena memang sengaja orang dibuat atau dilegalkan. Makna sosial dimaksud adalah di dalam konsepsi bahwa keberadaan mereka itu memang dikondisikan untuk menjadi miskin baik secara ekonomi, akses terhadap informasi maupun akses untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Hal ini tetap dilestarikan dengan berbagai motivasi yang bersifat politis dan finansial.[59]

Sehubungan dengan hal di atas, konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman umum terhadap eksistensi hukum. Realitas yang dihadapi oleh masyarakat adalah merupakan produk dari proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan supra struktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar infrastruktur menunjukan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil.[60]

Dengan demikian pada dasarnya kelembagaan bantuan hukum merupakan rangkaian program melalui jalur hukum dan non-hukum

[58]Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: LP3ES, hlm. 35.
[59]*Ibid*. hlm. 50.
[60]*Ibid*. hlm. 51.

yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan social menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Kesamaan dalam kedudukan di hadapan hukum ini berimplikasi pada kesetaraan dalam pelayanan hukum di dalam praktik hukum. Artinya bahwa eksistensi bantuan hukum secara struktural ini tidak semata ditujukan terhadap kasus individual. Namun demikian cenderung pada kasus kolektif yang diderita dan menjadi permasalahan hukum masyarakat.

Pada perkembangan konsep bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempopulerkan "konsep bantuan hukum struktural" yang ternyata kemudian mendapat tanggapan dan bahasan yang sangat baik di dalam kalangan LBH sendiri maupun di luar LBH. Bahkan konsep bantuan hukum struktural ini tetap aktual dan menjadi bahan renungan atau pemikiran untuk mengembangkan konsep bantuan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan pemunculan dan pengembangan konsep bantuan hukum struktural, Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana, ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari

belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.[61]

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, ada peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan hukum harus dicermati dari sudut bantuan hukum struktural, yang interdependensi dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi dan lain-lain beserta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.[62]

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas berkenaan dengan permasalahan pemberian bantuan hukum dan lembaga pemberi bantuan hukum dapat dilihat dari aspek Filosofis, Teoritis, Yuridis dan Sosiologis. Secara sosiologis bahwa pemberian bantuan hukum adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Secara yuridis memang pengaturan bantuan hukum ini mengalami perkembangan dan secara teoritis memang bantuan hukum dapat memberikan bantuan kemudahan dalam penyelesaian yang dihadapinya namun secara filosofis oleh karena masyarakat kita yang tersangkut masalah hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu seringkali diperlakukan tidak adil,

[61]*Ibid*. hlm. 3.

[62]Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.vii.

maka dengan pemberian bantuan hukum juga dalam rangka menciptakan keadilan dalam masyarakat, sehingga masyarakat miskin dapat menikmati pelayanan hukum yang sama dengan maysrakat yang mampu memperoleh keadilan.

Oleh karena itu secara sosiologis masyarakat miskin yang begitu berat untuk mencari sendiri pemberi bantuan hukum dapat melalui program pemerintah ini. Padahal masyarakat miskin di Indonesia masih cukup besar sehingga pemberian bantuan hukum ini untuk masyarakat miskin tetap aktual dan relevan yang untuk terus dikaji secara mendalam.

Dasar hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat semula dalam pengertian sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan juga atas dasar KUHAP yang masih terbatas pemberian bantuan hukum individual, sehingga pemberian bantuan hukum seperti ini disebut sifatnya masih pemberian bantuan hukum tradisional, kemudian politik hukum bantuan hukum itu diarahkan lebih berkembang dapat berimplikasi kepada perbaikan kehidupan masyarakat secara luas setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan pemberian bantuan hukum menjadi bantuan hukum struktural.

Bahwa pada hakikatnya bantuan hukum adalah untuk meringankan beban masyarakat pencari keadilan yang berhadapan dengan hukum.Bahwa pemerintah di dalam kebijakannya untuk

memberikan bantuan hukum, masyarakat pencari keadilan dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Demikian pula bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mempunyai problematika filosofis, yurudis, dan sosiologis. Dalam tataran Filofofis, secara Ontologi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mengandung ketidakadilan bagi pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang ini menitik beratkan Pemberian Bantuan Hukum hanya diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin atau orang tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, ukuran kemiskinan ini juga masih sangat sumir. Kemudian terkait pemberian hukum dapat diakses atau tidak oleh masyarakat tidak mampu harus digantungkan pada eksistensi Pemberi Bantuan Hukum. Regulasi bantuan hukum ini mengggariskan tentang Subyek Pemberi bantuan hukum di kualifisir dalam bentuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berupa lembaga atau institusi yang di akui oleh Pemerintah didasarkan ukuran melalui regulasi tentang Akreditasi lembaga atau ogasisasi pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum yang mendapat pengakuan pemerintah harus dikualifisir sebagai lembaga yang terakreditasi. Dalam regulasi selanjutnya mengenai Akreditasi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ini di kualifisir dalam kategore A, B dan C, dengan sebelumnya harus melalui mekanisme dan persyaratan tertentu yang lumayan berat, dan melalui proses verifikasi.

Regulasi yang baik adalah yang mampu memberikan pengaturan dalam kepastian hukum dan lebih dari itu tentunya juga haruslah regulasi berdampak positif dengan mengdepankan nilai manfaat bagi masyarakat. Terkait regulasi tentang Akreditasi Lembaga/organisasi bantuan hukum yang melalui proses verifikasi dengan mekanisme penilaian untuk kategore A,B atau C juga di atur sedemikian yang cukup memberatkan, sehingga menyebabkan adanya perbedaan pemberian pembiayaan oleh pemerintah menjadi kurang pas di rasakan,jika akreditasi Lembaga/Organisasi hanya C akan dapat jatah untuk pembiayaan pada perkara yang ditangani adalah sebanyak 15 perkara dan yang Aapun Akreditasi Prodi yang mendapatkan kualitas A mendapat alokasi pembiayaan lebih besar. Selanjutnya mungkin juga banyak Lembaga/ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang tidak terakreditasi, hal ini tentunya dapat dikatakan nilai kemanfaatan tidak terpenuhi, dan akses masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi tidak sepenuhnya tercapai atau bahkan mengalami ketidakadilan.Hal ini semakin menarik jika kita coba telaah dalam analisis terkait dengan Nilai Keadilan Pancasila. Bagaimanakah nilai keadilan Pancasila terpenuhi dalam regulasi bantuan hukum yang pemberian bantuan hukum ini digantungkan pada eksistensi pemberi bantuan hukum yang harus terakreditasi, sementara proses akreditasi yang lumayan berat dan akreditasinya juga di kualifikasikan dalam berbagai kategore tertentu yang berdampak pada pembiayaan pemerintah atas proses pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat

tidak mampu. Sementara bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya karena hak asasi warganegara yang dilindungi secara konstitusional.

Secara Efistimologi diperlukan suatu format proses pemberian bantuan hukum sebagai pemenuhan hak asasi warganegara yang di implementasikan melalui program bantuan hukum dengan mengedepankan aspek manfaat bagi masayrakat, artinya bahwa pemberian bantuan hukum yang menjadi program pemerintah jangan menjadi hal yang berat untuk mendapatkannya. Oleh karenanya regulasi bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jangan menambah beban masyarakat sebagai penerima bantuan hukum dan jangan pula memberi beban pada pemberi bantuan hukum dengan kebijakan tentang akreditasi.

Secara Aksiologi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak dapat memenuhi hakekat bantuan hukum yaitu meringankan beban bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai pencari keadilan (yang bermasalah dengan hukum), karena membuat akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum menjadi agak sulit disebabkan regulasi tentang akreditasi Pemberi bantuan hukum.Problem Yuridis dalam hal ini yakni berkenaan dengan regulasi tentang akreditasi Lembaga atau organisasi Bantuan Hukum selaku pemberi bantuan hukum masih dirasakan berat dan pengkulaifikasian akreditasi menyebakan problematika secara yuridis empiris. Kemudian

problemtika teoritis berupa pergeseran konsep Pemberian Bantuan Hukum, dari tidak mampu membayar ongkos perkara menjadi orang yang tidak mampu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan.Adapun problem Sosiologis yang dalam hal ini orang atau kelompok miskin (tidak mampu) mengalami kesulitan dalam akses untuk mendapatkan Bantuan Hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti berminat melakukan penelitian berbentuk disertasi yang berjudul: REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian tentang rekonstruksi regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin indonesia berbasis nilai keadilan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu di Indonesia belum berbasis nilai Keadilan Pancasila
2. Apa kelemahan Regulasi Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu yang berbasis nilai keadilan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin Indonesia belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin Indonesia pada saat ini.
3. Menemukan dan menganalisis rekonstruksi regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretik maupun secara praktis. Manfaat secara teoretik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian secara komprehensif terhadap permasalahan politik hukum dalam pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat miskin dalam memperoleh haknya di bidang pelayanan hukum.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsepsi bantuan hukum di Indonesia khususnya bagi masyarakat miskin dalamperspektif penegakan keadilan.

Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan kebijakan yang berimplikasi pada penyempurnaan peraturan perundang-undangan, berkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Sebagai sumbang pikir untuk perspektif ke depan dari aktivitas penegakan hukum dan dimensi yang lebih luas yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

a. Nilai Keadilan

Dalam elaborasi permasalahan ini secara konseptual berangkat dari peermasalahan apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.

Demikian juga halnya jika hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan

demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.[63]

Bahwa bentuk-bentuk hukum positif, yang sampai sekarang menjadi perhatian adalah yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Konkretnya adalah undang-undang, traktat, kebiasaan. Masing masing mempunyai suatu sifat yang sejalan, kaidah-kaidah hukum itu bersifat umum, di dalam kaidah itu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang tingkah-laku orang pada umumnya, setiap orang yang dimaksudkan di dalam kaidah hukum itu haruslah menginsyafi ketentuan tersebut.

Hukum di dalam bentuk-bentuk itu dinamakan, hukum obyektif. Di dalam hukum obyektif itu dirumuskan secara teoritis peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di dalam pergaulan masyarakat, berikut di tetapkan pula akibat-akibat daripada kejadian peristiwa, yang disusun secara teoritis itu, biasanya kaidah hukum itu dirumuskan sebagai berikut : "inilah yang terjadi, maka itulah akibatnya". Hukum yang dihubungkan dengan oknum-oknum (atau badan yang bertindak sebagai oknum) disebut sebagai hukum subyektif.

Hukum subyektif itu menguasai perhubungan yang muncul di antara dua orang oknum khususnya, yaitu oleh karena

[63]*Ibid*. hlm. 100.

mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan secara teoritis di dalam hukum obyektif itu. Oleh sebab seorang yang tertentu benar-benar berbuat hal yang dirumuskan secara teoritis di dalam kaidah hukum itu, maka akibat hukum yang terdapat di dalam hukum obyektif di pertalikan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Negara-negara modern mempunyai alat-alat yang khusus menyelidiki, ataukah perbuatan-perbuatan yang benar terjadi itu sungguh sesuai dengan kaidah hukum yang disusun secara teoritis, alat itu ialah hakim.[64]

b. Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

Untuk itu kiranya sebagai dasar perlu diingat kembali, rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam GBHN. Pada butir ke-2 TAP MPR No IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang arah kebijakan bidang hukum dikatakan : Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Berdasarkan kutipan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik :

[64]*Ibid*. hlm. 56.

1) sistem hukum nasisonal yang merupakan implementasi dari politik hukum nasional itu dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu dan komprehensif ;
2) sistem hukum nasional yang menjadi implementasi dari politik hukum nasional itu dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat ;

Berdasarkan kutipan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai dasar:

1) sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu ;
2) sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat melakukan pembaharuan terhadap warisan hukum kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan reformasi.

Fakta membuktikan bahwa meskipun tidak menyebutkan politik hukum kodifikasi dan unifikasi, pemerintah tetap berupaya melakukan kebijakan tersebut hanya saja, seiring dengan perkembangan sosial-politik dan kesadaran hukum masyarakat, kebijakan tentang unifikasi hukum mengalami tantangan dari banyak pihak. Setelah menerima kritik yang bertubi-tubi dan mengalami puncaknya ketika disahkan pemberlakuan peradilan Islam, Mahkamah Syar'iyah, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam kaitan ini, politik hukum nasional bergeser kepada kecenderungan kuat, yaitu tidak lagi menganut politik hukum unifikasi, tetapi telah beralih ke pluralisme hukum. Hal ini sebagai dasar dari kebijakan dalam bidang hukum yang didasarkan pada era globalisasi yang menjadikan posisi Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum dunia. Atas dasar pergaulan internasional dimaksud maka pluralism hukum menjadi sebuah kecenderungan, terutama dengan mengakomodasikan berbagai sistem hukum yang ada.[65]

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Negara Hukum

Pembahasan yang melandasi pemberian bantuan hukum, maka secara teoritik didasarkan pada teori negara hukum. Pembicaraan tentang negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pembahasan Politik Hukum dalam pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dalam kerangka negara hukum didasarkan pada pemberian Hak Asasi Manusia.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila

[65]Edy Ikhsan. 2010. *Konfilk Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 68.

kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.[66]

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten istilah negara hukum itu berasal dari Abad XIX, tetapi gagasan tentang negara hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam Abad XVII. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1689 (*Great Britain*) yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan pengganti Raja di Inggris.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *The Rule of Law*.[67] Paham *Rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *Rechtstaats* mulai populer pada Abad XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham *Rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-

[66]M. Sastrapratedja. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius. Hlm. Lihat [pula pada buku Bander Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 2.

[67]Agussalim Andi Gadung. 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 33.

ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *The Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.[68]

Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant adalah mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat* hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.[69]

Friedrich Julius Stahl memberikan pengertian negara hukum sebagai berikut: Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh

[68]Firdaus Arifin Suharizal. 2007. *Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 59.

[69]Universitas Gajah Mada. 2012. *Prociding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada, hlm. 234.

daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.[70]

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2) Pembagian kekuasaan.
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4) Peradilan Tata Usaha Negara.[71]

A.V. Dicey sebagaimana dikutif oleh Jimly Asshiddiqie menyebut tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:

1) *Supremacy of Law*.
2) *Equality before the Law*.
3) *Due Process of Law*.[72]

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan keempat prinsip *rechtstaat* yang dikembangkan oleh F.J. Stahl tersebut, pada intinya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh AV. Dicey untuk menandai ciri-

[70]Firdaus Arifin Suharizal. *Op.Cit*, hlm. 59.
[71]Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, hlm. 130.
[72]*Ibid.*

ciri negara hukum. Bahkan oleh *The Interrnational Commision of Jurists*, prinsip-prinsip negara hukum ini ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The International Commision of Jurists* adalah:

1) Negara harus tunduk pada hukum,
2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu,
3) Peradilan yang bebas tidak memihak.[73]

Terkait uraian tentang negara hukum di atas, Jimly Asshiddiqie merumuskan adanya 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) sekaligus sebagai pilar-pilar utama menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*), yaitu:

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*).
3) Asas legalitas (Due Process of Law).
4) Pembatasan kekuasaan.
5) Organ-organ penunjang yang independen.
6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
7) Peradilan Tata Usaha Negara.

[73]Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis.* Jakarta: Buana Ilmu Populer, hlm. 198-199.

8) Mahkamah Kontitusi (*Constitutional Count)*.

9) Perlindungan hak asasi manusia.

10) Bersifat demokratif (*Democratishe Rechtstaat*).

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*).

12) Transparan dan kontrol sosial.[74]

Bahwa berdasarkan hal di atas, prinsip-prinsip maupun unsur-unsur negara hukum yang didasarkan pada teori negara hukum telah termuat dalam sistem ketetanegaraan Indonesia. Gagasan untuk mewujudkan negara hukum tampak lebih konkret pasca perubahan UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam salah satu uraian terkait dengan negara hukum, I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa salah satu gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum.[75]

Paham negara hukum sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berkait erat dengan paham demokrasi, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sedemikian eratnya kaitan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma yang melandasi seluruh perubahan dalam UUD 1945 adalah terletak pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan

[74]Jimly Asshiddiqie. 2011. *Op. Cit.*, hlm. 132.

[75]Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25-26.

ayat (3) UUD 1945 yang merupakan pengejawantahan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.[76]

Lebih rinci mencermati pada konstruksi yuridis di dalam UUD 1945 (sebelum amademen), akan terdapat unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2),
2) Pemerintahan berdasarkan konstitusi (Penjelasan UUD 1945);
3) Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Pasal 27, 28, 29, 31);
4) Pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19);
5) Pengawasan peradilan (Pasal 24);
6) Partisipasi warga negara (Pasal 28);
7) Sistem perekonomian (Pasal 33).[77]

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)".[78]

Oleh karena digunakan istilah *rechtsstaat* dalam Pasal 1 ayat 3 Amandemen perubahan UUD NRI 1945 beserta

[76]I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25-26.

[77]Lihat: diantaranya dalam buku Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Kaukaba. hlm. 46.

[78]Padmo Wahyono. 1980. Negara Hukuim Indonesia. Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 132.

penjelasannya yang dilakukan Indonesia pada tahun 1999-2002, maka pemasalahan yang memerlukan klarifikasi adalah *rechtsstaat* atau Negara Hukum yang bagaimanakah yang dianut oleh Indonesia ini.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Oleh karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan.[79]

Namun demikian kebebasan beragama di Negara Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Sementara itu di Uni Soviet dan Negara komunis lainnya "*Freedom of Religion*" memberikan pula jaminan konstitusional terhadap propaganda anti agama. [80]

Seno Adji mengemukakan pula ciri Negara Hukum Indonesia lainya yaitu tidak adanya pemisahan yang *rigid* dan mutlak antara agama dan negara. Menurutnya agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Hal demikian sangat

[79]Oemar Seno Adji. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, hlm. 45.

[80]*Ibid.*

berbeda dengan di Amerika serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat. Di sisi lain Padmo Wahyono melihat Negara Hukum Pancasila berdasarkan atas asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945.[81]

Adapun yang diutamakan di dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. hal demikian itu direfleksikan oleh Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa yang terpenting itu adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perseorangan. Akan tetapi, perseorangan itu berupaya sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.

Negara Hukum Pancasila dapat dipahami melalui penelaahan pengertian Negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan. Dalam hubungan ini Padmo Wahyono mengemukakan bahwa hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau ketertiban dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Berpijak pada dua pendapat pakar hukum di atas disimpulkan bahwa dalam penyelesaian UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun demikian konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep Negara hukum Barat Eropa continental dan bukan pula konsep *rule of law* dari

[81]Padmo Wahjono. *Op.Cit.*, hlm. 135.

Anglo Saxon melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri yang bercirikan :

1) Hubungan erat antara agama dan negara
2) Bertumpu pada KeTuhanan Yang Maha Esa
3) Kebebasan beragama dalam arti positif
4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang dan
5) Asas kekeluargaan dan kerukunan.[82]

Unsur pokok negara hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila menurut Philipus M.Hadjon adalah juridisme Pancasila. Dari juridisme yang akan mengalir *rechts idee* yang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif terhadap hukum nasional. Fungsi konstitusi artinya *rechts idee* menjadi dasar suatu tata hukum dan fungsi regulatif disini berarti *rechts idee* berfungsi menilai norma hukum (apakah adil, apakah sesuai dengan asas pengayoman dll).[83] Dengan demikian dalam negara hukum bahwa hukum menjadi supremasi.

Negara hukum dengan supremasi hukum tidak akan lepas dari konsepsi dasar yang dipakai sebagai landasan untuk menciptakan sebuah negara nasional yang pada tataran kenegaraan dan hukum tertinggi disebut konstitusi. Ini merupakan dasar yang bersifat universal yang berlaku pada tiap-tiap negara.

---

[82] *Ibid.*

[83] Philipus M. Hadjon. *Pancasila sebagai dasar negara dan Hukum Tata Negara.* Yustika Media Hukum dan Keadilan. Vol.I.No.2 Desember 1998, hlm. 71.

Dalam tataran koridor konstitusional, maka persoalan mengenai supremasi hukum terwujud di dalam sebuah masyarakat nasional yang disebut negara hukum konstitusional, yaitu suatu negara dimana setiap tindakan dari penyelenggara negara: pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan didaerah terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat/wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat.[84]

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat yang ada, di dalam negara demokrasi hukum dibuat untuk melindungi hak-hak azasi manusia warga negara, melindungi mereka dari tindakan diluar ketentuan hukum dan untuk mewujudkan tertib sosial dan kepastian hukum serta keadilan sehingga proses politik berjalan secara damai sesuai koridor hukum/konstitusional.

Dalam hubungannya dengan hal diatas, UUD NRI 1945 sebenarnya telah mempunyai ukuran-ukuran dasar yang bisa dipakai untuk mewujudkan negara hukum dimana supremasi hukum akan diwujudkan. Manakala dilihat dengan seksama UUD NRI 1945 mejelaskan bahwa: Indonesia adalah negara berdasar atas negara hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka.

Hal diatas merupakan asas negara hukum. Bagaimana menyusun negara hukum, bagaimana negara hukum itu akan

[84]Mengenai prinsip perwakilan ini, lihat misalnya dalam buku Samsul Wahidin. 2014. *Konseptualisasi dan Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

diarahkan, dalam arti untuk apa kita wujudkan negara hukum ini, sekaligus dituntut untuk menegakkan hukum sebagai salah satu piranti yang bisa dipergunakan secara tepat di dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita bangsa.[85]

Formula UUD 1945 tersebut mengandung pengertian dasar bahwa di dalam negara yang dibangun oleh rakyat Indonesia ini sebenarnya diakui adanya dua faktor yang terkait dalam mewujudkan negara hukum, yaitu satu faktor hukum dan yang kedua factor kekuasaan. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan *inkonkreto* dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tanpa adanya kekuasaan dan dimanifestasikan di dalam UUD NRI 1945.

Dengan demikian dua faktor hukum dan kekuasaan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, bagaikan lokomotif dan relnya serta gerbong yang ditarik lokomotif. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan bahkan lumpuh tanpa adanya dukungan kekuasaan. sebaliknya kekuasaan sama sekali tidak boleh meninggalkan hukum, oleh karena apabila kekuasaan dibangun dan tanpa mengindahkan hukum, yang terjadi adalah satu negara yang otoriter.

Fungsi kekuasaan pada hakekatnya adalah memberikan dinamika terhadap kehidupan hukum dan kenegaraan sesuai norma-norma dasar atau *grundnorm* yang dituangkan dalam

[85]Padmo Wahjono. *Op.Cit.*, hlm. 202.

UUD NRI 1945 dan kemudian dielaborasi lebih lanjut secara betul dalam hirarki perundang-undangan yang jelas.

Pada pespektif berikutnya, bahwa supremasi hukum baru dapat ditegakkan apabila para penyeleggara negara berperilaku demokrat, egaliter dan manusiawi yang dijiwai oleh nilai-nilai ideologi Pancasila. Artinya letak persoalan pokoknya belum tegaknya supremasi hukum bukan pada konsepsi negara hukumnya, bukan konsepsi dasar ideologi negara pancasila yang tidak bisa memenuhi tantangan jaman. Namun demikian terletak pada praktek penyelenggara negara di semua bidang yang telah meninggalkan unsur-unsur ditanamkan oleh UUD 1945, yaitu semangat penyelenggara negara.

Terutama butir 4 dari pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan lain-lain penyeleggara negara untuk budi pekerti kemanusiaan yang luhur dengan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, yang digali berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (moral religius), nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (harkat dan martabat manusia dan hak-hak azasi manusia), nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kerakyatan dan prinsip musyawarah mufakat, prinsip perwakilan, dan nilai-nilai

keadilan kebenaran untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[86]

Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD Tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara.

Bangsa Indonesia memahami bahwa *The Universal Declaraton of Human Rights* yang dicetuskan pada tahun 1948, merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa *The Universal Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan oleh *Inter Action Council* pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi *The Universal Declaraton of Human Rights* tersebut.

Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi

[86]*Ibid.*

indonesia, oleh karena itu perlu diadopsikan kedalam rumusan Undang-Undang Dasar atas pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa indonesia. Sehingga dengan demikian perumusannya dalam Undang-Undang Dasar ini mencakup warisan-warisan pemikiran yang masih terus akan berkembang dimasa-masa yang akan datang.

Dari uraian diatas terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara materil ini digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukan pada hakekatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.

Selanjutnya hubungan hak asasi manusia dan pemberian bantuan adalah bahwa pemberian bantuan hukum itu tidak lain dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa, yang apabila tidak dipenuhi maka

ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, karena diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah bantuan hukum sebagai hak tersebut agak terasa mahal atau merupakan barang mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana indonesia, apalagi kalau kita lihat dimasa lampau pada pemberlakuakn HIR *(Herziene Inlandsch Reglement)* di Indonesia sampai dengan tahun 1981, bahwa masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Bahwa pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa

hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Disini kita mengenal adanya lembaga bantuan hukum, bahwa lembaga bantuan hukum berfungsi sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana *(Criminal Justice System)* yang dapat memiliki peranan penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu diperlikan suatu proses hukum yang adil *(due proces of law)* melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

3. Teori Keadilan sebagai *Applied Theory*

a. Teori Keadilan John Rawls

Sebagai elaborasi berikutnya digunakan teori keadilan. Teori keadilan menjadi filosofi yang erat berhubungan dengan pemenuhan akses terhadap pelayanan atau pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin.

Teori yang dijadikan dasar untuk elaborasi permasalahan beerikutnya adalah teori keadilan, Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawl, dalam bukunya berjudul *A*

Theory of Justice mematok ukuran nilai keadilan pada dasarnya adalah *justice as fairness.*[87]

Grand theory yang dimaksud adalah teori yang utama. Pokok analisis filosofis terhadap permasalahan bantuan hukum adalah berdasarkan teori keadilan. Dari pengkajian yang dilakukan, pada akhirnya John Rawl menggariskan prinsip keadilan itu ada dua sebagaimana dinyatakannya :

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compartible with a similar system of liberty for all. Adapun syarat kedua: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both :to the gretes benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principles, and attached to aoficce and position open to all under condition of fair equality of opportunity*.[88]

Kendatipun pada awalnya konsep keadilan itu dimaksudkan dalam bidang ekonomi, tetapi prinsip kejujuran (*fairness*) dan dua syarat tersebut dapat diterapkan dalam hukum. Prinsip inilah yang juga harus dipatuhi dalam pelaksanaan hukum guna mencapai keadilan. Bahwa dalam proses dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai politik pemerintah, harus berangkat dan didasarkan pada teori keadilan.

---

[87]John Rawl, *Theory of Justice.* hlm. 20, sebagaimana disebutkan dalam Hilaire McCoubrey. (Terjemahan). Jogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 267.

[88]*Ibid.*

Dua prinsip keadilan Rawls[89] dibawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya *(principle of greatest equal liberty).* Prinsip ini mencakup :

1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan *(the difference principle)* dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan *(the prinsiple of fair equality of opprtunity).* Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

[89]*Ibid*. hlm. 110.

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diutungkan. Andaikan bahwa penanaman modal (investasi) yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa.

Andaikan bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian penanaman modal itu sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru.

Meskipun demikian, orang tak akan bersedia menanggung resiko investasi besar-besaran jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. Dalam keadaan demikian itu pajak keuntungan yang rendah dapat menciptakan insentif penanaman modal. Prinsip perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para investor ditutntut untuk menciptakan maksimalisasi prospek hidup golongan yang paling kurang diuntungkan.

Oleh karena itu para investor harus menikmati bagian kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut prinsip perbedaan, ketidaksamaan

dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika investasi dimaksudkan untuk maksimalisasi prospek hidup mereka yang paling kurang diuntungkan. Hal ini merupakan elemen mendasar dalam kerangka pencapaian keadilan di dalam masyarakat.

Prioritas Keadilan menurut Rawls bertumpu pada tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut John Rawls mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut.[90] Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain atau sebutlah saling bertabrakan, oleh karena itu pemenuhannya harus dilakukan secara komprehensif. Adapun prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika dan hanya jika pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

[90] *Ibid.* hlm. 145.

2) Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.[91]

Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang. Dasar Kebenaran dan Prinsip-prinsip Keadilan Menurut Rawls. Rawls[92] mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya.

Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia. Dalam kaitan ini, tampilan tentang kebebasan dari kungkungan alam dan masyarakat dengan cara-cara yang kita kenal dalam posisi asli. Dengan kata lain, jika manusia menerima prinsip-prinsip yang diakuinya harus dipilih

[91]*Ibid*. hlm. 129.

[92]*Ibid.* hlm. 450.

dalam posisi asli, ia mengeksperesikan kodratnya sebagai manusia, yaitu bertindak secara otonom. Immanuel Kant sendiri mengidentikkan "otonomi" dengan rasionalitas. Pertanyaan "mengapa manusia harus bertindak otonomi" tampak ketika menyatakan bahwa kita bertindak secara otonom jika kita menerima prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asli. Otonomi dan rasionalitas merupakan dua unsur penting dalamnya.

Diantara permasalahan yang dihadapi dalam penerapan bantuan hukum yang merata demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang sehingga perhatian dan penerapan bantuan hukum khususnya bagi golongan yang kurang mampu sangat kurang terperhatikan di Indonesia. Menurut penilaian Metzger, bahwa pada dasarnya bantuan hukum pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, mempunyai tujuan yang sama dengan program yang dilaksanakan pada masyarakat-masyarakat modern. Akan tetapi disamping itu Metzger juga berpendapat bahwa salah satu tujuan yang penting dari program bantuan hukum adalah untuk mendukung pembangunan suatu kesatuan sistem hukum nasional. Jadi pemberian bantuan hukum tidak saja dalam gambaran atau pandangan sempit hanya terhadap tersangka atau terdakwa saja, namun ada kaitan yang sangat erat dengan tujuan pembangunan

negara indonesia yang ada di dalam Undang-undang dasar, sehingga perlunya bahan dan informasi yang luas mengenai hal ini.[93]

Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti bahwa negara harus menggunakan seluruh sumber daya nya termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya membuat tindakan dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *acces to justice*. Sejatinya, sudah seharusnya pemerintah mulai serius dalam membuat serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah satunya dengan membuat regulasi yang mampu mangatur secara efektif program bantuan hukum terutama terhadap si terpidana yang cendrung diabaikan bahkan tidak diacuhkan, Dalam rangka perhormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menunjukan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya. Jadi yang menjadi penghalang penerapan bantuan hukum ini diantaranya juga

[93]Qomarudin. 2007. *Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marginal dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hlm.

adanya peranan negara yang kurang menjalankan kewajibannya, dalam memberikan jaminan atas batuan hukum, jaminan dalam arti mengawal pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat didalam undang-undang. Jadi walaupun hak-hak atas bantuan hukum ini sudah ada didalam Undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping adanya faktor penghambat lain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, yang melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakukan aparat penegak hukum tersebut.

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu:[94] "Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum yang disebut juga keadilan legal. Kedua, keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi keadilan distributive (*justitia distributive*), keadilan komutatif (*justitia commutative*), keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)[95].

[94]*Ibid.*, hlm. 269.

[95]Keadilan Distributif adalah keadilan yang diterapkan secara proporsional. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan

Dalam mengkonsepsikan tentang keadilan Majid Khadduri membedah keadilan dalam beberapa pendekatan, yaitu : Keadilan teologi, merupakan keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog sehubungan dengan sifat Kehendak (Iradah) Allah dan Essensinya.

1) Keadilan filosofis, merupakan keadilan yang didefinisikan dan ditentukan oleh filsuf tidak sesuai wahyu, tetapi dengan akal budi.
2) Keadilan Etis, merupakan keadilan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan tertinggi yang menentukan suatu standart tingkah laku manusia.
3) Keadilan legal, merupakan keadilan yang sesuai dengan hukum berdasarkan kepada kaidah-kaidah etimologi, keadilan suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi.[96]

Dalam keadilan legal dapat dilihat dua kategori keadilan yaitu :

1) Keadilan substansi (*subtansial justice*) merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum, dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum merupakan deklarasi tentang kebenaran-kebenaran" dan "kesalahan-

kontraprestasikan. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hlm menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. *Ibid.* Hlm. 157.

[96]Majid Kadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti. hlm. 257.

kesalahan", dalam arti dapat menelorkan keadilan yang sesungguhnya.

2) Keadilan prosedural (*formal justist*), merupakan aspek internal dari keadilan subtansi, dimanifestasikan pada tingkat regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan hukum substansi.
3) Keadilan Politik, merupakan suatu tujuan prinsipal dari suatu negara adalah keadilan yang sesuai dengan kehendak yang berkuasa. Dengan lebih menonjolkan kepada arogansi kehendak penguasa.
4) Keadilan Sosial, merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai yang mengejawantahkan dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, yang hidup serta dipelihara nilai-nilainya dalam kehidupan.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan mengaitkan terhadap perilaku manusia pada dasarnya dapat dipahami bahwa suatu perilaku adalah adil apabila perilaku itu merupakan ekspresi dari keseimbangan hak dengan kewajiban. Adalah adil bagi seseorang yang menerima hak sebesar 3, menanggung beban kewajiban sebesar 3 pula. Hal ini menjadi dasar dari

penegakan keadilan, yang berdimensi kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai dasarnya.[97]

Teori keadilan sosial (*social justice*) berkenaan dengan pendistribusian kemanfaatan dan beban yang seimbang yang diciptakan oleh akibat keberadaan dan cara kerja lembaga-lembaga sosial, asset sosial, dan organisasi publik. Teori ini berguna dalam menganalisis manfaat dan akibat-akibat merugikan dari perilaku subyek hukum, untuk menentukan konstruksi keadilan dalam arti sebenarnya dari segi kemanfaatan dan akibat buruk yang diderita seseorang atau masyarakat akibat interaksi hukum yang menyebabkan munculnya masalah dan harus diselesaikan dengan cara yang berkeadilan.[98]

Dua teori keadilan lainnya yang berguna dalam analisis ini adalah teori keadilan Komutatif (*commutative justice*) dan Teori Keadilan Korektif (*corrective justice*). Teori keadilan komutatif adalah teori keseimbangan hak dan kewajiban. Jika seseorang menerima hak sebesar 5, maka adil jika ia menanggung beban kewajiban sebesar 5, dan jika ia melanggar hak seseorang sebesar 5, maka adalah adil bagi dia untuk menanggung beban kewajiban untuk memulihkan sebesar 5.

Teori keadilan korektif adalah teori yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan (*seek to restore inequality*)

[97]Tungga Dewi Sunarto. 1978. *Filosofi Keadilan Pada Struktur Masyarakat Majemuk.* Surakarta: Panepen Mukti, hlm. 15.

[98]Michael J. Sandel. 2010. *Justice: What The Right Thing To Do?*, Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 6. Lihat juga: Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, hlm. 255.

yang diakibatkan oleh perlaku atau perbuatan yang salah. Jika seseorang menabrak orang lain karena kesalahan dirinya dan karena tabrakan itu orang lain itu menderita kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tabrakan itu, maka orang yang menabrak itu menanggung beban kewajiban untuk memulihkan keadaan mobil itu ke keadaan sebagaimana semula.[99]

Pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Keadilan yang didasarkan pada Pancasila ini, secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai:

1) Jiwa Bangsa Indonesia;
2) Kepribadian Bangsa Indonesia;
3) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia;
4) Dasar Negara Republik Indonesia;

[99]*Ibid*. hlm. 226.

5) Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia;
6) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara;
7) Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia;
8) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian nilai keadilan berdasarkan Pancasila adalah didasarkanpada keadilan sosial. Tepatnya adalah keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Kata adil dalam Pancasila disebutkan tak kurang dari dua kali yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Pada perspektif teoritik bahwa bangsa Indonesia telah meyakini Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang implikasi otomatisnya Pancasila adalah kebenaran.

Kata adil pada sila kedua bermakna kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. Hal ini bukan berarti keadilan pada bidang lain tidak termasuk dalam makna Pancasila. Tetapi di sini ada susunan arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hirarkis.

Maknanya bahwa manakala ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila. Dengan demikian makna kedilan Pancasila secara

universal tetap bersifat linier dengan nilai keadilan pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan, menurut Soerjano Suekanto "Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan".[100] Metode penelitian harus mampu memberikan gambaran rancangan penelitian, untuk memunculkan itu sekurang-kurangnya harus meliputi langkah yang harus ditempuh dengan prosedur yang benar, menentukan sumber data, memberikan gambaran bagaimana cara mendapatkan data yang diinginkan, dari data tersebut kemudian diolah dan dianalisa. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful*

[100] Soerjono Soekanto. 1976. *Pengantar Penelitian dibidang Hukum*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminlogi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 7.

action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial; (2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.

Menurut Patton, para peneliti konstruktivisme mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruksivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam

memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Kualitatif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.[101]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis dari sudut pandang sosiologi sebagai interpretasi atau penafsiran (*Interpretation Understanding*)[102] tentang "Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan." Dalam pendekatan sosiologis lebih kedalam mempelajari fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bisa melihat dari sudut pandang implementasi atau pelaksanaan undang-undang, sehingga penelitian ini mengunakan penelitian langsung

[101]Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya,* Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 63.

[102]Esmi Warassih. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis,* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), Halaman 23-24.

untuk mendapatkan data seakurat mungkin.[103] Data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari sumbernya langsung.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ilmiah tentunya mengunakan data yang akurat serta terbaru guna mendukung uji kebenaran dari hasil penelitian, bdari data inilah sebagai faktor penentu guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian, secara pengetahuan dalam penelitian hukum data terdiri dari data primer dan data sekunder, data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Terkait dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder, adalah data penelitian hukum yang diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan data-data tersebut diperoleh melalui perantara atau sumber lain seperti halnya buku, majalah, maupun jurnal, dari data sekunder tersebut tentunya telah diklompokan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Maksud dari bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari bahan hukum utama, dalam arti lain

[103]Muhammad Zainuddin, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paraadigma, dan susunan Pembentukan)*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019), hlm. 22.

bersumber dari peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, sampai dengan Perda Kabupaten/Kota. Terkait dengan penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
d) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
e) Permenkumham No 3 Tahun 2013 tentang Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

2) Bahan Hukum Sekunder

Seluruh penelitian pastinya mengunakan lierasi atau merujuk dari sebuah buku, begitupula dengan penelitian dibidang hukum sudah semestinya mengunakan buku-buku hukum dari para sarjana, para ahli, juga guru besar, secara makna bahan hukum sekunder adalah rujukan yang

bersumber dari karya tulis tentang hukum dan para ahli yang memiliki atau menguasai dibidang hukum.[104]

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar keilmuan hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[105] Selain buku bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan hukum baik berupa artikel maupun jurnal.[106] Terkait penelitian ini maka bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku tentang hukum, artiker dan juga jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data penelitian yang berasal dari bahan-bahan selain hukum dapat digunakan oleh seorang peneliti, mengingat seorang yang melakukan penelitian hukum juga diperkenankan mengambil data yang bukan dari bahan hukum, tentunya bahan non hukum tersebut sepanjang diangap masih relefan terhadap permasalahan yang dikaji serta mampu menjadi pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[107]

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan.

---

[104]*Ibid,* hlm. 38.

[105]Peter Muhammad Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Group, hlm. 182-183.

[106]*Ibid.*

[107]Muhammad Zainuddin, *Op.Cit*, hlm. 40.

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan.[108] Observasi yang dilakukan peneliti adalah dalam bentuk pengamatan dan pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan terlibat secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh

[108]L. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 125-126.

informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[109]

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tersetruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.[110]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.[111]

---

[109]*Ibid.*

[110]*Ibid.*

[111]H. Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 54.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri (penulis) yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument utama yaitu peneliti yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data[112]

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:[113]

a. Pengumpulan Data

Data dan informasi diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang

[112]Burhan Bungin. 2008. Data *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 64.

[113]Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 206.

didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informasi.[114]

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat di tarik kesimpulan secara tepat.[115]

c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil

[114]*Ibid*, hlm. 207.
[115]*Ibid*, hlm. 208.

penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri.[116]

d. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

8. Teknik Validasi Data

Upaya untuk memvalidkan data ialah dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran dan penafsiran data. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dan diluar dari itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:[117]

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

[116]*Ibid*, hlm. 211.
[117]L. Moleong. *Op.cit*, hlm. 168.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Kajian tentang Politik Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin ini adalah dengan penelitian hukum, karena kajian ini fokusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan mengkaji politik hukumnya kedepan.

G. Orisinalitas Penelitian

NO	PENELITI	TEMUAN PENELITIAN	KEBARUAN DARI PENELITI
1	Achmad Ruslan (2005) Disertasi Pascasarjana Unhas: Kendala dan Solusi Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana (Suatu Kajian Sosio - Yuridis).	Permasalahan bantuan hukum tahun 2005, yang didasarkan pada aspek sosial dan yuridis serta khusus masalah pidana. Belum dilaksanakan ketika kebijakan negara mendasarkan masalah bantuan hukum pada UU tentang Bantuan Hukum.	Permasalahan bantuan hukum yang didasarkan pada UU Tentang Bantuan Hukum, khusus dalam kaitan dengan bantuan hukum terhadap orang miskin. Dielaborasi dalam perspektif HAM.
2	Frans Hendrawinata. 2009. Disertasi Universitas Pajajaran Bandung. Judul: Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Mermperoleh Bantuan Hukum.	Perkembangan bantuan hukum di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin ternyata belum dilaksanakan secara maksimal.	Pembahasan didasarkan pada UU Bantuan Hukum Tahun 2011, aspek administrative dan pelaksanaannya dalam perspektif penegakan keadilan di Indonesia.
3	Heri Gunawan, 2016. Disertasi Universitas Pasundan. Judul: Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia	Sehubungan dengan kebijakan untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam pendampingan hukum pidana tidak maksimal dilaksanakan karena kendala birokrasi dan struktur masyarakat.	Perspektif keadilan sebagai orientasi filosofis, yang dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah atas dasar UU Bantuan Hukum sebagai produk legislatif. Tidak saja dalam lapangan pidana tetapi bantuan hukum dalam seluruh lapangan peradilan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan disusun dalam VI (enam Bab), selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar belakang Masalah yang menguraikan adanya problematika filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis, sehingga muncul isu hukum yang dikaji dan mengapa penting sebagai hasil dari penelitian untuk menjawab persoalan hukum tersebut. Dalam Bab ini juga diuraikan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Selain itu untuk memberikan kemurnian penelitian maka juga diuraikan terkait orisinalitas penelitian, juga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Bab I diakhiri dengan paparan tentang Sistematika Penelitian.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang merupakan dasar pijakan bagi peneliti untuk memaparkan dan berargumentasi serta menganalisis dari hasil temuan dilapangan yaitu Sejarah dan Pandangan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Indonesia, Pengertian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Indonesia, Asas-Asas Bantuan Hukum dan Masyarakat Miskin Indonesia.

Pada Bab III diuraikan tentang Pembahasan mengenai hasil penelitian tentang regulasi bantuan hukum masyarakat miskin Indonesia yang belum berkeadilan.

Pada Bab IV, diuraikan tentang pembahasan mengenai hasil penelitian tentang kelemahan-kelemahan regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin Indonesia saat ini.

Pada Bab V Pembahasan mengenai hasil penelitian tentang rekonstruksi regulasi bantuan hukum untuk masyarakat Indonesia saat ini.

Pada Bab VI, Penutup. disajikan simpulan dan saran serta rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam disertasi ini.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bantuan Hukum di Indonesia

Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap[118] bahwa bantuan hukum atau dikenal dalam Bahasa Inggris dengan *legal service* atau seringkali disebut sebagai pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan sebagai berikut: memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yanbg operasionalnya menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum khususnya jasa pelayanan hukum kepada rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dan tidak mempunyai akses sosial memadai untuk kehidupannya.

Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum dan terciptanya keadilan yang menjadi hak setiap subyek hukum di dalam memperjuangkan haknya. Hal ini demikian mendasar dalam kerangka untuk mencapai keadilan yang dihajatkan oleh setiap subyek hukum khususnya ketika berurusan dengan hukum.

Ahli yang lain, yaitu Kuffal[119], menyatakan bahwa: bantuan hukum adalah pelayanan hukum *(legal serevice)* yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upayanya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia

[118]Yahya Harahap. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakrta: Pradnya Paramita. hlm. 344.

[119]Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: Aswaja. hlm. 35.

ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Proses hukum demikian dilalui dengan rentang waktu panjang dan seringkali dengan biaya yang tidak sedikit. Pada kaitan ini, ditegaskan bahwasanya yang dibela dan diberi perlindugan hukum itu bukanlah kepada kesalahan tersangka/terdakwa. Penekanannya adalah bahwa pembelaan hukum ini menjadi demikiian mendasar karena termasuk di dalam hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk itu, tujuan utamanya menurut Kuffal adalah agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, ketika mereka menjalankan kewenangan dan tindakannya untuk menegakkan hukum.[120]

Menurut Adnan Buyung Nasution,[121] sebagaimana dinyatakan di dalam Buku Soerjono Soekanto, bahwa permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum ini, di samping berhubungan dengan hal-hal tentang pemberian bantuan hukum juga ada dimensi penting lainnya. Yaitu dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan tidak kepada masyarakat secara umum. Namun demikian ditekankan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bahwa konkretnya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum. Untuk inilah dibutuhkan pendampingan di dalam pelayanan hukum dimaksud.

---

[120]*Ibid.* hlm. 37.

[121]Soerjono Soekanto.1983. *Bantuan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press. hlm.14-17.

Tujuan dari hal ini, juga mengandung dimensi lebih luas yaitu berperan untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan yang lebih mendasar yaitu menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.[122]

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu kinerja yang dilaksanakan mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan di dalam pelaksanaan atau operasionalisasi hukum. Kesemuanya ini adalah di dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka menyadarai hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Pada sisi lain, dengan mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, sebagaimana dinyatakan oleh Santoso Poedjosoebroto, yang berpendapat bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan pada dimensi sosiologis sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya. Dengan demikian ia tidak dapat membayar biaya atau honorarium yang sejajarnya diterima atau menjadi hak dari seorang penasehat hukum atau pengacara.[123]

---

[122]*Ibid.* hlm. 19.
[123]Yahya Harahap. *Op.Cit*. hlm. 355.

Sehubungan dengan hal ini, Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, "bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia."[124]

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.[125]

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.[126] Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.[127]

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat dilakukan di dalam atau pun di luar pengadilan, dan bantuan hukum juga ditujukan bagi mereka yang tidak mampu. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

---

[124]Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 33.

[125]Lihat di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

[126]Lihat di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

[127]Lihat di dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan;
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.[128]

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut: Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.[129]

Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang

[128]Frans Hendra Winarta. 2000. *Op. Cit*. hlm. 23.

[129]Mochtar Kusumaatmadja. 1975. *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi.* Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 7.

dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan (*diposable income*), sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.[130]

Pada dimensi lain, sebagai perbandingan, beritkut ini dikutip beberapa rumusan tentang bantuan hukum antara lain rumusan dari *The International Legal Aid* yang menyatakan bahwa "*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profesion are made available to ensure that no one is deprived of right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack or financial resources"*.[131] Pemberian Bantuan Hukum adalah suatu rencana yang diterima dimana layanan profesi hukum disediakan untuk menjamin tak ada orang yang kehilangan hak menerima nasihat hukum atau dimana diperlukan perwakilan hukum di pengadilan atau tribunal, khususnya dengan alasan kekurangan sumber daya finansial.

Rumusan lain ditemukan di dalam *The Legal Aid Act* Inggris 1974 yang menyatakan bahwa *"It gives persons of moderate desposible income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and also legal aid and advice in non*

[130]*Ibid.*

[131]Lihat: *Black's Law Dictionary With Pronunciations*. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co. hlm. 477.

litigations matters".[132] (Hal ini memberi orang pengeluaran Penghasilan sedang dan bantuan modal dan prosedur hukum dan prosedur domestik sebelum peradilan dan juga bantuan dan nashat hukum dalam masalah-masalah non-perkara.

Sementara itu ada konsep lain pula sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Conception bahwa "*Legal aid the expression commonly used to refer to any form of legal services offrered or rendered. It many consit of information imparted or opining given on the rights, duties, and responsibilities of a party under the law which may be judicial, quasy judical, administrative or otherwise"*.[133] (Bantuan hukum adalah ungkapan yang biasa dipakai untuk mengacu pada setiap bentuk layanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ia bisa terdiri dari informasi yang ditawarkan atau pendapat berdasarkan hak, kewajiban dan tanggungjawab suatu pihak di bawah hukum yang bisa bersifat judisial, judisial kuasi, administratif atau sebaliknya.

Ada lagi rumusan tentang ini sebagaimana dikemukakan oleh Clerence/Dies yang menyatakan bahwa *Legal aid* adalah meliputi segala bentuk pemberian pelayanan oleh profesi hukum kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memberikan jaminan agar tidak seorangpun dalam masyarakat yang akan diperkosa haknya untuk memperoleh nasehat dan bantuan hukum yang diperlukannya atau kalau perlu juga untuk mendapatkan seorang kuasa yang akan membela

[132]Dikutip dari Mulya Lubis. 1990. *Bantuan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. hlm. 34.

[133]Mochtar Kusumaatmadja. *Op.Cit.* hlm.12.

kepentingannya di muka, pengadilan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.[134]

B. Konsep Bantuan Hukuum dalam Perspektif Islam

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah salah bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya Q.S. Al-An'am ayat 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup, Q.S Al-Hujurat ayat13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dan Q.S. Yunus ayat 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.[135]

Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya Huquq Al-Insan Fi Al Islam. Menurut Subhi Mahmasami, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan

[134]*Ibid.*

[135]Didi Kusnadi 2012. *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*. Bandung : Pustaka Setia. hlm 36

(al-musawat) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.[136]

Sesungguhnya, pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di kenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.[136]

Saat masa pra Islam, pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adi krodrati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa

[136]Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 36.

hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyeleseian persengketaan di kalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah, Darul al-'Adawah, mereka berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.[137]

Hal tersebut menjadi jalan kelanjutan bagi pemberian bantuan hukum khususnya, seiring dengan diakuinya agama Islam sebagai agama resmi di Arab. Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyeleseikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyeleseikan masalah sengketa di bidang pertanian. Pada prakteknya, Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, dan arbiter.[138]

Setelah dakwah Islam mulai tersebar, maka Rasulullah SAW memberi izin kepada sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat

[137]*Ibid*, hlm 36
[138]*Ibid*, hlm 36-37

Nabi Muhammad SAW berada.[139] Para sahabat dituntut oleh Nabi Muhammad SAW agar melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, seperti yang pernah dilakukan oleh Muaz ibnu Jabal. Demikian juga Abu Syuraih yang menjadi tahkim di antara para sahabat.[140] Episode selanjutnya, perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih daripada itu, Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat tempat penyeleseian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (Risalat Al-Qadha) yang ditujukan kepada seorang ,Abu Musa Al-Asy'ari.[141] Yang isinya mengandung pokok-pokok penyeleseian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama serta dihimpunlah daripadanya, pokok-pokok hukum.[142]

Perkembangan selanjutnya di penghujung Al-Khulafaurrasyidin pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambahnya praktek pemberian bantuan hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu

[139]Muhammad Salam Madkur, 1979. *Peradilan dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, hlm 25.

[140]Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Op Cit.* hlm 37.

[141]*Ibid* hlm 153.

[142]Muhammad Salam Madkur, *Op. Cit*, hlm 35.

itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman ibnu Affan kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.[143143] Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi bantuan hukum onjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (qodhi) mulai berkurang untuk berijtihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan.[144] Jika diperhatikan dari napak tilas perkembangan pemberian bantuan hukum dalam Islam, tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat pada zamannya. Kehidupan yang disertai dengan permasalahan dan sengketa yang terjadi antara satu dengan yang lainnya.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya

[143]Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Op Cit*. Hlm 38
[144]*Ibid*

mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapakan materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.[145]

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi alkhusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *Al Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.[146]

Alwakalah masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muammalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun al-wakalah fi al-khusumah (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. **Pertama**, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), **kedua**, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan **ketiga**, konsep tentang

[145]Asadullah Al-Faruq, 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : PT Pustaka Yudistia. hlm 3

[146]Sayyid Sabiq, 1987. *Fikih sunnah 13* (terjemahan), Bandung : Alma'arif, hlm 55.

penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.[147]

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh *Al-Maududi* dalam *Human Right in* Islam bahwa, secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (*all human beings are born and equal in dignity and right*).[148]

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyeleseikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu.

[147]Dii Kusnadi. *Op. Cit*. hlm 29
[148] *Ibid* hlm 38

Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.[149]

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyeleseian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :

1. Hak untuk membela diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal

[149] *Ibid* hlm 29-30

(perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*

5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana subtansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.[150]

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya.
2. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
3. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa.orang yang melakukan

[150]Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm 61-64.

bantuan hukum, dalam Islam dikenal dengan *Al Mahami*.[151] Istilah bantuan hukum dekat maknanya dengan konsep *al-mahami* yang bisa diartikan sebagai pengacara, tetapi juga dekat artinya dengan penegak hukum.[152]

Menurut Adnan Buyung Nasution[153], bahwa permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum ini, di samping berhubungan dengan hal-hal tentang pemberian bantuan hukum juga ada dimensi penting lainnya, yaitu dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan tidak kepada masyarakat secara umum. Namun demikian ditekankan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bahwa konkretnya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum. Untuk inilah dibutuhkan pendampingan di dalam pelayanan hukum dimaksud. Tujuan dari hal ini, juga mengandung dimensi lebih luas yaitu berperan untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas luasnya dengan tujuan yang lebih mendasar yaitu menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.[154]

---

[151] *Ibid*, hlm 61-62.
[152] Didi Kusnadi. *Op. Cit*. hlm 49
[153] Soerjono Soekanto.1983. *Bantuan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press. hlm.14-17
[154] *Ibid.* hlm. 19

Yahya Harahap berpendapat[155] bahwa bantuan hukum atau dikenal dalam Bahasa Inggris dengan *legal service* atau seringkali disebut sebagai pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan sebagai berikut : memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum khususnya jasa pelayanan hukum kepada rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dan tidak mempunyai akses sosial memadai untuk kehidupannya.

Sedangkan Kuffal[156], menyatakan bahwa: bantuan hukum adalah pelayanan hukum *(legal serevice)* yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upayanya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Proses hukum demikian dilalui dengan rentang waktu panjang dan seringkali dengan biaya yang tidak sedikit. Pada kaitan ini, ditegaskan bahwasanya yang dibela dan diberi perlindugan hukum itu bukanlah kepada kesalahan tersangka/terdakwa. Penekanannya adalah bahwa pembelaan hukum ini menjadi demikian mendasar karena termasuk di dalam hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk itu, tujuan utamanya menurut Kuffal adalah agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak

[155]Yahya Harahap. 2006. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakrta: Pradnya Paramita.
[156]Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: Aswaja.

hukum, ketika mereka menjalankan kewenangan dan tindakannya untuk menegakkan hukum.[157]

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, "bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia."[158]

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, didefinisikan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
2. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan;
3. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
4. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.[159]

[157]*Ibid.* hlm.37

[158]Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 33

[159]Frans Hendra Winarta, 2000, *Op. Cit*. hlm. 23.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut : Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.[160]

Sebagai perbandingan pada dimensi lain, berikut ini dikutip beberapa rumusan tentang bantuan hukum antara lain rumusan dari *The International Legal Aid* yang menyatakan bahwa "*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack or financial resources"*.[161] (Pemberian Bantuan Hukum adalah suatu rencana yang diterima dimana layanan profesi hukum disediakan untuk menjamin tak ada orang yang kehilangan hak menerima nasihat hukum atau dimana diperlukan perwakilan hukum di pengadilan atau tribunal, khususnya dengan alasan kekurangan sumber daya finansial).

[160]Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. hlm. 7

[161]*Blac's Law Dictionary With Pronunciations*. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co. hlm. 477.

Rumusan lain ditemukan di dalam The Legal Aid Act Inggris 1974 yang menyatakan bahwa *"It gives persons of moderate desposible income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and also legal aid and advice in non litigations matters"*.[162] (Hal ini memberi orang pengeluaran Penghasilan sedang dan bantuan modal dan prosedur hukum dan prosedur domestik sebelum peradilan dan juga bantuan dan nasehat hukum dalam masalah-masalah non-litigasi).

Ada konsep lainnya juga sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Conception bahwa "*Legal aid the expression commonly used to refer to any form of legal services offrered or rendered. It many consit of information imparted or opining given on the rights, duties, and responsibilities of a party under the law which may be judicial, quasy judical, administrative or otherwise"*.[163] (Bantuan hukum adalah ungkapan yang biasa dipakai untuk mengacu pada setiap bentuk layanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ia bisa terdiri dari informasi yang ditawarkan atau pendapat berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggungjawab suatu pihak di bawah hukum yang bisa bersifat judisial, judisial kuasi, administratif atau sebaliknya).

Ada lagi rumusan tentang ini sebagaimana dikemukakan oleh Clerence/Dies yang menyatakan bahwa Legal aid adalah meliputi segala bentuk pemberian pelayanan oleh profesi hukum kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memberikan jaminan agar tidak

[162]Dikutip dari Mulya Lubis. *Bantuan Hukum di Indonesia.* (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1990) hlm. 34.

[163]Mochtar Kusumaatmadja. *Op.Cit.* hlm.12.

seorangpun dalam masyarakat yang akan diperkosa haknya untuk. memperoleh nasehat dan bantuan hukum yang diperlukannya atau kalau perlu juga untuk mendapatkan seorang kuasa yang akan membela kepentingannya di muka, pengadilan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.[164]

C. Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Bantuan Hukum

Secara umum ruang lingkup bantuan hukum setelah kelahiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), meliputi :

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa di pengadilan;
3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.[165]

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus mengenai ruang lingkup bantuan hukum, yaitu:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang

[164]*Ibid.*

[165]Febri Handayani, *Bantuan Hukumdi Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) hlm 18

menghadapi masalah hukum;

2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun melihat konsepsi bantuan hukum yang di introduksi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, seperti yang dihadapi dalam proses peradilan, namun ada juga suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri;
2. Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus

dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;

3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
4. Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara kontinyu;
5. Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan dengan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
6. Menjadi kuasa warga masyarakat didalam atau diluar pengadilan.[166]



BAB III

REGULASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Pengaturan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu dalam Hukum Positif Indonesia

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum, yaitu: kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar Advokat.[166]

Bantuan hukum merupakan manifestasi persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Rights*. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.[167]

[166]Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[167]Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasejat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 54.

Pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disingkat UU Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disingkat UU Bantuan Hukum telah memberikan ruang bagi advokat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. UU Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.[168] Sedangkan UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[169]

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).[170]

Kenyataannya seringkali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan hukum yang memadai dari advokat atau penasihat hukum. Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat, padahal orang yang tergolong mampu dengan akses

[168]Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[169]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[170]Freke F. Kambey, Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 34.

ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan hukum dari advokat atau penasihat hukum yang profesional. Bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum dan pembelaan hukum bagi semua orang dalam kerangka *justice for all* (keadilan untuk semua orang).[171]

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi menyelesaikan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, sehingga banyak pihak yang enggan untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomis yang diperolehnya. Apa yang diperoleh dari sisi ekonomi dengan menolong orang miskin. Inilah

[171]*Ibid*. hlm. 57.

problema yang dihadapi oleh kaum miskin untuk mendapatkan *access to justice*. Advokat meski memiliki asas *pro bono publico*, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari officium nobile ke komersialisasi.

Pada dasarnya hak konstitusional warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD 1945 yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi maupun hukum. Pertama, hak kesamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidakada kecualinya. Kedua, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*) dan hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice rights*).[172]

[172]Raymon, Peran Bantuan Hukum Sebagai Pranata Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Lihat http://institutpenelitianhukum.blogspot.co.id/2011/01/peran-bantuan-hukum-sebagaipranata.html, diakses 06/03/2022

Ketiga, hak perlindungan diri pribadi dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.[173] Keempat, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat. Implikasi bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.[174]

Konstitusi Indonesia menjamin fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan tersebut tidak hanya terbatas tanggung jawab ekonomi, namun juga jaminan sosial dan pemenuhan hak atas bantuan hukum fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai warga negara Indonesia. Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu *legal Aid* dan *legal Assistance*. Istilah *legal aid* digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum

[173]M. Akil Mochtar. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, Makalah disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta, 30 Maret 2009, hlm. 5

[174]Frans H. Winarta, Dasar Konstitusional Bantuan Hukum. Lihat http://jodisantoso.blogspot.co.id/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html, diakses tanggal 06/03/2022

kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sementara legal assistence digunakan untuk pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.[175]

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut pencerminan asas *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Right*. Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan dasar normatif perlindungan atas hak memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi, kemudian dipertajam dengan Pasal 13 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengenai syarat pemberian bantuan hukum, yaitu harus berorientasi kepada keadilan dan ketidakmampuan membayar Advokat,[176] *Basic Principles on the Role of Lawyers* terdapat dalam UUD 1945. 15 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak kesamaan di hadapan hukum ialah hak konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti tiap

[175]Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press, hlm. 17-18.

[176]Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, 2013. *Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media, hlm. 728.

warga negara harus diakui sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum. Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal itu hanya dapat terwujud jika terdapat ruang, kesempatan, dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka bantuan hukum mutlak diperlukan. Tanpa adanya bantuan hukum maka hak konstitusional warga negara tidak akan terpenuhi. Bahkan, keadilan yang menjadi tujuan hukum tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. Pada saat keadilan tidak dapat ditegakkan, maka pada saat itu pula tidak terpenuhi dan terlindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.[177]

Pemenuhan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum serta hak atas keadilan melalui bantuan hukum adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab menyediakan advokat atau penasihat hukum untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun.[178]

Di dalam UU Advokat, bantuan hukum dikonsepsikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana UU Advokat dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 83

[177]M. Akil Mochtar. Bantuan Hukum Sebagai Hak ….. Op. Cit., hlm. 6-7.
[178]*Ibid*, hlm. 7

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Pelaksana UU Advokat tersebut mendefinisikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.[179]

Advokat terikat dengan panggilan profesi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama kepada kalangan masyarakat yang tergolong msikin dan tidak mampu.[180] Pasal 22 Ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.[181] Pada praktiknya, fungsi dan peran advokat dalam penegakan hukum lebih dekat dengan masyarakat yang yang membutuhkan dan mendambakan keadilan. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) pada pokoknya menjelaskan kewajiban pemberian bantuan hukum.[182]

Negara berupaya mengatasi masalah mengenai peran advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana UU Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010

[179]Ade Irawan Taufik, Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 1, April 2013, hlm. 54.

[180]Erry Meta, Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lihat https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-umum/kedudukan-pemberibantuan-hukum-dalam-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat/, diakses tanggal 06/03/2022

[181]Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[182]*Ibid*

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Upaya ini merupakan suatu injeksi sesaat dan diperkirakan hanya mampu mengatasi model bantuan hukum secara individual dan konvensional, sehingga realisasi bantuan hukum dengan model kesejahteraan diprediksi berjalan kurang lancar.[183]

Secara ideal bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara probono (cuma-cuma). Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban, akan tetapi harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial berkaitan dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. UU Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi, sehingga dapat diberlakukan sanksi.[184]

Pada bagian lain, UU Bantuan Hukum memberikan konsep baru mengenai bantuan hukum. Pemberlakuan bantuan hukum bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin mendapatkan akses keadilan untuk mewujudkan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah

[183]*Ibid*, hlm. 60.
[184]Erry Meta. *Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum* ….. Loc. Cit.

Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.[185]

Di dalam UU Bantuan Hukum didefinisikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[186] Selanjutnya, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.[187] Sementara pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.[188] Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah.[189] Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

[185]Ade Irawan Taufik, Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab ….. Op. Cit., hlm. 57.

[186]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[187]Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[188]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[189]Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Mencermati konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, maka sesungguhnya bantuan hukum bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa yang dihadapi dalam proses peradilan, akan tetapi suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.[190]

Di dalam UU Bantuan Hukum terdapat peran negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Peran negara untuk ikut campur diperlukan dalam model kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat. Bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga ruang lingkup model kesejahteraan ini lebih luas. Hal ini disebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.[191] Dengan diberlakukannya UU Bantuan Hukum, maka negara telah ikut campur dengan program-program yang bukan hanya penyelesaian masalah hukum, namun juga program pemberdayaan masyarakat.[192]

Dengan diberlakukannya UU Bantuan Hukum bukan berarti kewajiban advokat memberikan bantuan hukum terhapuskan. UU Bantuan Hukum menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh

---

[190]*Ibid*

[191]Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11-13.

[192]Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab* ….. Op. Cit., hlm. 58.

pemberi bantuan hukum ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan UU Advokat.[193] Pemberlakukan UU Bantuan Hukum menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU Advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.[194]

Secara substansial terdapat persamaan dan perbedaan dalam Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Persamaan bantuan hukum bagi orang miskin menurut Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum, diantaranya dalam hal bantuan hukum cuma-cuma, ruang lingkup bantuan hukum, dan perlindungan hukum terhadap pemberi bantuan hukum.

Pertama, bantuan hukum cuma-cuma. Apabila dicermati pengaturan mengenai bantuan hukum cuma-cuma, maka kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Di dalam Pasal 1 ayat (9) UU Advokat termaktub ketentuan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.[195] Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Bantuan Hukum termaktub ketentuan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima

[193]Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[194]*Ibid*., hlm. 60-61.

[195]Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

bantuan hukum.[196] Kesamaan pengaturan kedua undang-undang tersebut menunjukkan kehendak pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Kedua, ruang lingkup bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai ruang lingkup bantuan hukum, maka kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai ruang lingkup bantuan hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Advokat termaktub ketentuan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.[197] Sedangkan di dalam Pasal 4 ayat (2) UU Bantuan Hukum termaktub ketentuan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.[198] Kesamaan pengaturan kedua undang-undang tersebut menunjukkan ruang lingkup bantuan hukum advokat atau penasehat hukum baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

Ketiga, perlindungan hukum terhadap pemberi bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi bantuan hukum, maka kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi bantuan hukum. Di dalam Pasal 16 UU Advokat termaktub ketentuan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana

[196]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[197]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[198]Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.[199] Sedangkan di dalam Pasal 11 UU Bantuan Hukum termaktub ketentuan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.[200] Kesamaan pengaturan kedua undang-undang tersebut menunjukkan terdapat perlindungan hukum bagi advokat atau penasehat hukum selaku pemberi bantuan hukum dalam menjalan tugasnya baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

Pada bagian lain, perbedaan bantuan hukum bagi orang miskin menurut UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, diantaranya dalam hal penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan syarat pemberi bantuan hukum.

Pertama, penerima bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai penerima bantuan hukum, maka kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai penerima bantuan hukum. Di dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat termaktub ketentuan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.[201] Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UU Bantuan Hukum termaktub ketentuan bahwa

[199]Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[200]Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
[201]Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penerima Bantuan Hukum ialah orang atau kelompok orang miskin.[202] Perbedaan pengaturan kedua undang-undang tersebut tampak dalam aspek penerima bantuan hukum.

Penjelasan detail mengenai penerima bantuan hukum dipaparkan dalam Peraturan Pelaksana UU Advokat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan bantuan hukum cumacuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Menurut Frans Hendra Winarta, Peraturan Pemerintah tersebut mestinya tidak melupakan esensi dasar pemberian bantuan hukum cuma-cuma, yaitu orang miskin atau kaum dhuafa. Istilah pencari keadilan yang tidak mampu masuk kategori perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum probono harus tepat sasaran untuk memastikan

[202]Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

seseorang tidak mampu sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.[203]

Berbeda dengan UU Bantuan Hukum. penjelasan detail mengenai penerima bantuan hukum dipaparkan dalam Pasal 13, 14 ayat (1) dan (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 13 UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum wajib:

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.[204]

Pasal 14 ayat (1) UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun

[203]Frans Hendra Winarta, Mekanisme Penentuan Penerima Bantuan Hukum Probono Harus Jelas. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20965/mekanismepenentuan-penerima-bantuan-hukum-probono-harus-jelas, diakses tanggal 06/03/2022

[204]Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.[205] Penjelasan detail mengenai penerima bantuan hukum dipaparkan dalam Peraturan Pelaksana UU Bantuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan tidak mampu.

Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasPemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.[206]

Selanjutnya, Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.[207]

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU Advokat dan Peraturan Pelaksananya menjelaskan penerima bantuan

[205]Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[206]Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

[207]Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

hukum harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum. Sedangkan UU bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksananya menjelaskan penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Kedua, pemberi bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum, maka kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat termaktub ketentuan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.[208] Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.[209]

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU Advokat menegaskan seorang yang berprofesi advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun, UU Advokat memberikan batasan mengenai advokat yang harus memberikan bantuan hukum. Sedangkan UU Bantuan Hukum menegaskan pemberian bantuan hukum tidak bersifat perorangan, melainkan bersifat lembaga dan organisasi kemasyarakatan

[208]Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[209]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

yang berbadan hukum. Memang tidak semua lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam aturan ini bisa menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan memenuhi persyaratan saja yang bisa mengelola pemberian bantuan hukum kepada orang miskin.

UU Advokat menitikberatkan mengenai kewajiban seorang Advokat sebagai *officium nobille*. UU Advokat menegaskan bahwa tanpa bernaung dalam lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, seorang advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (miskin). Berbeda dengan ketentuan tersebut, UU Bantuan Hukum mengatur aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui Kemenkumham, akan tetapi dalam hal teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang atau peraturan-peraturan di bawahnya.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa UU Bantuan Hukum memiliki cakupan yang lebih luas bagi pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum. UU Bantuan Hukum memberikan ruang dan kesempatan kepada advokat, lembaga bantuan hukum, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang berasal dari orang miskin.

Ketiga, syarat pemberi bantuan hukum. Apabila dicermati pengaturan mengenai syarat pemberi bantuan hukum, maka kedua

undang-undang tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai syarat pemberi bantuan hukum. Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.[210] Pasal 2 ayat (2) UU Advokat menyatakan bahwa Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.[211] Pasal 2 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.[212]

Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat, magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.[213] Kemudian Pasal 2 ayat (2)

[210]Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[211]Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[212]Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[213]Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

UU Advokat menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[214]

Pengaturan syarat pemberi bantuan hukum dalam UU Advokat berbeda dengan syarat pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Bantuan Hukum termaktub ketentuan bahwa Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.[215] Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Memiliki kantor atau secretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.[216]

Pasal 9 UU Bantuan Hukum menyatakan bahwa Pemberi bantuan Hukum berhak:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

[214]Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[215]Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[216]Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

2. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan seterusnya;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.[217]

Pengaturan nengenai syarat pemberi bantuan hukum yang termaktub dalam UU Bantuan Hukum tersebut lebih luas dan tidak terbatas kepada profesi adsvokat semata. Dengan UU Bantuan Hukum mereposisi peran dosen dalam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi untuk dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuannya. Dosen yang berkiprah dalam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi memiliki peran penting bagi warga negara yang mencari keadilan. Keberadaan lembaga bantuan hukum

[217]Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

perguruan tinggi dimaknai sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.[218]

Pemberlakuan UU Bantuan Hukum tersebut seolah menegaskan pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada advokat, akan tetapi pemberi bantuan hukum juga bisa dilakukan oleh dosen dan paralegal yang bernaung dalam lembaga bantuan hukum baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dosen dan paralegal diberikan peluang untuk mendampingi dan menyelesaikan perkara hukum masyarakat tidak mampu. Posisi lembaga bantuan hukum perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta tersebut menjadi cukup jelas dalam undang-undang ini. Namun, persoalan yang sering diperdebatkan ialah mengenai kebolehan dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menangani perkara di pengadilan karena terdapat aturan yang melarang pegawai negeri sipil menjadi advokat.[219]

Bagaimanapun, pemberlakuan UU Bantuan Hukum perlu diapresiasi karena orang miskin yang memerlukan bantuan hukum bisa mendapatkan pembelaan hukum dari berbagai pihak, seperti advokat, lembaga bantuan hukum, dan oraganisasi kemasyarakatan. Dengan pemberlakuan UU Bantuan Hukum pula negara melalui Kemenkumham berkonstribusi membantu orang miskin untuk mendapat bantuan hukum.

---

[218]Fachrizal Afandi. *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Acces to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum*, Jurnal Rechts Vindingj, Vol. 2, No. 1, April 2013, hlm. 32-33.

[219]*Ibid*

B. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum

Konflik atau sengketa yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat bersumber dari adanya permasalahan yang disebabkan perbedaan antara *das Sollen* (yang diinginkan) dan *das Sein* (yang terjadi). Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sangat mendambakan kedamaian yang pasti dapat terwujud apabila tidak terjadi pertentangan kepentingan antar masyarakat, baik antar individu satu dengan yang lain maupun antar kelompok satu dengan yang lain. Demi terhindar dari gesekan-gesekan pertentangan dan demi mewujudkan kedamaian tersebut, masyarakat membutuhkan suatu kaidah atau norma yang harus ditaati pula oleh mereka.

Norma hukum sebagai salah satu norma yang ada di dalam masyarakat yang berperan untuk mengatur segala tingkah laku manusia disertai dengan ancaman sanksi apabila norma ini dilanggar, dibentuk tidak dengan tanpa tujuan. Selain untuk mengatur tingkah laku manusia, norma hukum ini bertujuan menciptakan suasana aman, damai dan adil. Tidak dapat dibayangkan apabila pada suatu masyarakat tidak terdapat norma hukum, maka dapat dipastikan tidak akan terjamin kemanan, kedamaian dan keadilan pada masyarakat tersebut.

Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional bagi setiap orang atau warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Mereka yang tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undangundang karena sebagian besar dari mereka terpaku dengan anggapan bahwa ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya besar yang mungkin untuk makan saja mereka masih kesulitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sangat minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka ketika menghadapi kasus hukum. Terlebih lagi, maraknya stigma mahalnya biaya untuk membayar jasa advokat atau pengacara.

Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya. Namun pada kenyataannya hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.[220]

Dalam sistem peradilan di Indonesia, tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang justru jauh dari dari harapan masyarakat. Ia hanya mengacu pada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang

[220]Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, hlm. 177.

seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan berubah menjadi medan perang untuk mencari kemenangan (*to win the case*).[221] Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan bersifat *win lose solution*.

Konsep *access to justice* terhadap keadilan tidak semata terbatas pada akses terhadap advokat ataupun akses terhadap pengadilan, tetapi juga akses terhadap Ombudsman dan lembaga-lembaga "keadilan yang lain". Konsep access to justice yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagiseluruh kalangan warga negara baik individu maupun kelompok.[222]

Di dalam konsep *access to justice* ini pula, keadilan diartikan sebagai sebuah keadaan dan proses di mana negara menjamin akan terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga negaranya yakni hak dasar berdasarkan UUD 1956 serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal yang didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif agar diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

---

[221]Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54.

[222]Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), *Access To Justice*: Book I, Supra Note 1, pp.1-7.

Ketidakpahaman kaum masyarakat tersebut dapat dikatakan melahirkan suatu ketidakadilan sebab negara sendirilah yang menjamin adanya persamaan di muka hukum. Untuk menghapus ketidakadilan yang menodai asas persamaan di muka hukum maka peranan lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan bahkan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sini juga menjadikan lembaga bantuan hukum sebagai suatu *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu bahkan bagi masyarakat yang buta hukum.

Rawls di dalam *A Theory of Justice* memberikan suatu konsep keadilan sosial, dimana keadilan sosial dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur dasar masyarakat dinilai.[223] Sebuah konsepsi Rawls ini menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta cara menetapkan pendistribusian yang sesuai dengan berbagai nikmat dan beban dari kerjasama sosial. Lebih lanjut, Rawls memberikan konsepsi bahwa seluruh kenikmatan primer berupa kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan serta dasar-dasar kehormatan diri, haruslah dibagikan secara sama.

Unsur-unsur pokok keadilan sosial menurut Rawls mencakup :

1. Prinsip pokok keadilan sosial adalah *equality* atau kesamaan; yaitu:
2. Kesamaan dalam distribusi; atas

[223]Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice (Teori Keadilan),* Cetakan Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 9.

3. Nikmat-nikmat primer (*primary goods*); namun
4. Ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak.

Oleh sebab itulah, terbukti bahwa konsepsi teori keadilan Rawls pada intinya meliputi aspek kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Dengan didasarkan pada konsepsi keadilan sosial Rawls ini dapat mengakibatkan apabila terjadi suatu ketidaksamaan dapat saja ditoleransi apabila dapat menguntungkan semua pihak terutama golongan tertinggal.

Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya adalah:

1. Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusiinstitusi betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan.
2. Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak.
3. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum.

4. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat.[224] Kehadiran hukum di dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.[225]

Pada hakikatnya, hukum merupakan norma, dan tiap-tiap norma pasti mengandung nilai yang tidak lain sebenarnya merupakan moral atau dalam lingkup yang lebih luas, moralitas.[226] Lebih lanjut, aturan-aturan dari suatu sistem hukum harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan substantif dari moralitas atau patokan baku lainnya. Aturan-aturan hukum harus tunduk pada moralitas.[227]

Adnan Buyung Nasution memberikan pengertian bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan

[224]Muhammad Erwin. 2012. *Filasafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Cetakan Ke-II*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 132.

[225]Satjipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-VII, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

[226]Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 76-77.

[227]Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 52.

pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum. Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebut Hak Asasi Manusia rakyat miskin yang telah cukup lama ditawan orang-orang kaya, meski harus disadari bahwa bantuan hukum saja tidak cukup.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin meragukan kapasitas dan kapabilitas para penegak hukum dan lembaga peradilan di Indonesia, khususnya bagi kaum miskin. Maraknya perkara-perkara besar yang mencuat di muka umum, yang melibatkan petinggi-petinggi negara dan orang-orang penting dalam proses berperkaranya di tengah jalan seolah lenyap ditelan bumi. Terlebih lagi, etika para penegak hukum yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang penegak hukum. Banyak ditemukan para penegak hukum yang rela mempertaruhkan tugas mulianya dengan nominal sejumlah uang. Hal-hal semacam inilah yang tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan munculnya pesimisme masyarakat terhadap keadilan di negeri ini karena para penegak hukum yang tidak beretika.

Aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang. Teori ini sebenarnya mendapatkan banyak kritik dari para ahli hukum,

diantaranya adalah oleh Nonet dan Selznick yang berpendapat bahwa kritik terhadap hukum selalu mengarah pada ketidakmampuannya sebagai alat untuk mengatur perubahan dan untuk mengusahakan tercapainya keadilan.[228]

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum, mengakui serta melindungi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Persamaan bagi warga negara di hadapan hukum ini harus disertai dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).[229] Oleh sebab itu, kita perlu merombak struktur yang jelas tidak adil dan menggantikannya dengan pola hubungan yang lebih adil.[230]

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan keadilan. Akses terhadap suatu keadilan merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari prinsip negara hukum dan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia diharapkan dapat menjadi suatu kesatuan yang bertujuan

[228]R.B. Soemanto. 2008. *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*. Solo: UNS Press, hlm. 145-146.

[229]Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid. 2010. *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta, hlm. 107.

[230]Abdul Khakim dan Mulyana W. 1981. *Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum (Ke arah Bantuan Hukum Struktural)*. Bandung: Alumni, hlm. 13.

untuk mewujudkan Indonesia yang adil sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep *access to justice* sendiri memiliki dasar yang harus dapat diakses oleh semua kalangan dan harus menghasilkan suatu ketentuan yang adil bagi semua kalangan. Konsep *access to justice* mengutamakan gagasan pokok demi tercapainya suatu keadilan (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan[231] tanpa terkecuali. Pengecualian ini dimaksudkan bahwa *access to justice* tidak memandang perbedaan latar belakang, baik ras, agama, keturunan, pendidikan warga negara Indonesia dalam hal warga negara Indonesia mencari letak keadilan melalui lembaga peradilan. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan/atau kemampuan yang sama di dalam mendapatkan *access to justice*. Meskipun pada akhirnya arti dari kata adil terkadang sulit diaplikasikan pada kehidupan nyata. Konsep *access to justice* juga berfokus pada tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu dimana:

1. Sistem hukum haruslah dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara Indonesia tanpa terkecuali;
2. Sistem hukum haruslah dapat menghasilkan suatu ketentuan maupun keputusan yang dapat dirasakan adil bagi seluruh kalangan warga negara Indonesia (baik secara individual maupun kelompok).

Secara terminologis, konsep *access to justice* memiliki sebuah tujuan keadilan sosial (*social justice*) serta dapat mencegah dan

[231]Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa. 2009. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1, Jakarta: Bappenas, hlm. 1.

menanggulangi kemiskinan sesungguhnya merupakan upaya adanya *afirmatif action*[232] terhadap kelompok-kelompok rentan, terutama kaum miskin atau kaum yang tidak mampu. Berbagai upaya dilakukan agar dapat tercapainya suatu jaminan terhadap keadilan, salah satunya yaitu dengan cara pemulihan hukum (*legal remedies*) serta pemulihan peradilan (*justice remedies*). Jaminan terhadap suatu *access to justice* di Indonesia terkandung dalam pasal-pasal terkait hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara garis besar pada umumnya permasalahan hukum yang banyak dialami oleh kaum atau golongan tidak mampu adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka di berbagai bidang. Setidaknya ada empat permasalahan pokok akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang salah satunya yaitu berkembangnya pandangan yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang tidak *justiciable* (tidak bisa dituntut secara hukum di pengadilan). Secara instrumentalis jaminan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga

[232]Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan. 2009. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. (Jakarta: BAPPENAS Direktorat Hukum dan HAM*, hlm. 5-6.

mempunyai kelemahan mendasar yang menganggap bahwa hak tersebut pemenuhannya dilakukan secara bertahap (*progresif realisation*).[233]

Berangkat dari makin tertindasnya kaum atau golongan tidak mampu terutama dalam mencari keadilan di bidang hukum, peranan lembaga pelayanan hukum sangat dibutuhkan serta adanya lembaga-lembaga hukum yang melangsungkan pelatihan dan pendidikan hukum bagi kaum atau golongan tidak mampu. Para pengacara di negeri berkembang harus disadarkan bahwa mereka mengemban fungsi yang berjangkauan lebih jauh dari sekedar fungsi sebagai penasihat dan pembela dalam sistem hukum yang sudah mapan, yakni mereka harus mengembangkan budaya hukum.[234]

Bantuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil

[233]Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani, ed. 2008. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi. Jakarta: Komnas HAM, hlm. 102-103.

[234]Buyung Adnan. 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hlm. 107-108.

dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum tidak sematamata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan terhadap mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.

Berdasarkan Pasal 56 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang tersangka dan terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah:

1. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.
2. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.

3. Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong orang yang tidak mampu.

Pengertian mengenai orang-orang yang tergolong tidak mampu ini di atur dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-UM.06. 02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan.

Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan atau orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai pembela perkaranya di Pengadilan. Keadaan kurang mampu ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penilaian yang obyektif atau berdasarkan keterangan Kepala Desa/Lurah.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah pemohon bantuan hukum yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah regional atau program jaring pengaman sosial lainnya yang memerlukan

bantuan untuk menangani dan menyelesikan masalah hukum di pengadilan.

Sehingga pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.[235] Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan

[235]Bambang Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, hlm. 13.

mekanisme penyelesaian di luar eprsidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.

Bantuan hukum litigasi atau bantuan hukum dengan jalur persidangan sebenarnya diharapkan menjadi sebuah upaya the last resort atau ultimum remidium yakni upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Pada perkara pidana, bantuan hukum litigasi ini diberikan ketika ancaman pidana terdakwa lebih dari 5 tahun penjara. Ini merupakan bentuk jaminan pemberian hak-hak bagi terdakwa yang telah diakomodir oleh undang-undang dan bahkan pada tingkat penyidikan pun telah diberikan hak untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian hak ini diakomodir oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1).

Di dalam praktek, terkadang seorang terdakwa sejak masih berstatus sebagai tersangka ketika diinformasikan akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, ia telah menolak sejak awal. Barulah ketika masuk di dalam proses persidangan dan ternyata ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum, terdakwa tersebut ini menerima untuk didampingi penasihat hukum. Ini bersifat penunjukkan dari pihak pengadilan terhadap penasihat hukum si terdakwa. biasanya penasihat hukum yang

ditunjuk adalah penasihat hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pihak pengadilan dengan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Atau dapat saja, ketika ada satu atau beberapa orang lembaga bantuan hukum yang sedang bertugas piket, yang sedang bertugas piket inilah yang langsung ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan negeri bagi Advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Dasar hukum mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diatur di Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Peradilan Umum, yaitu Pasal 68C yang berbunyi: ”pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh

kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan".

Selain itu juga diatur secara khusus di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, di BAB III Tentang Pos Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

Mengenai Prosedur Penyelenggraan Pos Bantuan Hukum di atur di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A yaitu:

1. Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yangpembentukannya dilakukan secara bertahap.
2. Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
3. Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Piket yang pengaturannya dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Pengaturan dan daftar piket disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

5. Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat Piket dapat dilakukan Pengadilan dengan:
   a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
   b. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
   c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
6. Advokat yang disediakan oleh lembagalembaga tersebut adalah orang yang berprofesi Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.
7. Ketua Pengadilan Negri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain advokat dari lembaga-lembaga di point lima.
8. Penyedia Layanan lain ini dapat terdiri dari Dosen, Asisten Dosen, atau Mahasiswa yang mendapat Rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.
9. Advokat Piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa:
   a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
   b. Bantuan pembuatan dokumen hukum
   c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
   d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku.

e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi, khususnya pada perkara pidana bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum hanya mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan. Sedangkan pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi pada perkara perdata, lebih bersifat mewakili dan/atau mendampingi. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum dapat mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak wajib hadir pada setiap agenda persidangan.

Pemberian bantuan hukum litigasi khususnya dalam perkara perdata inilah yang dapat mematahkan anggapan masyarakat bahwa memiliki perkara perdata pada tingkat pengadilan itu rumit, karena sesuai hukum acara yang berlaku para pihak yang berperkara harus membuat berkas (pada agenda jawab jinawab) walaupun dapat saja disampaikan secara lisan. Namun, ketika masyarakat telah menguasakan perkaranya pada lembaga bantuan hukum, seluruh berkas akan dibuat oleh lembaga bantuan hukum yang bertindak sebagai kuasa hukumnya. Meskipun tetap tidak dapat dipungkiri, berperkara melalui jalur litigasi memang membutuhkan waktu yang panjang karena dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku, menguras tenaga dan juga pikiran.

Prosedur atau mekanisme permohonan bantuan hukum ini pun sangat mudah, yaitu hanya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dapat diurus sendiri oleh masyarakat yang tidak mampu dari tingkat RT, RW hingga tingkat kecamatan. Surat keterangan tidak mampu ini sebagai bukti nyata bahwa yang bersangkutan memang benar termasuk masyarakat yang tidak mampu.

Pada prakteknya, masyarakat awam mengetahui pemberian bantuan hukum hanya diberikan terhadap perkara litigasi saja. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada wilayah non litigasi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak mereka dan juga dikarenakan minimnya sosialisasi terhadap mereka akan hak-hak mereka ini.

Maraknya bermunculan berbagai lembaga bantuan hukum yang tergabung dalam sebuah wadah Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat berperan maksimal di dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dapat pula dikatakan sebagai era revolusi *access to justice* bagi masyarakat miskin sebab melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum inilah hak-hak masyarakat miskin khususnya hak akan bantuan hukum dapat lebih terjamin dan tersalurkan kepada mereka.

Di samping dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membawa dampak positif, akan tetapi

undang-undang ini juga memiliki sisi negatif. Artinya, terdapat pasal di dalam undang-undang ini yang dirasa menjadi kelemahan tersendiri. Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 8 ayat (1), (2) huruf a, b. Pasal ini mengatur tentang persyaratan yang dipenuhi oleh lemabga bantuan hukum agar dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Persyaratan ini dapat saja menghambat proses *access to justice* bagi kaum yang tidak mampu sebab masih banyak ditemui lembaga-lembaga bantuan hukum yang belum berbadan hukum, belum terakreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya pola akreditasi oleh undang-undang ini pun akan berampak pada jumlah kasus yang dapat ditangani oleh lembaga bantuan hukum yang bersangkutan.

Selain pemberian bantuan hukum melalui litigasi oleh lembaga bantuan hukum sebagai jalur *access to justice*, dapat pula ditempuh melalui jalur non litigasi. Penerapan bantuan hukum melalui jalur non litigasi ini dilakukan melalui upaya penyelesaian perkara dengan mengupayakan damai win win solution bagi kedua belah pihak. Selain itu, bantuan hukum non litigasi dapat pula dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada warga masyarakat yang bertujuan agar warga masyarakat Indonesia menjadi sadar dan melek hukum. Bentuk penyuluhan hukum ini pun bermacam-macam. Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) terhadap masyarakat atau dapat pula penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik yaitu penyuluhan hukum

melalui radio atau televisi sehingga narasumber dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui telepon atau short message messager (SMS).

Bantuan hukum non litigasi juga dapat dilihat secara langsung di berbagai pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara yang bekerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum. Bentuk pemberian bantuan hukum yang dimaksud di sini yaitu, lembagalembaga bantuan hukum melakukan kerjasama pengadaan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan pengadilan terkait, akan membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang bertujuan agar masyarakat umum khususnya masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di berbagai pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara ini dirasa cukup efektif karena sebagian besar masyarakat Indonesia sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Dengan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ini, masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.

Mekanisme-mekanisme non litigasi inilah dirasa lebih dapat mudah masuk ke masyarakat karena dilakukan melalui pendekatan

komunikatif dan di dukung pula oleh faktorfaktor lain yaitu besarnya rasa malu dan besarnya rasa takut dari masyarakat untuk melakukan konsultasi terkait masalah hukum (perkara) yang dihadapinya. Pendidikan dan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif yang secara tidak langsung diharapkan dapat memberi solusi kepada seluruh masyarakat baik yang tersandung masalah hukum maupun yang tidak, agar mereka lebih mengerti solusi apa yang harus diambil di kemudian hari.

Proses penyelesaian suatu perkara dengan jalur pemberian bantuan hukum litigasi alangkah lebih baik apabila dijadikan sebagai suatu alternatif penyelesaian terakhir, sehingga upaya-upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi akan dapat lebih dimaksimalkan lagi. Inilah yang seharusnya menjadi sebuah catatan penting bagi Lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada. Lembaga-lembaga bantuan hukum diharapkan dapat mengadvokasi masyarakat bahwa pemberian bantuan hukum merupakan upaya terakhir.

Dengan demikian, diharapkan keberadaan lembaga bantuan hukum dapat berperan serta sebagai salah satu wadah *access to justice* yaitu wadah bantuan hukum baik bantuan hukum di dalam persidangan (litigasi) maupun bantuan hukum di luar persidangan (non litigasi), di beberapa pengadilan pada akhirnya dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu.

C. Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Belum Berbasis Keadilan Pancasila

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensilogis dari penetapannya sebagai negara hukum.[236] Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*[237] yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa "dipelihara" bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut

[236]Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Semarang: Fakultas Ilmu Budaya UNDIP, hlm. 162.

[237]A.V. Diecy, 2007 Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia: Bandung, hlm. 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Semarang: Program Magister UNDIP, hlm. 2.

Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.[238] Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutanya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.[239] Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*.

[238]Deborah L. Rhode. 2004. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press, hlm. 3.

[239]Frans Hendra Winarta. 2009. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, hlm. 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 101.

Berbicara mengenai prinsip *equality before the law*, hak asasi manusia, dan *access to law and justice* merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat mengenai *equality before the law*, hak asasi manusia dan *access to law and justice* sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari keadilan.

Sampai dengan saat ini, bantuan hukum dilakukan dengan jalan pemberian pendampingan perkara di dalam maupun di luar pengadilan atau bantuan-bantuan dalam perkara perdata dan pidana. Tidak hanya bidang perdata dan pidana yang diberikan bantuan hukum, tetapi termasuk perkara-perkara yang menempatkan Pemerintah menjadi pihak tergugat, dan rakyat menjadi Penggugat yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan bantuan hukum harus dilakukan lebih terpadu bersama kegiatan penyuluhan hukum, karena ada kesadaran pada waktu itu bahwa program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda.

Tahap pra-ajudikasi, merupakan proses awal penyidik maupun penyelidik melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, dan menemukan barang bukti untuk menentukan tersangka. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP, penyidikan dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti yang telah berhasil dikumpulkan berfungsi untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Penyidikan yang dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu juga dilaksanakan guna menemukan tersangkanya.

Menurut KUHAP, penyidik memiliki sejumlah kewenangan, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; dan
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiska sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain kewenangan, penyidik mempunyai kewajiban untuk menunjuk seorang advokat untuk melakukan pendampingan hukum bagi tersangka hal ini sesuai dengan Pasal 17 huruf (g), Pasal 23 ayat 1 huruf (g), Pasal 23 ayat 2 huruf (o), Pasal 36 ayat huruf (e) dan huruf

(k) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang tersangka wajib hukumnya oleh penyidik diberi bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat maupun lembaga bantuan hukum (LBH) dalam tahap pra-adjudikasi bertujuan untuk menjamin hak-hak seorang tersangka selama penyidikan. Bentuk bantuan hukum yang diberikan selama tahap pra-adjudikasi adalah melakukan pendampingan dan memberikan pemahaman hukum kepada tersangka yang tidak paham tentang hukum. Pendampingan tersangka dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran selama proses penyidikan (penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain). Selain itu pendampingan tersangka juga berfungsi untuk melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik.

Tahap ajudikasi merupakan lanjutan dari tahap pra-ajudikasi. Dalam tahap ini, seorang terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum (Jaksa Penuntut Umum). Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dengan permintaan suapa diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini, peranan advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting. Pembelaan (perlawanan) seorang advokat atau LBH sebagai penasehat hukum

diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak seorang terdakwa. Hak-hak terdakwa yang dapat dibela oleh penasehat hukum antara lain:

1. Tidak ditahan selama proses persidangan;
2. Membuat nota keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan penuntut umum;
3. Membuat perlawanan dalam pemeriksaan persidangan, contohnya pemeriksaan barang bukti;
4. Membuat pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan penuntut umum;
5. Mempersiapkan upaya hukum lain setelah adanya putusan hakim.

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. Pertama, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Kedua, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usahausaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.[240] Ketiga, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik.

[240]YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 462.

Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.[241] Keempat, bantuan hukum responsif[242] diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan struktrural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut di kombinasikan dengan konsep *access to law and justice* maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

---

[241]Suradji. 2008. *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 77.

[242]Frans Hendra Winata. 2009. *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.xii.

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:[243]

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Moch Ali, mengatakan bahwa bagi pihak pengadilan untuk menunjuk seorang advokat tidak mengalami suatu hambatan yang berarti, sebab advokat yang ditunjuk pihak pengadilan selama ini senantiasa siap, dan bersedia untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan, apabila ada mungkin hanya advokat yang sudah ditunjuk oleh pengadilan tidak bersedia, akan tetapi pada umumnya

[243]Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

para advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan senantiasa bersedia. Beliau mengatakan hal yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakatyang tidak mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dana yang diberikan kepada pihak Pengadilan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan kepada para advokat, agar bersedia untuk memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di tingkat Pengadilan Negeri.

Menurut Maroni pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu akan dipengaruhi berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

   Pihak-pihak yang menerapkan hukum bagi seorang advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma secara garis besar belum ada yang dikenakan sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang untuk melakukannya. Sesuai dengan PP No 83 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma telah menjelaskan bahwa bagi advokat yang tidak bersedia untuk memberikan bantuan hukum, maka akan diberikan sanksi berupa:

   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Pada kenyataannya sanksi yang tegas belum bisa diterapkan kepada advokat yang menolak untuk memberikan bantuan hukumnya secara cumacuma, sehingganya proses penegakan hukum bagi para advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu baik yang ada di lingkungan Pengadilan maupun yang ada di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum bisa berjalan dengan baik.

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pihak Pengadilan, maupun LBH mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya di daerah pelosok, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju tempat-tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari masyarakat khususnya yang tidak mampu belum mengetahui akan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, kemudian keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah menjadi salah satu penyebab kurangnya sosialisasi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya

sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

2. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja.

Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo "Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum".[244] Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu mengindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum.[245] Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien mengenai keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil. Terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan

[244]Satjipto Rahardjo. 2009. *"Hukum dan Perubahan Sosial".* Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 69.

[245]Marudut Tampubolon. 2014. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 133-134.

hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif. Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak obyektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh

oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.[246] Mengutip dari pendapatnya John Rawls "semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as farness*) di masyarakat."[247] Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).[248] Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan

[246]Muhadi Zainuddin. "Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat". Jurnal Al-Mawarid No. 12 Tahun 2004, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama UII, hlm. 93.

[247]Theo Huijbers. 2013. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 193-202.

[248]Binziad Kadafi. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, hlm. 182.

hukum bersifat pasif. Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya diatas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.[249]

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk memberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).[250] Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/ LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25

[249]Kelompok Kerja Paralegal Indonesia. 2014. Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), KKPI: Jakarta, hlm. 15. Lihat juga didalam Iwan Wahyu Pujiarto, dkk. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Denganundang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", USU Law Journal, Vol. 3 No. 2 Edisi Agustus 2015, Fakultas Hukum USU: Sumatera Utara, hlm. 90.

[250]Andry Rahman Arif, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung", Jurnal Fiat Justitia, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015, hlm 106.

Perma No. 1 tahun 2014).[251] Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah 'keterbatasan anggaran yang disediakan'[252] sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya.

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

4. Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas

Berawal dari kalimat sarkas yaitu "mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas" yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah

[251]Isnandar Syahputra Nasution, "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai UndangUndang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, hlm. 185

[252]Mosgan Situmorang, DKK, 2011, Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum, Jakarta: BPHN kementerian Hukum dan HAM: hlm 34.

mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa.[253] Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat.[254] Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH.[255] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat/LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien (rakyat

[253]Alfan Biroli. "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)", Jurnal Dimensi, Vol. 8. No.2 Tahun 2015, hlm. 24.

[254]Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum", Jurnal FITRAH, Vol. 8 No. 1 Edisi Januari-Juli Tahun 2014, hlm. 22

[255]Edy Sunarto, 2011, "Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalamproses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang" ,Thesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas : Padang, hlm 12. Lihat juga didalam Dony Michael, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur), Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2012, Jakarta: BPHN, hlm. 50.

miskin), akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin permintaan (tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut. Suatu hal yang menjadi dilema, dimana UU Bantuan Hukum mengharuskan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara cuma-cuma yang bersumber dari APBN maupun APBD dan Perma No. 1 Tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pengadilan setempat, secara normatif bantuan hukum murni gratis, tanpa ada biaya-biaya lain, akan tetapi hal itu tidak konsisten dalam dunia praktiknya di masyarakat, dimana rakyat miskin tetap dipungut biaya seperti biaya fotocopy, pemanggilan saksi dan ahli, maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum. Pemungutan biaya tersebut dilakukan atas dasar untuk menghidupi bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda lima puluh juta rupiah (Pasal 20 jo Pasal 21 UU Tentang Bantuan Hukum). Hal ini menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.[256]

[256]Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 442-443.

5. Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum

Berbicara mengenai pendanaan atau uang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal itu segala aktivitas pekerjaan akan mudah dan karena hal itu pula dapat merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara kepada para advokat/LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin.

UU Bantuan Hukum memberikan pendanaan bagi advokat/LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH saja, itupun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut, hal ini bertendensi adanya suatu diskriminasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, hanya terdapat 310 organisasi yang dinyatakan lolos.[257] Angka tersebut sangatlah kecil, sehingga masih terdapat LBH yang tidak lolos akreditasi terutama pada daerah Papua, Bali, NTT, NTB.[258] Belum lagi prosedur dalam penyerapan dana tersebut sangatlah rumit, karena pendanaan tersebut adalah dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang kedudukan hukum

[257]*The Indonesia Legal Resource*. 2013. Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, Jakarta

[258]Ispurwandoko Susilo. "*Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*", Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13 No. 2 Edisi April 2014, hlm. 22.

(wilayah kantor) itu hanya ada di setiap provinsi. Artinya LBH yang berkedudukan di kota yang jauh akan wilayah Provinsi akan sulit untuk mengakses dana tersebut.[259]

Berdasarkan syarat, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dan cenderung diskriminatif dapat mengakibatkan penyerapan dana bantuan hukum secara nasional tidak efektif. Hal ini bertendensi mengakibatkan banyak advokat/LBH untuk memungut biaya-biaya lain dalam memberikan bantuan hukum (Lihat Persoalan Ketiga).

6. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum.

Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undangundang terutama UU Bantuan Hukum secara normatif tidak mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar, dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.[260]

---

[259]Gabriel Betsyeba. 2013. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu", Artikel Ilmiah, Yogyakarta: Fakultas Hukum UAJY, hlm. 12.

[260]Muhammad Rustamaji, "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2013, hlm. 100.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya access to law and justice bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya *access to law and justice*, terdapat beberapa upaya dalam mengoptimal penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai berikut.

a Stimulan untuk Advokat/LBH dalam Memberikan Bantuan Hukum. Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia yaitu BAR Association, stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikanbantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu award / penghargaan agar menginspirasi advokat lain memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Berdasarkan hal tersebut cara ini sebagai suatu alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan pertama.

b Bantuan Hukum yang Bersifat Aktif, Responsif dan Struktural. Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) ketika bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi advokat/LBH lebih membuat klien nya mengerti akan hukum sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum.

c Terjamahnya Seluruh Akses Menuju Peradilan. Ketika para advokat/LBH sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu harus bersifat aktif, responsif dan struktrual maka akan menjadi suatu niscaya terjamahnya seluruh akses menuju peradilan (seperti pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), artinya klien dapat menggunakan haknya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan.

d Memurnikan Makna Gratis dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat/LBH maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yangmengurusi penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota/ kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara online, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumberdaya manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Artinya para advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya.

e Pengawasan dalam Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka diperlukannya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Setelah materi dalam pengawasan sudah diketahui maka yang tidak kalah penting adalah pengawasnya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi advokat dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apabila gagasan mengenai 5 (lima) upaya dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin telah diterima dan dilakukan, maka bukanlah suatu hal yang mustahil akan terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Kelemahan dari Aspek Substansi

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesungguhnya telah mengatur, bahkan mewajibkan, pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai pelaku ataupun korban. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur anak sebagai salah satu kelompok rentan yang berhak diberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan "setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku". Begitu juga bila anak berada dalam posisi sebagai korban, dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak dikatakan "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya", hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 3 huruf d jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf g dikatakan "setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum

atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan".

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatur tentang hak Penyandang Disabilitas atas Bantuan Hukum, bahkan dikatakan wajib harus dipenuhi yakni tepatnya dalam pasal 29 yang berbunyi "..Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..". Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan pengaturan tentang hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mendapatkan bantuan hukum yakni dalam Pasal 10 huruf e UU PKDRT yang menyatakan "..Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..".

UU PKDRT dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menambahkan hak untuk didampingi oleh 'pendamping' selama proses peradilan. Namun, peran pendamping ini lebih merujuk pada penguatan psikologis dan layanan korban lainnya, bukan dalam hal memastikan prosedur hukum acara berjalan sebagaimana mestinya atau melakukan tindakan

hukum atas nama kepentingan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kehadiran pendamping ini pun hanya terbatas untuk korban KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sementara untuk bentuk kekerasan berbasis gender lainnya belum terdapat jaminan hak untuk didampingi pendampingan.

Dalam kerangka hukum perlindungan terhadap saksi dan korban, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Perubahan PSK), sesuai dengan yang ditegaskan pada pasal 3 UU PSK, beberapa asas yang menjadi dasar bagi perlindungan saksi dan korban di antaranya adalah keadilan, tidak diskriminatif, serta kepastian hukum. Selanjutnya Pasal 4 UU PSK menegaskan bahwa "…Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana…". Pasal 5 Ayat (1) UU PSK, dipertegas kembali pada UU Perubahan PSK menegaskan bahwa dalam suatu proses persidangan saksi dan korban di antaranya berhak atas bantuan hukum dan atas pendampingan dalam proses hukum. Dalam Ayat (2) dan Ayat (3) UU Perubahan PSK dijelaskan bahwa hak-hak tersebut berlaku kepada saksi dan korban tindak pidana, serta saksi pelaku, pelapor, serta saksi ahli. UU PSK memberikan penjaminan yang lebih komprehensif terhadap hak korban, termasuk hak mendapat nasihat hukum (Pasal 5 UU PSK).

Teori Perlindungan Hukum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.[261] Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan konsumen misalnya, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[262] Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryo, salah satu kelemahan mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana serta

[261]Satjipto Rahardjo, 2000, Perlindungan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

[262]Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

kurangnya perhatian terhadap konsekuensi yang harus ditanggung oleh korban kejahatan.[263]

Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi korban merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Kedudukan korban bukanlah pihak dalam perkara pidana, kepentingan korban dianggap telah diwakili oleh negara, melalui aparaturnya yaitu polisi dan jaksa. Namun, kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan hak-hak mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai.

Dalam KUHAP, hak-hak korban tindak pidana dalam suatu proses peradilan pidana, terdiri dari:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum. Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 KUHAP).
2. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana yang menimpa korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 - 101 KUHAP). didakwakan kepadanya.

[263]Sidik Sunaryo, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Pers, hlm. 2.

3. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP).

Tidak terdapat pasal yang menjamin hak bantuan hukum bagi korban dalam menghadapi peradilan pidana atau hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hak-hak korban dalam KUHAP masih disubordinasikan daripada pelaku. Di samping hak yang terbatas, korban memiliki kewajiban untuk:

1. Datang, apabila dipanggil penyidik (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
2. Memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
3. Mengucapkan sumpah/janji (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP).
4. Hadir dalam sidang (Pasal 167 ayat (1) dan (2) KUHAP).
5. Bersikap tenang dalam sidang (Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 217 ayat (2) KUHAP).
6. Menghormati pengadilan (Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 232 ayat (2) dan (3) KUHAP).
7. Menjadi saksi (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Namun dalam memenuhi kewajibannya, korban harus sendiri ketika berhadapan dengan pelaku atau pengacaranya dan aparat penegak hukum. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya. Padahal, dalam struktur masyarakat patriarki, terutama dalam kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, perempuan mengalami proses

re-viktimisasi akibat stereotip yang telah terbangun akibat perbedaan peran gender. Demikian halnya keterbatasan pengetahuan, peran domestik yang dilakukan dan anggapan lembaga penegak hukum sebagai hal yang menakutkan, menyebabkan perempuan sebagai saksi tidak bebas memberikan keterangan. Kewajiban ini tidak diimbangi dengan hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Akibatnya, meski pelaku tindak pidana telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidaklah pulih seperti sediakala.

Mengingat relatif belum optimalnya perlindungan terhadap hak saksi dan korban untuk mendapatkan bantuan hukum dalam KUHAP, patut disayangkan ketika ketentuan UU Bantuan Hukum (yang seharusnya menguatkan hak-hak korban/saksi) ternyata belum sepenuhnya mengadopsi jaminan terhadap hak atas bantuan hukum bagi saksi/korban, sebagaimana yang telah disediakan dalam UU PSK misalnya. UU Bantuan Hukum tidak secara tegas menyatakan hak bantuan hukum litigasi meliputi pula hak bantuan hukum untuk korban dalam setiap proses peradilan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari sistem pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberi bantuan hukum. Pembiayaan tersebut diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus pidana dan perdata adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sementara untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan

hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan yang lainnya, biayanya bervariasi mulai dari Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), hingga Rp. 3.740.000 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dari dana nonlitigasi untuk bantuan hukum korban hanya Rp.140.000 untuk satu kali konsultasi per korban, dan pendampingan luar pengadilan hanya 1 kali sebesar Rp. 100.000. Permasalahan minimnya anggaran bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak mampu memenuhi biaya operasional penyelenggaraan bantuan hukum, sebagai berikut:

1. Selain minim, anggaran litigasi faktanya belum menghitung proses hukum yang membutuhkan biaya-biaya tersendiri, yang akhirnya harus ditanggung oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH), seperti:
   a. pra peradilan;
   b. *judicial review*;
   c. pemeriksaan setempat;
   d. permohonan sita;
   e. somasi;
   f. eksekusi;
   g. aanmaning;
   h. biaya saksi ahli dan penerjemah
   i. gugatan sederhana, bisa langsung kasasi (namun tidak tercakup, karena sistem *re-imbursement* disyaratkan harus banding).
   j. panjar perkara

k. mendapatkan salinan putusan (praktiknya tetap dimintakan biaya fotokopi yang tidak sedikit dan sering kali tanpa disertai bukti kuitansi pembayaran).

2. Anggaran litigasi tidak memisahkan biaya operasional dan jasa bantuan hukum. Biaya operasional harusnya dihitung secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan situasi di lapangan yang berbeda-beda.
3. Tidak ada anggaran litigasi untuk korban. Dalam litigasi pidana, OBH mayoritas memberikan bantuan hukum bagi korban, namun yang mendapat akses dana litigasi pidana hanya bagi tersangka. Saat penyidikan, dan proses bantuan hukum lainnya yang diperlukan bagi korban, tidak diakomodasi oleh dana bankum.
4. Anggaran non litigasi, seperti konsultasi maupun pendampingan luar pengadilan yang kecil tidak mampu mencukupi kebutuhan korban seperti biaya pembuatan visum et repertum[264] dan *visum et psykiatrikum* atau surat keterangan psikolog, kebutuhan pendampingan atau biaya yang dikeluarkan selama korban dalam proses pemulihan. Berdasarkan pengalaman LBH APIK Jakarta, untuk memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan, dibutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan, dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp.5.000.000 hingga Rp. 10.000.000 untuk biaya selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan demikian anggaran yang

[264]Josefhin Mareta. 2016. "Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan," Jurnal HAM 7, no. 2 (2016), hlm. 150.

disediakan pemerintah pusat saat ini masih sangat minim, khususnya bagi korban yang hanya mampu mengakses anggaran non litigasi yang lebih kecil lagi jumlahnya dari anggaran litigasi. Intinya, anggaran yang disediakan negara untuk korban tidaklah mencukupi dan tidak dapat memenuhi hak bantuan hukum yang efektif dan berkualitas.

Walau tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa bantuan hukum hanya untuk tersangka/terdakwa, namun perbedaan jumlah anggaran dan akreditasi antara bantuan hukum litigasi dan non litigasi memperlihatkan penomorduaan hak bantuan hukum untuk saksi/korban. Perbedaan jaminan hak bantuan hukum antara tersangka/terdakwa dengan korban menunjukkan bahwa posisi tersangka/terdakwa diprioritaskan, sedangkan hak bantuan korban disubordinasi pemenuhannya. Akibat perbedaan jaminan hak bantuan hukum antara tersangka/terdakwa dengan korban ini, Korban sebagai pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana tidak memperoleh hak sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka/terdakwa. Korban tidak diberikan hak untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan sampai pemeriksaan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan kondisinya sebagai akibat tindak pidana yang dialaminya. Bantuan hukum yang tidak berorientasi kepada korban (terutama litigasi), menyebabkan korban terhambat hak-haknya untuk mengakses keadilan.

Melalui bantuan hukum yang efektif dan berkualitas, hak-hak korban lain seperti hak atas pemulihan, ganti rugi, kompensasi, ataupun restitusi dapat dipenuhi. Dalam hal lain bantuan hukum juga akan melindungi korban dari diskriminasi, reviktimisasi dan intimidasi, seperti intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan keselamatan korban. Dengan mendapatkan bantuan hukum, korban akan mendapatkan informasi hukum akan prosedur hukum yang akan ditempuhnya, jaminan hak-haknya dan bagaimana mengklaimnya. Hal ini memberikan kepercayaan diri pada korban untuk menjadi saksi dan mengklaim hak-haknya. Sehingga, pada dasarnya bantuan hukum kepada korban akan membantu aparat penegak hukum dalam menghadirkan keadilan bagi warganegara. Mengingat pendampingan dan bantuan hukum bagi korban sangat penting dalam mengupayakan rasa keadilan bagi korban[265], akses bantuan hukum terhadap mereka tentu juga harus dibuka seluas mungkin dalam Undang-undang bantuan hukum sebagai sarana perluasan akses terhadap keadilan.

1. UU Bantuan Hukum Melengkapi dan Menyinkronkan Jaminan Bantuan Hukum.

   Dengan tujuan mengedepankan akses keadilan bagi warga negara, maka UU Bantuan Hukum, harus memuat ketentuan-ketentuan hak bantuan hukum yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

[265]Penny Naluria Utami. 2016. *"Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu*," Jurnal HAM 7, no. 1 (2016), hlm. 65.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya untuk kelompok miskin secara ekonomi, namun meliputi kelompok masyarakat rentan.

2. Perluasan Pengertian Penerima Bantuan Hukum

Semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Bagi mereka yang tidak mampu jelas dilindungi oleh prinsip "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UUD NRI 1945. Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara. Menurut UU Bantuan Hukum, bantuan hukum hanya diberikan kepada orang miskin, yaitu "Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, cenderung diartikan sebagai hak atas pangan, sandang dan layanan kesehatan. Dengan definisi tersebut, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum melalui skema UU Bantuan Hukum, maka pemohon bantuan hukum harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memvalidasi status

miskin mereka, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Meskipun kemiskinan diakui merupakan suatu kerentanan, namun haruslah disadari bahwa kelompok miskin bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Terdapat kelompok-kelompok seperti: perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat yang karena struktur sosial mengalami diskriminasi, dan marginalisasi. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin secara ekonomi, maka kebijakan bantuan hukum nasional, menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan terhadap keadilan.

Mereka yang tergolong kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal) sesungguhnya juga berhak mendapatkan bantuan hukum. Sehingga perlu adanya perluasan dalam UU Bantuan Hukum meliputi kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal). Selanjutnya menentukan prioritas dalam memberikan layanan hukum kepada penerima bantuan hukum dengan melihat urgensi dari penerima bantuan hukum seperti halnya seberapa dampak yang mereka dapatkan akibat dari perlakuan yang mereka dapatkan. Perlunya perluasan pengertian tersebut agar pelaksana di lapangan memiliki panduan ketentuan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.

Pemerintah RI melalui Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, sesungguhnya telah menetapkan Strategi Nasional Akses Keadilan tahun 2016-2019 (SNAK). SNAK sebenarnya telah memperluas fokus sasaran program bantuan hukum pemerintah, yang tidak hanya mencakup kelompok miskin tetapi juga kelompok yang terpinggirkan, yaitu masyarakat, anak-anak, dan perempuan dengan disabilitas, serta masyarakat, anakanak dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan. Oleh sebab itu dalam implementasi UU Bantuan Hukum idealnya juga harus sejalan dengan strategi nasional akses terhadap keadilan.

Secara ideal, seharusnya pemberian bantuan hukum juga diperluas dengan memasukkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum. Meskipun demikian, saat ini perluasan bantuan hukum untuk mencakup kelompok rentan masih terhambat oleh definisi serta kriteria dari kelompok rentan yang saat ini belum bersifat jelas. Pengertian konsep "kelompok rentan" memang tampaknya belum dirumuskan secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia[266] rentan memiliki definisi sebagai:

1 Mudah terkena penyakit dan

2 Peka, mudah merasa.

[266]Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3rd ed*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 9.

Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia misalnya, menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Adapun pengertian kelompok rentan berdasarkan undang-undang tersebut antara lain mencakup anak dan perempuan korban kekerasan, manula dan wanita hamil. Kita juga harus memahami bahwa mereka yang tergolong kelompok terpinggirkan (marginal) memang biasanya juga tergolong sebagai mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan (marginal), tetapi orang yang terpinggirkan (marginal) tidak selalu bisa disebut miskin.[267] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia marginal yaitu, sesuatu yang berhubungan dengan batas tepi sedangkan marginalisasi yakni, meminggirkan atau memojokkan. Kaum marginal merupakan kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat.[268] Adapun kelompok marginal, antara lain, adalah penyandang Disabilitas, Pekerja Seks Komersial (PKS) yang mendapati

[267]Hetifah Syaefudin, "Kelompok Marjinal di Perkotaan: Dinamika, Tuntunan, dan Organisasi," dokumen.tips/documents/kelompok-marjinal-diperkotaan-dinamika-tuntunan-dan-organisasi.html., diakses tanggal 06/03/2022

[268]Ikhwan Fahrudin, "Kaum Marjinal Tanggung Jawab Siapa?," http://bloktuban.com/2018/06/02/kaum-marjinaltanggungjawab-siapa/., diakses tanggal 06/03/2022

diskriminasi, anak dan perempuan yang mendapatkan diskriminasi dan eksploitasi serta orang yang dengan HIV (ODHA) dan anak yang dengan HIV (ADHA). Terlebih lagi kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa kelompok rentan sering kali dihadapkan pada kesulitan memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang merupakan syarat memperoleh bantuan hukum.

Pembatasan pemberian bantuan hukum berdasarkan SKTM ini juga berdampak pada OBH yang memprioritaskan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM atau kasuskasus yang bersifat spesifik seperti perempuan korban kekerasan, anak, penyandang disabilitas, hak konsumen, dan hak atas sumber daya alam. OBH semacam ini sering kali tidak dapat mengakses skema pembiayaan UU Bantuan Hukum ke dalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap individu atau kelompok yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan SKTM. Data dari LBH APIK Jakarta, salah satu OBH yang memberikan bantuan hukum dengan pendekatan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), misalnya menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2018, LBH APIK Jakarta telah memberikan bantuan hukum dalam 837 kasus KDRT, diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok perempuan dan anak, minoritas, penggusuran, penyiksaan, ketenagakerjaan. Akan tetapi, pembiayaan bantuan hukum terhadap kelompok rentan tersebut tidak dapat menggunakan skema pendanaan bantuan hukum yang saat ini berlaku berdasarkan UU Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan para korban tersebut tidak selalu dapat dikategorikan miskin secara ekonomi

(berdasarkan SKTM), namun pada umumnya mereka juga tidak dapat dikategorikan orang-orang yang mampu membayar jasa Advokat. Sehingga, akhirnya kelompok rentan khususnya perempuan dan anak korban dari kelompok rentan tidak dapat mengakses keadilan melalui bantuan hukum.

Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum, memberikan definisi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai "perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak." Ini berarti, dalam sistem peradilan pidana, perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menjadi: (1) Tersangka/Terdakwa; (2) Korban dan (3) Saksi. Sedangkan untuk peradilan perdata atau Tata Usaha Negara (TUN), maka perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menjadi: (1) Penggugat; (2) Tergugat; (3) Saksi; atau (4) Pihak intervensi (ketiga). Pengertian ini dapat digunakan untuk membahas hak bantuan hukum untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik untuk di ranah hukum pidana, perdata ataupun tata usaha negara.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU Bantuan Hukum yang berbunyi: "…Penerima Bantuan Hukum adalah orangatau kelompok orang miskin…" sebaiknya diubah menjadi: "…Penerima Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum…".

Sementara itu, ketentuan Pasal 5 UU Bantuan Hukum yang berbunyi: "..Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan…" diubah menjadi:"…Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi dan tidak terbatas kepada kelompok minoritas dan rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan manula…"

Peningkatan Bantuan Litigasi dan nonLitigasi Kepada KorbanDalam sistem pemberian bantuan hukum yang dibangun berdasarkan UU Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH mencakup layanan hukum litigasi dan non-litigasi. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU Bantuan Hukum menyebutkan Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikan. Adapun ranah pemberi batuan hukum litigasi yaitu pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai

dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.[269] Selanjutnya Menurut Pasal 1 ayat 6 UU Bantuan Hukum menyebutkan Non-Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikan. Adapun ranah bantuan hukum Non-Litigasi meliputi Pemberian Bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, para legal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan (1) penyuluhan hukum; (2) konsultasi hukum; (3) investigasi perkara; (4) penelitian hukum; (5) mediasi; (6) negosiasi; (7) pemberdayaan masyarakat; (8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau (8) drafting dokumen hukum.[270] Kegiatan nonlitigasi pendampingan di luar pengadilan seharusnya juga bisa dilakukan perubahan menjadi pendampingan litigasi dikarenakan proses hukum terhadap pelapor/ korban yang juga sampai pada proses pengadilan selain itu pendampingnya juga merupakan seorang advokat selain dari para legal yang terlibat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum saat ini terkesan lebih memprioritaskan pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan yang

[269]BPHN. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Jakarta.

[270]*Ibid*, hlm. 122

lebih besar untuk pendampingan bagi pelaku. Pendampingan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Sedangkan bantuan hukum yang diberikan kepada korban hanya menyentuh kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pelaporan di tingkat kepolisian, padahal kenyataannya korban juga berhak memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan hukum atau nasihat hukum pada saat di persidangan supaya hak-hak korban tetap terpenuhi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa OBH yang melakukan pendampingan terhadap korban di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan, dan pendampingan korban di luar proses pengadilan sering kali mengalami kesulitan untuk mengakses dana bantuan hukum, dikarenakan minimnya anggaran untuk pendampingan korban. Berdasarkan data pendampingan LBH APIK Jakarta yang fokus pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun terhitung dari tahun 2016-2018 terdapat 2339 kasus yang didampingi secara litigasi maupun non litigasi. Sementara dari jumlah kasus di atas, hanya sebanyak 78 kasus yang dibiayai oleh program bantuan hukum pemerintah pusat.

Padahal, upaya pemenuhan hak-hak korban yang dilakukan dengan adanya bantuan hukum sebenarnya sangat penting. Menurut Arif Gosita[271] yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari kepentingan pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Apabila dilihat dari sisi pandang korban, korban juga membutuhkan keberadaan advokat untuk dapat menjaga keseimbangan posisinya agar posisi korban ini dapat terlihat seimbang sejajar dengan pelaku. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa dalam bergulirnya proses peradilan pidana posisi korban ini sering kali terlihat sebagai pihak yang lemah dan bahkan kurang terperhatikan. Padahal seharusnya posisi dan keberadaan korban ini menjadi poros pusat dari proses peradilan pidana dikarenakan keadilan dari korbanlah yang dicederai oleh pelaku yang akhirnya menjalani proses peradilan pidana tersebut, Sehingga keberadaan advokat ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang dalam posisi dari korban. Di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, bantuan hukum terhadap

[271]Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

korban diharapkan juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kriminalitas dan tidak timbul korban yang berkelanjutan. Sehingga, sangat ironis ketika, bantuan hukum yang diberikan bagi korban ternyata hanya berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan dengan biaya yang lebih kecil. Layanan bantuan hukum juga harus bisa mengakomodir kebutuhan baik penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap penerima bantuan hukum bagi pra dan pasca peradilan seperti kebutuhan korban di luar pengadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti pembiayaan *visum et repertum* yang sampai hari ini masih dibebankan kepada pelapor/ korban, kemudian ketika pelapor/korban adalah penyandang disabilitas seperti tunarungu maka dibutuhkan seorang ahli bahasa dan pemeriksaan psikologi oleh psikolog yang sampai hari ini sulit mendapatkan secara gratis dan juga rumah aman. Selain dari hal itu bentuk litigasi pra dan pasca peradilan terhadap korban perlu adanya penguatan hukum, pemberdayaan kepada korban agar tidak menjadi korban kembali.

B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) sesuai dengan tugasnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum wajib menyusun dan menerapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum dan mengawasi dan

memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum tersebut dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam UndangUndang Bantuan Hukum ini.[272] Hal tersebut bertujuan agar dengan dilaksanakannya bantuan hukum cuma-cuma tersebut yang berdasarkan asas-asas yang telah diatur di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum maka terdapat pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit dan bersifat abstrak.

Sulitnya Lolos Verifikasi dan Akreditasi yang Dilakukan Panitia yang Dibentuk BPHN

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3) UU Nomor 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Adapun syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Berbadan hukum. Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri. Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau

[272]Undang-Undang No.16 Tahun 2011, *Op. Cit*, Pasal 7.

Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum. Akta pendirian OBH;

2. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor dan foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
3. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan adanya Akta pengurus OBH;
4. Memiliki program Bantuan Hukum. Format rencana program BantuanHukum sesuai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor No 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LembagaBantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH, Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku, Berita acara sumpah advokat; dan
6. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus perkara litigasi Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan dalam Petunjuk

Pelaksanaan Kepala BPHN No: PHN- HN.04.03-09 TAHUN 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi, diatur verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum serta perpanjangan sertikasi yang meliputi :

1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
2. Jumlah kegiatan nonlitigasi;
3. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
5. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
6. Jangkauan penanganan kasus;
7. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
8. Usia atau lama berdirinya Organisasi Bantuan Hukum
9. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
10. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum; dan Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri;
12. Jaringan yang dimiliki Organisasi Bantuan Hukum.

Kegiatan verifikasi dan akreditasi tidak hanya dilakukan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang baru mendaftar tetapi juga terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya (perpanjangan sertifikasi), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman;
2. Permohonan;

3. Pemeriksaan administrasi;
4. Pemeriksaan faktual;
5. Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
6. Penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa verifikasi dan akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaannya, kendala yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi ini yaitu:

1. Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah dan Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan.
2. Tidak ada pembagian kerja yang teruji antara Kelompok Kerja Daerah dan Pusat karena tidak ada standar kerja dan output terkendali yang seragam. Hal ini menyebabkan tumpukan kerja di Kelompok Kerja Pusat. Akibatnya akurasi dan waktu verifikasi tidak bisa optimal. Kondisi akan menghambat apabila terdapat Organisasi Bantuan Hukum yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode verifikasi akreditasi 3 tahunan. Hal ini dianggap bisa menghambat *access to justice*, terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah Organisasi Bantuan Hukum minim atau bahkan tidak ada sama sekali.
3. Calon Pemberi Bantuan Hukum belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi.

4. Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dijangkau oleh Kelompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat dikarenakan kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan pemeriksaan administrasi dokumen yang disampaikan dalam aplikasi Sidbankum tanpa ada pemeriksaan faktual. Tidak sedikit calon pemberi bantuan hukum kesulitan dan tidak lolos proses verifikasi dan akreditasi yang dilakukan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, termasuk salah satunya LKBH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak lolos verifikasi periode kedua, padahal LKBH Universitas Lambung Mangkurat sejak lama memiliki pengalaman dalam membantu masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. Memang dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksananya tidak mengatur mengenai usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi tersebut berdiri, tetapi Badan Pembinaan Hukum Nasional mencoba untuk memasukkan syarat ini dengan tujuan dapat menjaring Calon Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel. Sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melaksanakan 3 (tiga) kali verifikasi dan akreditasi. Dalam periode tahun 2013-2015 terdapat 310 Pemberi Bantuan Hukum yang lolos dan terakreditasi, kemudian pada periode tahun 2016-2018 terdapat 405 Pemberi Bantuan Hukum, kemudian jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya yakni periode tahun 2019-2021 menjadi 524 Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam Bantuan Hukum terdapat 3 jenis Bantuan hukum secara garis besar baik itu secara pidana maupun perdata yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap terdiri dari:

1. *Legal Aid Legal aid* yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu:
   a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
   b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
   c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.
2. *Legal assistance Legal assistance* yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan hukum:
   a. Baik kepada yang mampu membayar prestasi.
   b. Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
3. *Legal service Legal service* yaitu pelayan hukum, dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan

dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkadang makna dan tujuan:

a. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh apparat penegak hukum. dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
c. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.[273]

Dalam ketentuan undang-undang bantuan hukum dan undang-undang advokat menjadi dasar bahwasanya seorang advokat harus berperan secara aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, pemberian bantuan hukum dari seorang advokat memang bukan hanya dalam pengadilan, namun juga di luar pengadilan. Advokat sebagai salah satu penegak hukum

[273]M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 334.

mengenal asas tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian sederhana, cepat dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan cepat. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[274]

Asas-asas yang menjadi landasan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain:

1. Keadilan Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Tahun 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum demikian pula dengan hak untuk didampingi Advokat dijamin sistem hukum Indonesia dalam pembelaan umum bagi orang miskin atau pro bono publico. Dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa asas keadilan adalah menempatkan hak dan

[274]*Ibid.*

kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2. Persamaan kedudukan Di Dalam Hukum Indonesia sebagaimana di bagian lain di dunia khususnya di negara berkembang, mempunyai problem ketidakserasian sumber hukum antara yang kaya dan yang miskin. Hampir semua orang di Indonesia menganggap penggunaan jasa Advokat mahal dan mewah.[275] Melalui asas ini, sebagaimana dijelaskan juga dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan diperlakukan sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Keterbukaan

   Salah satu contoh penerapan asas keterbukaan dapat dilihat dari pelaksanaan penyaluran dana dalam bantuan hukum cuma-cuma. Pada persyaratan perolehan dana yang dilakukan dengan *reimbursement*, yaitu dengan sistem pergantian dana yang dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum terlebih dahulu, apabila tidak memenuhi syarat maka tentu tidak akan dicairkan dana bantuan hukum tersebut, oleh sebab itu keterbukaan mengenai laporan mana yang ditolak dan apa alasan penolakannya memiliki potensi penyalahgunaan Anggaran Negara.

   Asas keterbukaan dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum juga mencakup dalam hal memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap,

[275]Frans Hendra Winarta. 2000. (Buku I). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Gramedia, hlm.81.

benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara Konstitusional.

4. Efisiensi

   Dalam pelaksanaannya, asas efisiensi dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa pada pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Dengan melalui asas ini diharapkan proses pemberian dari bantuan hukum tersebut diberikan kepada orang yang tepat sehingga tepat sasaran.

5. Efektivitas

   Salah satu kewajiban Advokat sebagai penegak hukum adalah memberikan jasa bantuan hukum terhadap pencari keadilan yang tidak mampu secara cuma-cuma. Maka Advokat sesuai dengan penjelasan asas efektifitas dalam Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa Advokat adalah sebagai penentu dalam pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Akuntabilitas

   Asas akuntabilitas dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dijabarkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: [276]

1 Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2 Mewujudkan Hak Konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3 Menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4 Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peranan Pemerintah dalam setiap rencana dan Program Bantuan Hukum dalam berpartisipasi dan mengawasi penegakan hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan aturan hukum sangat diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut. Negara telah selayaknya lebih memperhatikan pelaksanaan dari Program Bantuan Hukum ini sehingga tujuannya dapat tercapai dan setiap masyarakat dapat mencicipi keadilan dalam kehidupan mereka. Bantuan hukum betujuan untuk memberikan pertolongan dan menumbuhkan serta membina kesadaran dari masyarakat akan hak-hak nya sebagai subjek hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak ketinggalan zaman dan jelas tujuannya.

[276]Pasal 3 Undang-Undang No.16 Tahun 2011.

Terdapat dua aspek dari tujuan bantuan hukum, yaitu:[277]

1. Aspek Kemanusiaan

   Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari Program Bantuan Hukum adalah meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu didepan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

   Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Pada dasarnya tujuan dari pemberian bantuan hukum cuma-cuma didasarkan atas tujuan amal. Dengan dilatarbelakangi oleh kegiatan amal tersebut, bantuan hukum diharapkan tujuan utamanya dapat memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh setiap individu terlepas dari perbedaan agama, kekayaan, warna kulit, dan ras dalam usaha mereka dalam mencapai apa yang menjadi hak mereka melalui jalan hukum.

[277]http://www.pngresik.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52:bantua n hukum&catid=41&itemid=72 , diakses pada tanggal 06/03/2022

Menurut Daniel Panjaitan pada dasarnya pelaksanaan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum tersebut memiliki tujuan:[278]

1. Bagian dari pelaksanaan Hak-Hak Konstitusional sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh UUD Tahun 1945 berikut amandemennya. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I Ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem Negara Hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses Peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum;
2. Bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang. Adanya keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum bagi individu yang buta hukum untuk memahami ketentuan yangtertulis dalam undang-undang maka diperlukan peran dan fungsi Advokat untuk memberikan penjelasan dan bantuan hukum;
3. Bagian dari upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari Advokat.

[278]http://www.academia.edu/3626309/KEWAJIBAN_PEMBERIAN_BANTUAN_HUKUM_OLEH_ADVOKAT_DALAM_KEDUDUKANNYA_SEBAGAI_OFFICIUM_NOBILE_ME GA_, diakses pada tanggal 06/03/2022

Dalam pelaksanaannya, kewajiban memberikan bantuan hukum cumacuma tersebut bertujuan mempertahankan nilai-nilai yang menjadi latar belakang seseorang itu membutuhkan bantuan hukum, yaitu persamaan hak di hadapan hukum, hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang bersifat buta tidak melihat perbedaan antara kaya dan miskin maupun antara yang memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan. Tujuan itu menjadikan bantuan hukum menjadi salah satu cara menuju masyarakat yang berkeadilan sosial dimana terjadi pemerataan yang tidak hanya difokuskan dalam bidang ekonomi tetapi juga di bidang hukum dan keadilan.

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma telah diatur dalam Pasal 22 UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat terdapat pada Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah[279], yaitu PP Nomor 83 Tahun 2008. Pasal 12 PP Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan1 Pasal 13 PP Nomor 83 Tahun 2008 mengatur advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Advokat yang

[279]Pasal 22 ayat (2) UU Advokat.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Adapun sebelum Advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002. Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu. Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.[280]

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, fakir miskin memiliki hak

[280]Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia.

konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara pro bono publico, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan *pro bobo publico* itu sendiri.[281]

Dengan tidak sebandingnya jumlah advokat dengan jumlah penduduk di Indonesia, minat advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma pun masih rendah. Dibuktikan dari sekitar 15 ribu anggota Peradi, tercatat baru 100-an orang yang terdata memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tak mampu. Kewajiban pemberian bantuan hukum diatur secara internal Peradi pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 11 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 menyebutkan tiap advokat anggota Peradi dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tak mampu setidaknya 50 jam kerja tiap tahunnya.[282]

Keadaan ini memprihatinkan mengingat hak atas bantuan hukum merupakan hak warganegara yang dijamin oleh konstitusi dan

[281]Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico Hak Konstitusional, hlm. 5.

[282]Boy Yendra Tamin, Idealnya Indonesia Punya 500 Ribu Advokat, http://boyyendratamin.blogspot. com/2011/07/idealnya-indonesia-punya-500-ribu.html, diakses 4/03/2022

kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma telah diatur dalam UU Advokat dan peraturan pelaksanaannya. Menyadari akan keprihatinan ini, DPR mengesahkan UU Bantuan Hukum pada 2 November 2011. Pada bagian Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum disebutkan jaminan hak konstitusional atas bantuan hukum belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya UU Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan UU Bantuan Hukum. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Dengan adanya UU Bantuan Hukum maka pemberian bantuan hukum cuma-cuma bukan menjadi dominasi advokat lagi. UU Bantuan Hukum memperluas pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum menyatakan pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum). Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum menyatakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan

dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut kemudian menyatakan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat. Dengan adanya Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum maka menurut penulis penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan UU Advokat.

Rendahnya minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain disebabkan oleh, pertama, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melakukan kewajiban ini. UU Advokat bahkan tidak mengatur sanksi apapun bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sanksi yang sama diberikan juga bagi advokat yang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari

Pencari Keadilan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh oleh Organisasi Advokat dimana advokat tersebut menjadi anggota dan sebelum advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya. Sebagai contoh, sosialisasi yang dilakukan oleh Peradi menurut penulis masih sangat minim dan belum maksimal hanya di dua kota dan disisipkan dalam sebuah pelatihan tentang advokasi anak. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, Anggara Suwahyu, bahwa upaya sosialisasi Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 dan kewajiban bantuan hukum 50 jam setahun bukan tidak dilakukan. Sejauh ini PBH baru menggelar sosialisasi di dua kota, Jakarta dan Semarang dengan disisipkan dalam sebuah pelatihan tentang advokasi anak. Tidak ada anggaran untuk sosialisasi kewajiban bantuan hukum sementara anggota Peradi yang harus dijangkau tersebar di seluruh daerah.

Kurangnya *political will* dari masing-masing Organisasi Advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat yang bernaung dalam organisasinya. Hal ini disampaikan oleh Febi Yonesta dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, bahwa Pusat Bantuan Hukum Peradi sudah cukup progresif untuk memulai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tapi tidak ada

political will dari Peradi sendiri dari segi pendanaan atau sumber daya lainnya untuk mendukung keberadaan Pusat Bantuan Hukum.

Dalam mengatasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya minat advokat dalam melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum Cuma-cuma, perlu dilakukan beberapa upaya, pertama pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 harus diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan. Dalam hal ini maka terhadap advokat yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Demikian pula sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat, terhadap advokat yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari profesi advokat harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat. Terhadap advokat yang telah diberhentikan secara tetap dari profesi advokat maka harus dilakukan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dan tidak diperbolehkan untuk pindah ke organisasi profesi advokat lainnya.

Upaya kedua, menempatkan kewajiban pemberian bantuan hukum cumacuma pada bab mengenai hak dan kewajiban dalam UU Advokat. UU Advokat memang telah menentukan bantuan hukum sebagai salah satu jasa hukum yang dapat diberikan oleh advokat dan juga telah ditegaskan hal itu merupakan jasa hukum cuma-cuma, tetapi tidak ada jaminan secara hukum bahwa bantuan hukum (prodeo) yang

diberikan advokat "sebaik" ketika hal yang sama diberikan terhadap klien yang membayar. UU Advokat menentukan bantuan hukum sebagai suatu kewajiban namun kewajiban ini tidak ditempatkan pada Bab IV UU Advokat yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum ditempatkan pada Bab VI mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma sehingga menjadi sekedar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sosial seorang profesional. Hal ini menurut Chairul Huda menunjukkan UU Advokat belum menunjukkan politik hukum kenegaraan untuk menempatkan bantuan hukum sebagai bagian upaya mewujudkan negara hukum.

Lebih lanjut menurut Chairul Huda pengaturan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat perlu ditempatkan pada bab mengenai kewajiban advokat mengingat penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).[283]

Dalam kerangka pelaksanaan kewajiban ini maka pengaturan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh advokat. Kewajiban tersebut saat ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008 yang menyatakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara

[283]Hal ini disampaikan oleh Chairul Huda pada diskusi dalam rangka Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Nomor 2003 tentang Advokat yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI, 3 Mei 2012.

cuma-cuma dilaporkan oleh Advokat kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Pada penjelasannya disebutkan bahwa laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam ketentuan ini antara lain memuat mengenai lamanya penanganan pemberian bantuan dan kompleksitas penyelesaian kasus/ perkara. Adapun Organisasi Advokat yang dimaksud dalam PP Nomor 83 Tahun 2008 adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang, yaitu Peradi. Peradi mengatur pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 31 hingga Pasal 34 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010.

Terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap pencari keadilan tidak mampu di Indonesia. Pertama, tidak berkembangnya Biro Bantuan Hukum Universitas (BBH) disebabkan karena hambatan kultural. Ada beberapa hal yang menyebabkan Biro Bantuan Hukum di Fakultas-Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri ini mengalami kemunduran, antara lain:[284]

1. Konsentrasi advokat (*lawyers*) yang terpecah

   Pada BBH, para lawyers adalah Dosen-Dosen yang mempunyai tugas pokok sebagai tenaga pengajar yang harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan hukum secara komprehensif sehingga dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengajar. Hal tersebut menyebabkan tersitanya pikiran dan tenaga mereka sehingga tidak

[284]Frans Hendra Winarta (Buku II), *Op.Cit*. hlm. 58.

dapat membagi waktu untuk menjadi Advokat yang menolong masyarakat yang tidak mampu. Sebab untuk menjadi seorang Advokat yang handal sangat dibutuhkan keseriusan dan konsentrasi yang penuh.

2. Biro Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi bersifat "*nonprofit oriented*" sedangkan tingkat penghasilan Dosen tergolong rendah Posisi Dosen-Dosen yang berpenghasilan terbatas terhadap BBH yang bersifat *nonprofit oriented* dipandang sangat sulit untuk dilaksanakan dibandingkan dengan para Advokat Professional dengan kemampuan yang bisa dikatakan sebanding dengan kemampuan dosen. Hal tersebut menyebabkan para Dosen tidak serius dalam melaksanakan BBH dan lebih memilih untuk membuka sebuah Biro Hukum Professional yang independen atau menjadi staf ahli law firm terkemuka dengan tingkat penghasilan yang cukup besar. Akibatnya, Biro Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Negeri mengandalkan para mahasiswa yang secara teknis maupun penguasaan terhadap materi hukum masih terbatas dan belum teruji dalam masyarakat sehingga masyarakat pencari keadilan sering kecewa dengan pelayanan BBH tersebut.
3. Keterbatasan Pendanaan

   Adanya keterbatasan dana yang dialokasikan Perguruan Tinggi kepada BBH yang tidak mencukupi kebutuhan pokok mengambat perkembangan dari BBH.

4. Profesionalitas tenaga advokat di BBH di Perguruan Tinggi Negeri

   Adanya penerapan kurikulum pendidikan tinggi hukum yang kurang mendukung dan kurang mengarahkan pada Advokat di BBH semasa mereka masih kuliah, untuk mengembangkan kemampuan (*competence*) atau kemahiran hukum (*legal skills*) sebagai praktisi hukum, telah menimbulkan masalah baru bagi advokat (*lawyer*) di BBH dalam menghadapi permasalahan hukum yang ditanganinya. Disisi lain, dalam kapasitas sebagai Dosen, mereka dituntut untuk mengembangkan keahlian dan kemampuannya sebagai ilmuwan (*scientist*). Hal inilah yang menyebabkan para dosen atau Advokat tersebut berkembang menjadi ahli yang cenderung hanya berkompeten sebagai intelektual dan akademisi yang kurang mendalami dan memahami tentang praktik, tugas, dan tanggung jawab seorang Advokat professional.

5. Kurangnya kepercayaan masyarakat

   Bertolak dari keterbatasan-keterbatasan BBH di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dikemukakan dalam butir-butir sebelumnya, hal ini menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BBH untuk menangani permasalahan mereka. Kondisi ini didukung pula oleh lahirnya LSM di bidang bantuan hukum yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh hukum yang sangat *concern* terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan rakyat kecil yang sangat tertindas oleh rezim yang berkuasa.

Kedua, perolehan Surat Keterangan Tanda Tidak Mampu (SKTM) yang oleh Pejabat yang berwenang seperti Lurah, Kepala Desa, ataupun pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili mengeluarkan surat tersebut sering menjadi permasalahan di prosedur pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Dari sejumlah LBH yang penulis berhasil datangi, keseluruhannya menyatakan perolehan SKTM salah satu kendala terbesar dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Memang pada akhirnya SKTM akan diberikan oleh Pejabat yang tersebut. Tetapi rentang waktu permohonan SKTM dan waktu Penerbitan SKTM menyebabkan terganggunya proses penyelesaian sengketa yang dimohonkan sebab permohonan baru dapat diproses apabilapersyaratan telah lengkap. Dalam kasus si pemohon berasal dari luar kota tempat permohonan bantuan hukum diajukan juga menjadi kendala yang rutin dihadapi Pemberi Bantuan Hukum cuma-cuma tersebut.

Pada persoalan mengenai perolehan SKTM, dimana apabila seorang pemohon hendak mengajukan permohonan bantuan hukum cuma-cuma memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di luar Kota Medan sehingga diharuskan kembali ke kota sesuai dengan yang tertera di KTP. Disini masalahnya, si pemohon yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke Kota asalnya tidak memiliki biaya untuk ongkos, sehingga terhalang untuk memgajukan permohonan bantuan hukum cuma-cuma" Posisi pemohon surat SKTM seharusnya tidak dipersulit oleh pemerintah sebab dianggap tidak memiliki kemanusiaan, namun itu

kembali ke alasan kenapa SKTM diperlukan. Berdasarkan penelitian penulis, alasan penolakan penerbitan SKTM adalah menjadi pertanyaan kenapa harus di luar Kota tempat tinggal permohonan tersebut. Ini salah satu alasan penolakan SKTM oleh Kelurahan/Kepala desa. Ketidak tersediaan dana untuk kembali ke kota tempat tinggal sesuai dengan KTP seharusnya menjadi pertimbangan dalam menerbitkan SKTM tersebut.

Terakhir, pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak bersifat *rural oriented*. Padahal gerakan bantuan hukum merupakan bentuk perjuangan bagi HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang sudah dapat dipastikan lebih dibutuhkan di struktur masyarakat bawah. Bukan hanya alasan tersebut, Indonesia di dalam Pancasila menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah: Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Maka, apabila pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut hanya berorientasi di Kota, apakah masyarakat miskin pedalaman dapat menyicipi keadilan yang di agung-agungkan tersebut.

"Tujuan bantuan hukum dengan demikian perlu diperluas tidak saja terbatas pada bantuan hukum individual tetapi juga struktural tidak saja 'urban' tetapi juga 'rural'. Kesalahan gerakan bantuan hukum di Indonesia selama ini adalah karena gerakan bantuan hukum kita terlalu individual dan urban. Padahal kalau kita mau bicara soal HAM adalah masyarakat msikin dari struktur bawah yang hidup di rural. Sudah waktunya gerakan bantuan hukum kita secara aktif datang ke pedesaan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bantuan hukum dalam arti yang

seluas-luasnya. Hendaknya jangan kita terbelenggu dengan jalur-jalur formal semata, sebab banyak jalur-jalur informal yang sudah waktunya ditangani. [285]

Kelebihan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia adalah bahwa telah dibentuknya Peraturan-Peraturan mengenai praktik pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum.Hal ini tentu merupakan sejarah terbesar dalam Hukum Konstitusional Bangsa Indonesia. Dikatakan sejarah karena setelah merdekanya Indonesia dari penjajahan, belum ada dibentuk peraturan hukum yang mengatur khusus mengenai bantuan hukum cuma-cuma dalam penegakan hukum di Negara Indonesia. Indonesia pada saat itu hanya mengikuti ketentuan hukum asing karena belum mampu membentuk peraturan hukum milik sendiri. Sehingga peraturan yang diikuti tersebut bukan merupakan harapan rakyat Indonesia dan menyebabkan ketidaksinkronan dengan ideologi bangsa. Belum lagi banyaknya produk undang-undang yang tidak pernah memberikan jaminan dalam praktik pelaksanaan dan penegakan bantuan hukum cuma-cuma itu sendiri. Sehingga penegakan hukum bukanlah hadiah namun berkah dari perjuangan bersama yang berkelanjutan.

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum memberi keyakinan kepada bangsa bahwa bantuan hukum adalah bagian dari Hak Konstitusi setiap Warga Negara tanpa terkecuali, yang mana

[285]Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulayana W. Kusumah. 1981. *Beberapa pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni, Hlm.13.

sebelum terbentuknya undang-undang tersebut, praktik bantuan hukum hadir atas inisiatif dari masyarakat melalui pendirian LBH sebagai contoh yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui Bantuan Hukum Struktural (BHS).

Selain memberi keyakinan, dibentuknya Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberi dampak positif dalam hal pendanaan, dimana ketentuan mengenai hal tersebut terkaji dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang menyatakan bahwa urusan pendanaan merupakan kewenangan KEMENKUMHAM Republik Indonesia untuk mengelolanya dan sehingga proses kedepannya prosedur anggaran bantuan hukum hanya diperoleh dan dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM.

C. Kelemahan dari Aspek Kultur Hukum

"Bantuan hukum adalah suatu bentuk jasa, yakni jasa berupa menolong sesama umat manusia yang berada dalam kesusahan hukum. Kalau kita melihat pada literatur, maka bantuan hukum ini sudah dikenal sejak juga sejak Zaman Romawi Kuno. Hanya saja belum terbentuk suatu jasa yang khusus seperti bantuan hukum yang sekarang kita kenal. Tetapi masih berupa suatu bantuan yang bersifat umum. Kita mengenal di Zaman Romawi apa yang disebut Patronus. Sekarang kita kenal istilah Patron, asal dari kata Patronus itu. Patronus adalah suatu figur tokoh masyarakat yang dipercaya atau dihargai sekali oleh masyarakat, dimana orang kecil, masyarakat yang kesusahan, dalam

segala hal datang mengadu dan meminta perlindungan, baik dalam soal ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lain."[286]

Dari kutipan diatas dapat kita ketahui bahwa konsepsi bantuan hukum telah dimulai semenjak Zaman Romawi kuno. Pada abad pertengahan, bantuan hukum merupakan bagian dari bidang moral. Hal ini bermula dari adanya sikap kedermawaan yang ditunjukkan oleh sekelompok elite gereja terhadap para pengikut pengikutnya. Gerakan tersebut dinamakan gerakan Charitas, yaitu suatu dorongan bagi masyarakat pada saat itu untuk berlomba-lomba memberikan derma yang kemudian menumbuhkan nilai-nilai yang sangat diagungkan pada saat itu yang dinamakan *nobility* (kemuliaan).

Bantuan hukum dilaksanakan sebagai suatu derma setelah Revolusi Perancis dan menjadi bagian dari proses hukum pada saat itu, artinya saat itu terhadap warga masyarakat diberi hak yang sama untuk berurusan hukum dengan hakim. Akan tetapi pada waktu itu bantuan hukum masih dipengaruhi oleh suatu pendirian bahwa para warga masyarakat harus tampil sendiri untuk mempertahankan hak-haknya. Hal tersebut menyebabkan pada proses pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara hal yang dicita-citakan dengan keadaan yang sesungguhnya. Kenyataan itu menjadi filosofis gerakan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tidak mampu yang dikembangkan secara bertahap hingga saat ini.

[286]Adnan Buyung Nasution, 1973, (Buku II), Bantuan Hukum, Dalam Dua Tahun Bantuan Hukum LBH-JKT,(Jakarta: LP3ES,1973),hlm.41.

Di Indonesia sendiri, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi Advokat khususnya mengenai bantuan hukum di muka persidangan telah dibentuk sejak Indonesia Merdeka. Namun pada saat itu pelaksanaan dari pemberian bantuan hukum tersebut belum dapat berjalan dengan baik disebabkan karena belum adanya lembaga yang khusus menangani masalah bantuan hukum itu sendiri. Bantuan hukum di Indonesia baru mendapat tanda baik setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang setelah Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai membentuk dan mengeluarkan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan profesi dari Advokat terkhusus dalam hal pemberian bantuan hukum.

Setelah memperoleh pengakuan kedaulatan, keadaan dari kondisi bantuan hukum tidak langsung mendapatkan perkembangan yang signifikan. Keadaan tidak banyak berubah disebabkan karena sistem warisan yang dipilih dalam Peradilan adalah Landraad dan HIR dibandingkan dengan sistem *Raad van justitie dan Rechtvordering*. Sistem Peradilan semakin memburuk dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keindependensian dari Peradilan itu sendiri dan fungsi dari Advokat nyaris tidak terlihat.

Kemunculan organisasi organisasi Advokat mulai memberi dampak yang baik terhadap sistem Peradilan di Indonesia. Organisasi yang pertama kali muncul adalah BALIE yang terdiri dari beberapa Advokat yang berasal dari Jawa Tengah yang kemudian disusul dengan

perkumpulan “Balai Advokat” di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dibentuk Organisasi Advokat yang bernama Persatuan Advokat Indonesia (PAI). Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah RI yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undangundang yang berhubungan dengan Lembaga Pengadilan dan pelaksanaan Peradilan di Indonesia.[287]

PAI merupakan cikal bakal dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang dibentuk pada pertemuan Advokat se-Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964.

Setelah berdirinya PERADIN, muncul gagasan dalam Pelaksanaan Kongres PERADIN ke-III pada tahun 1969 untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Gagasan tersebut kemudian mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PERADIN melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 Tanggal 26 Oktober 1970 Tentang Penetapan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku 28 Oktober 1970.

Pada tahun 1970-an, memasuki waktu tersebut terdapat perubahan konsep dalam pemberian bantuan hukum yang didorong dari kesadaran para Advokat tentang pentingnya pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang diberikan secara struktur yang mengilhami konsep bantuan hukum struktural untuk membela kaum

[287]Frans Hendra Winarta (Buku I), Op.cit, Hal.27.

yang lemah serta tertindas. Konsep ini dilatarbelakangi dengan berdirinya LBH Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution, dkk. Kemudian setelah LBH tersebut beroperasi selama satu dasawarsa, pada tanggal 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Desakan dalam pembuatan sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang adanya bantuan hukum sudah diutarakan sejak lama. Terlebih lagi, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah menginstruksikan untuk membuat satu undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum di Indonesia. Sayangnya tidak pernah ada undang-undang yang dibentuk, namun ditetapkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi sebuah awalan, sebuah Undang-Undang yang disusun secara teratur dalam menjelaskan tentang bantuan hukum. Adanya Undang-Undang ini menjadi suatu harapan dalam mewujudkan adanya keadilan dan persamaan bagi semua masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

Merujuk kepada peraturan di atas, dapat kita lihat jika UU No. 16 Tahun 2011 mengatur pembatasan atas pemberian bantuan hukum dengan hanya diperbolehkannya badan hukum untuk memberikan bantuan. Selain itu dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 dijelaskan jika pembatasan untuk organisasi bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum bukan untuk memberikan batasan atas hak konstitusional serta kemandirian masyarakat untuk

berorganisasi, tetapi ini merupakan sebuah strategi nasional untuk membentuk organisasi yang bisa bersikap profesional dan memiliki kemampuan bersaing agar mempermudah penerapan kerjasama serta keefektifan koordinasi baik itu dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat, maupun bagi sesama organisasi atau pemberi bantuan hukum.

Pemerintah telah mengatur tentang tata-cara pemberian dan penyaluran bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 dalam undang-undang tersebut. Maka dibuatlah "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum" yang di dalamnya pada Pasal 18 dan 19 diatur jika "pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBN dan APBD untuk daerah serta dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat".

Permohonan dan pemberian bantuan hukum juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan selain pendanaan untuk bantuan hukum, yang dijelaskan dalam "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15".

Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi suatu harapan bagi sejarah tentang bantuan hukum di Indonesia.

Walaupun beberapa penulis menilai bahwa masih ada beberapa hal yang perlu direvisi dan dikaji ulang pada Undang-Undang ini.

Pertama adalah pembatasan penerima bantuan hukum yang hanya berfokus pada masyarakat miskin. Dalam hal ini, ketidakmampuan perlu didefinisikan secara lebih luas. Hal ini seharusnya tidak hanya ketidakmampuan secara segi ekonomi namun juga pada bidang sosial, politik, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan hukum tidak terbatas pada ketidakmampuan secara finansial namun juga kelompok lain seperti anak-anak, perempuan, kelompok disabilitas, dan lainnya.

Kedua adalah tentang adanya kewenangan tanpa batas dari pihak penyelenggara bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pemerintah melalui KEMENKUMHAM adalah sattu-satunya pihak yang berwenang dalam melakukan penyelenggaraan bantuan hukum. Diantaranya adalah membuat suatu kebijakan (*regulating*), menerapkan (*implementing*), merumuskan anggaran (*budgeting*), dan melakukan pengawasan (*controlling*). Semua hal ini tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) karena kewenangan satu pihak menjadi rawan akan praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Ketiga adalah masalah dalam verifikasi dan akreditasi. Disini perlu ditekankan bahwa verifikasi dan akreditasi bukan sebagai legalisasi satu organisasi namun hanya merupakan dokumen persyaratan dalam mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah

melalui APBN. Proses verifikasi dan akreditasi tidak boleh menjadi penghalang bagi pemberian hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum. Seharusnya peraturan perundang-undangan memberikan jaminan pada lembaga bantuan hukum yang tidak menginginkan terlibat dalam proses verifikasi dan akreditasi tetap boleh untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan standar bantuan hukum.

Keempat adalah prosedur dalam pemerolehan bantuan hukum. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 menentukan syarat dan prosedur dalam pemberian bantuan hukum. Namun, sebaliknya kadang hak mendapatkan bantuan hukum digugurkan karena masalah administrasi.

Landasan terbentuknya uu bantuan hukum:

1. Landasan Filosofis.

   Landasan filosofis menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang NRI Tahun 1945. Suatu peraturan per Undang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslad, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis dan mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of*

life) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idde der gerechtigheid*), dan cita-cita kesusilaan (*idge der zedelijkheid*).[288] Makna filosofis akan pentingnya kemakmuran atau kesejahteraan akan mengacu pada nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersifat mendasar. Nilai-nilai dasar keberlakuan hukum dapat diwujudkan dengan terpenuhinya hak-hak bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang NRI Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.[289] Dengan demikian, secara filosofis adanya kewajiban negara dalam pengaturan bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi penting sebagai bentuk implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hakasasi warga negara untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

[288]I Gde Pantja Astawa and Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 77–81.

[289]Widhi Handoko. 2014. Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif Yogyakarta: Thafa Media.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perUndang-Undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*, *sociologische gelding*), apabila ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perUndang-Undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perUndang-Undangan yang dibuat akan diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perUndang-Undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*annerken nungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dimensi sosiologis ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Apabila dihubungkan dengan konsep pengaturan pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat, maka adanya bantuan hukum kepada masyarakat dapat menghindari terjadinya dugaan ketidakadilan maupun kesewenang-wenangan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara yuridis, apa yang diamanatkan Undang-Undang NRI Tahun 1945 mengandung arti landasan mendasar bagi lahirnya instrumen-instrumen hukum dalam politik hukum sebagai konsep negara hukum. Suatu peraturan perUndang-Undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan lahir.

Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, pengaturannya dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) yang menetapkan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, selanjutnya pada Ayat (2) menetapkan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat (1) menetapkan penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, selanjutnya pada Ayat (2) menetapkan Hak dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi hak atas pangan,

sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan/atau perumahan. Apabila dicermati dan dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 Ayat (1) dan (2), maka terdapat kriteria penerima bantuan hukum yang tidak sama sehingga menyebabkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut menjadi kabur dan berpotensi kesulitan dalam penerapannya.

Problematika hukum lainnya yaitu pada regulasi pengelolaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang ada saat ini dijumpai 2 (dua) lembaga yang mengelola bantuan hukum, yakni:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan badan peradilan yang ada di bawahnya, meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara dengan menggunakan tempat di pengadilan seluruh wilayah Indonesia (Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan).
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang saat ini telah diserahkan pengelolaannya kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia untuk menangani masalah hukum litigasi maupun non litigasi (Pasal 6 Ayat 2 UndangUndang Bantuan Hukum Jo. PP Nomor 2. 42 Tahun 2013 ttg Syarat dan Tata Pemberian Bantuan Hukum)

Penerapan adanya 2 (dua) lembaga mengelola bantuan hukum tersebut, maka Cara yang dapat menjelaskan persoalan secara tersendiri dalam hal pengelolaan keuangan negara, dimana dalam pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan efisien. Potensi terjadinya Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan 2 (dua) pendanaan dalam menangani perkara masyarakat miskin yaitu pendanaan dari Kementerian Hukum dan HAM dan sekaligus pendanaan dari Mahkamah Agung. Sebagai contoh OBH yang membela masyarakat miskin, di dalam prakteknya anggaran negara (APBN) yang dikucurkan kepada OBH melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk membela perkara dan begitu perkara masuk ke pengadilan, karena tidak tersambungnya program dengan bantuan hukum prodeo yang ada di Pengadilan, maka penerima bantuan hukum masih ditagih biaya perkara oleh OBH diantaranya untuk biaya saksi, biaya sumpah, biaya menghadirkan ahli, pemeriksaan setempat dan biaya lainnya. Kondisi ini menjadi ironis yang sepatutnya biaya bantuan hukum dipakai untuk biaya menjalankan kuasa termasuk biaya transportasi, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, namun pada kenyataannya bantuan hukum tersebut habis untuk biaya-biaya perkara di Pengadilan.

Pengelolaan bantuan hukum juga terkendala karena tidak terintegrasinya lembaga-lembaga pengelola bantuan hukum. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga seperti Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM maupun Advokat memiliki Undang-

Undangnya tersendiri dalam mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Mahkamah Agung RI memiliki peran penting dalam kemudahan akses bantuan hukum selain kegiatan yang sudah ada yakni Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan dan layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Dengan demikian diperlukan kajian yang mendalam terkait program pengelolaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan layanan bantuan hukum pada pengadilan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat mewujudkan peradilan Indonesia yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sesuai dengan topik pembahasan dan agar hasil dari penelitian ini dapat lebih terfokus, maka untuk memperoleh kajian tentang hakikat, esensi atau substansi dari pengelolaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan, hingga saat ini masih terdapat norma yang kabur mengenai kriteria penerima bantuan hukum, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Kementerian Hukum dan HAM serta terdapatnya 2 (dua) lembaga yang mengelola bantuan hukum kepada masyarakat miskin sehingga pengelolaan bantuan hukum menjadi tidak efektif dan efisien.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin,

masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan.

Aturan normatif tersebut tidak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum. Kelompok masyarakat yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum ini adalah masyarakat yang masuk kategori lemah dan miskin. Sebaliknya, proses penegakan hukum lebih cenderung berpihak pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi dan politik-kekuasaan.

Menyikapi beberapa problematika yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya lainnya belum efektif, maka sangat diperlukan upaya secara kongkrit dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Bantuan Hukum dimaksud adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan menjadi sebuah landasan yang kuat sejalan dengan prinsip hukum kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang harus dijunjung oleh sebuah negara hukum. Secara faktual, orang miskin atau kelompok orang miskin memiliki perbedaan mendasar di bidang ekonomi (kesejahteraan sosial). Dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma, diharapkan orang atau kelompok orang miskin tetap mendapatkan akses untuk memperoleh keadilan di bidang hukum. Bantuan hukum merupakan hak dari masyarakat miskin untuk memperoleh akses memperoleh keadilan sekaligus kewajiban negara mendukung program bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dengan cara dibiayai APBN maupun APBD.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa sesuai dengan amanah konstitusi, Negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan akses bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok orang miskin yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa langkah untuk menyempurnakan agar program bantuan hukum yang selama ini telah berjalan dapat berjalan lebih baik lagi. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperluas akses

keadilan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas yang merupakan program prioritas nasional.[290]

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.[291] Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum, namun juga terdapat peran berbagai institusi dan lembaga negara yang juga memiliki peran penting untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan bantuan hukum. Peran institusi atau lembaga pemerintahan tersebut

[290]Benny Riyanto. "Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI 11 Dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum

[291]IGN. Ridwan Widyadharma, 2010, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26.

dapat terlihat antara lain dalam kewenangan yang dimilikinya untuk membuka akses bantuan hukum khususnya bagi orang yang berhadapan dengan hukum seperti yang dimiliki oleh institusi Aparat Penegak Hukum (Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di peradilan, tetapi juga mencakupproses yang muncul ketika orang rakyat mengalami suatu masalah atau banyak/ ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hakhak mereka yang sudah dirampas.

Sepanjang pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat miskin selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang dibebani oleh prosedur membebani klien), dan membutuhkannya tidak yang berbelit-belit/tidak tidak digantungkan pada besar-kecilnya reward yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Hal ini sebagaimana dikatakan T. Mulya Lubis, bahwa pendekatan advokat bercirikan:

1. Individual,
2. Urban (perkotaan),
3. Pasif,
4. Legalistik,

5. Gerakan hukum (*legal movement*),
6. Persaman distribusi pelayanan (*equal distribution of services*).

Sedangkan pendekatan seorang pembela umum (aktivis *legal aid*) adalah:

1. Struktural (kolektif),
2. Urban-rural,
3. Aktif,
4. Orientasi legal dan non-legal,
5. Gerakan sosial (*social movement*),
6. Perubahan sosial.[292]

Realitas hukum yang kini kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infra struktur masyarakat yang ada. Sehingga dengan demikian, hukum itu sebenarnya merupakan supra sturktur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil interakasi di antara infra struktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan di antara infra struktur menunjukkan gejala yang timpang, maka hal ini akan semakin mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

Berbasis pada dialetik mengenai akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi si miskin, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengkhususan golongan yang memeroleh bantuan hukum demikian, bukan merupakan sebuah bentuk diskriminasi, namun justru merupakan bentuk keberpihakan yang progresif.

---

[292]Todung Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: Penerbit LP3ES, hlm. 116.

Kondisi miskin jika diteropong dari keadilan kesetiaan kepada hukum (*fidelity to law*), kewajiban politik (*political obligation*) hingga ketidakpatuhan sipil (*civil disobedience*) yang menimpa sebagian warga negara yang berhadapan dengan hukum bukan dipandang sebagai aspek keekonomian semata, namun lebih kepada kewajiban negara untuk memberikan rasa keadilan yang menjadi hak warga Negara.

Seringkali hak tersebut tidak terpenuhi atau bahkan terabaikan karena kondisi miskin tadi, namun negara tidak boleh membiarkan kondisi miskin menghalangi yang bersangkutan untuk mengakses keadilan. Pada kondisi kaya miskin yang demikian berbeda, tentu keadilan tidak boleh dimaknai 'sama rata sama rasa'[293] namun justru harus berpihak. Dalam hal ini keberlakuan hukum harus sama dalam kondisi normal, namun harus berbeda jika kondisinya juga berbeda. Dengan perkataan lain, keberadaan bantuan hukum gratis bagi si miskin merupakan perwujudan keseimbangan posisi yang diharapkan terjadi atas diri klien miskin ketika berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini tindakan advokasi yang dilakukan oleh advokat maupun paralegal dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap diri klien miskin tersebut diharapkan memberikan posisi yang seimbang.[294] atas keawaman klien dalam dunia hukum jika dibandingkan dengan para penegak hukum yang membidangi hukum dikesehariannya. Keberpihakan kepada kaum miskin yang berhadapan

[293]Muhammad Rustamaji and Dewi Gunawati. 2011. *Moot Court (Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum, Progresif)*. Surakarta: Mefi Caraka, hlm. 133.

[294]*Ibid*. hlm. 133.

dengan hukum dalam ruang sosial keIndonesiaan demikian, oleh Suteki dikatakan sangat logis apabila timur memiliki cara berhukum tersendiri meskipun yang sedang digunakan adalah hukum barat. Pada akhirnya karakter oriental akan tetap membalut pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yang acapkali melompat di ruang sosialnya (*ubi societas ibi ius*).

Beberapa langkah strategis dapat ditempuh untuk mewujudkan tercapai keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam penyelenggaran pelayanan bantuan hukum tersebut yaitu:

1. Instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum sangat diperlukan adanya system verifikasi yang baik untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan hukum secara khusus bagi satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang diperlukan oleh Negara dalam menjalankan Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat misikin. Pemerintah juga melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum harus juga mensyaratkan suatu kriteria yang sesuai pada setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang akan melaksanakan pemberian bantuan hukum. Hal ini sangat penting sekali karena berkaitan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum diberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan Advokat dan Paralegalnya.
2. Apabila memungkinkan dikaukan setiap tahun untuk memverifikasi dan mengakreditasi setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) guna

memberikan peningkatan atau kwalitas pemberian layanan Bantuan Hukum yang tepat sasaran dan sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksnaaannya. Verifikasi dan Akreditasi ini sangat penting untuk menghasilkan OBH yang berkualitas, namun bukan berarti harus mengurangi syarat-syarat penting. Akan tetapi dapat saja dilakukan cara lain agar calon-calon OBH dapat lulus dalam proses Verifikasi dan Akreditasi, misalkan dengan membuka pendaftaran calon OBH jauh sebelum proses Verifikasi dan Akreditasi berjalan, dimana dengan pendaftaran tersebut, maka akan ada ruang komunikasi yang sangat panjang tentang apa yang harus dipenuhi dan harus dilengkapi agar pada saat berjalannya Verifikasi dan Akreditasi para calon kelulusan. melakukan kerja calon agar dapat OBH dapat memenuhi syarat Juga memungkinkan untuk pendampingan terhadap kerja OBH yang sudah berjalan, disesuaikan dengan kebutuhan Verifikasi dan Akreditasi.

3. Cara ini diyakini akan mampu menghasilkan banyaknya jumlah OBH yang lulus Verifikasi dan Akreditasi, karena mampu memenuhi syarat-syarat yang diharuskan terpenuhi oleh setiap OBH. Ini secara otomatis akan membantu terpenuhinya kebutuhan OBH dalam memberi bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum yang cukup banyak.
4. Perlu perubahan sistem pemberian bantuan hukum, pada kondisi saat ini telebih dalam pemberian sosialisasi bantuan hukum kepada

masyarakat miskin harus semakin ditingkatkan seperti memperluas cakupan penerima bantuan hukum, tidak hanya untuk orang miskin secara ekonomi tetapi juga orang/kelompok masyarakat yang rentan.

5. Layanan bantuan hukum juga harus bisa mengakomodir kebutuhan penyelesaian perkara sebelum persidangan seperti diversi dan praperadilan serta Perluasan bantuan hukum juga bisa melingkupi seperti kebutuhan jika korban/pencari keadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan, visum, ahli bahasa dan/atau psikolog juga dibutuhkannya rumah Aman (*Drop In Center*) Khusus Korban Anak.
6. Perlu adanya pemantapan pada proses pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi yang melingkupi proses diluar peradilan yang mencakup beberapa kegiatan dari awal proses seperti: (1) investigasi (2) konsultasi, (3) konseling, (4) proses peradilan.
7. Apabila memungkinkan Penerima Bantuan hukum tidak perlu menyediakan SKTM, untuk menerima bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum. Dan apabila juga diharuskan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa atau Lurah hal tersebut diperolehnya tidak berbelit-belit.
8. Perlu juga mendorong agar pemerintah daeah menganggarkan bantuan hukum ini dalam ABPD mereka.
9. Mendorong pemerintah daerah juga untuk memberikan bantuan bagi Organisasi Bantuan Hukum guna kesekretariatan.

10. Pentingnya pelatihan bagi Oraganisasi Bantuan Hukum (OBH) masing yang akan memberikan bantuan hukum secara gratis dan khususnya ada pelatihan bagi Paralegal yang melakukan pendampingan bantuan hukum secara gratis.
11. Memaksimalkan fungsi dan manajemen pemberian bantuan hukum yang tidak ribet, bertele-tele serta memberikan kemudahan akses-akses kepada masyarakat untuk memohonkan bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan terleih juga memberikan kemudahan bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan Bantuan Hukum dan sistem pelaporan yang sederhana, singkat dan mudah untuk dipahami.
12. Untuk semua hal di atas sangat diperlukan dengan segera segera pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan standar pedoman pelayanan bantuan hukum agar bisa dipahami para penerima bantuan hukum.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERBASIS KEADILAN PANCASILA

A. Kajian Perbandingan dengan Beberapa Negara Asing

Sejarah munculnya konsep *pro bono* bagi advokat dapat ditelusuri dari zaman Athena kuno. Sebelum era Draco,[295] hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta persidangan. Pihak yang dirugikan tersebut, sebagai penggugat, dapat meminta dilaksanakannya persidangan di hadapan:

1. Magistrat Yudisial *(Judicial Magistrate),* di mana penggugat tersebut menjadi pengacara bagi dirinya sendiri; atau
2. Pengadilan Areopagus *(Court of the Aeropagus),* dimana penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan, dengan ketentuan bahwa anggota pengadilan tersebut hanya bertindak sebagai "penyambung kata", bukan pendamping atau penasihat dari penggugat.[296]

Pada era Draco, terjadi reformasi hukum yang salah satunya adalah diperbolehkannya penggugat untuk bersidang di Pengadilan Aeropagus secara mandiri, tanpa diwakili anggota pengadilan. Pada masa ini, penduduk Athena juga diperbolehkan untuk menangkap dan

[295]Draco adalah legislator Athena yang memperkenalkan Hukum Drakonian *(Draconian Laws),* yang diklaim oleh Aristoteles sebagai hukum tertulis pertama di Athena. (lihat*Encyclopedia Britannica, "Draconian Laws – Ancient Greek Law*", https://www.britannica.com/topic/Draconian-laws, diakses pada 08/03/2022.

[296]Chorust, Anton-Herman. 1954. "Legal Profession in Ancient Athens," *Notre Dame Law Review,* Vol. 29, No. 3, hlm. 340.

membawa pelaku pembunuhan yang melarikan diri dari pengasingan ke hadapan pengadilan. Dalam persidangan, pihak yang melakukan penangkapan tersebut yang melakukan penuntutan.[297]Di era selanjutnya, tepatnya di era Solon,[298] penduduk Athena diperbolehkan untuk menuntut siapa pun yang dianggap melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat.[299]

Sepanjang ketiga era yang disebutkan di atas, penduduk Athena yang berperkara di pengadilan harus menjalani persidangan secara mandiri. Kewajiban ini didasarkan pada pemikiran yang diutarakan oleh Plato, bahwa negara tidak akan melakukan apapun bagi penduduknya selama hal tersebut dapat dilakukan sendiri olehnya. Dengan demikian, penduduk yang berperkara di pengadilan dilarang untuk diwakili pihak lain, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan perkaranya sendiri.[300]

Sebelum memasuki era Solon, larangan tersebut tidak menimbulkan masalah karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai proses persidangan di hadapan magistrat yudisial atau Pengadilan Areopagus. Proses persidangan berjalan informal, dan tidak ada kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan klaim dalam suatu perkara.[301]

---

[297]*Ibid.*

[298]Solon adalah seorang negarawan Athena yang menciptakan Hukum Solon *(Solon's Law)* untuk menggantikan Hukum Drakonian. (lihat*Encyclopedia Britannica, "Solon's laws – Greek History", https://www.britannica.com/topic/Solonslaws,* diakses pada 08/03/2022.

[299]Chroust, *Op.Cit*., hlm. 341.

[300]*Ibid.*

[301]Chroust, *Op.Cit*., hlm. 342.

Namun, di era Solon, magistrat yudisial serta Pengadilan Areopagus digantikan dengan pengadilan sistem juri yang dikenal sebagai pengadilan heliastik *(heliastic court).* Pada sistem pengadilan ini, para pihak yang berperkara harus menyampaikan argumen mereka dalam rangka meyakinkan sekitar 500 orang juri untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kepentingannya.[302]

Pemberlakuan sistem baru di atas menimbulkan kebutuhan akan sebuah pengetahuan dan keahlian tertentu, setidaknya dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan. Oleh karenanya, para pihak yang berperkara, namun tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan tersebut, mulai diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan proses persidangannya. Pihak yang memberikan bantuan tersebut dapat bertindak sebagai:

1. *Synegoros,* yaitu pihak yang berbicara atas nama pihak yang berperkara untuk keseluruhan proses persidangan;
2. *Syndic,* yaitu pihak yang hanya memberikan bantuan pada saat penyampaian kesimpulan di pengadilan atas nama pihak yang berperkara; atau
3. *Logographer,* yaitu pihak yang hanya menuliskan argumen bagi pihak yang berperkara karena argumen tersebut akan disampaikan secara mandiri oleh pihak berperkara.[303]

Synegoros atau *syndic* bisa merupakan keluarga, teman dekat, tetangga atau anggota dari "klub" yang diikuti oleh pihak yang

[302]Chroust, *Op.Cit.*, hlm. 342 dan 344.

[303]Chroust, *Op.Cit.*, hlm. 345.

berperkara.[304] Lama-kelamaan, kegiatan mewakili pihak yang berperkara di pengadilan dianggap sebagai profesi, yang dikenal dengan sebutan "advokat".[305]

Pada awalnya, advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya. Larangan ini didasari pemikiran bahwa kewajiban pembayaran hanya akan menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin yang tidak dapat membayar biaya jasa advokat. Kewajiban pembayaran jasa tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip untuk saling membantu antar penduduk Athena, yang seharusnya tidak dirusak dengan embel-embel profesi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang. Sayangnya, larangan di atas tidak terlaksana dengan efektif. Akibatnya, pembayaran jasa advokat menjadi sebuah hal yang lumrah.[306]

Terlepas dari kesan negatif yang ditimbulkannya, praktik pembayaran jasa advokat di masa Athena kuno ini lah yang mendorong lahirnya konsep bantuan hukum. Secara khusus, konsep tersebut mulai terlihat melalui tindakan dari berbagai "klub" di masa Athena kuno yang menyediakan bantuan agar para anggotanya yang tidak mampu mendapatkan advokat yang berpengalaman saat berperkara.[307]

Memasuki Abad Pertengahan, kaum Kristiani diketahui gencar memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk kedermawanan *(charity)* mereka. Pemberian jasa hukum secara cuma-

[304]Chroust, *Op.Cit.*, hlm. 352.
[305]*Ibid.*
[306]Chroust, *Op.Cit.*, hlm. 353-354.
[307]Lamin Khadar. 2016. *"The Growth of Pro bono in Europe," New York: PILnet,* hlm. 29.

cuma tersebut dikenal dengan sebutan *"pro deo"* atau "untuk Tuhan". Agar lebih terorganisasi, Gereja turut andil dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Secara garis besar, bantuan hukum dari Gereja diberikan dalam bentuk berikut:[308]

1. Gereja mempekerjakan seseorang untuk mewakili orang miskin dalam bersidang di pengadilan gerejawi *(ecclesiastical courts)* dan
2. Gereja memerintahkan para magistrat untuk membebaskan biaya pengadilan bagi orang miskin, dan terkadang menunjuk advokat swasta untuk mewakili pihak yang berperkara secara cuma-cuma dalam nama Tuhan.[309]

Pada abad ketiga belas, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dalam beragama, melainkan kewajiban sebagai warga negara atau kewajiban profesional. Para pelaku profesi hukum di Eropa mulai melakukan praktik pro bono secara terorganisasi.[310] Bahkan, para pelaku profesi hukum tersebut menganggap pemberian bantuan hukum kepada orang yang secara sosial dan ekonomi tidak mampu tanpa menerima imbalan adalah bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.[311] Di abad kesembilan belas, praktik *pro bono* yang terorganisasi semakin menyebar di Eropa. Penyebaran ini merupakan hasil dari beragam kegiatan kerja sama yang dijalin oleh para pengacara dengan berbagai pihak, seperti universitas,

---

[308]Huls, Nick. 1994. *"From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands," Maryland Journal of Contemporary Legal Issues* 5, hlm. 333.

[309]*Huls,* Op.Cit., 353.

[310]Cappelletti, Mauro, and Gordley, James. 1972. *"Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme," Stanford Law Review,* hlm. 353.

[311]Brundage, James A. 1988. *"Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages," Journal of Legal History* 9, hlm. 175.

pemerintahan lokal, organisasi kemasyarakatan, persatuan dagang, partai politik dan gereja, dalam mengatasi masalah kebutuhan hukum.[312] Namun, sejak awal abad kedua puluh di Eropa, bantuan hukum dan akses pada keadilan *(access to justice)* dianggap sebagai hak sosial-politik yang harus dijamin oleh negara. Akibatnya, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dari sebuah profesi, melainkan sebuah pekerjaan dari pengacara yang secara khusus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.[313]

Praktik *pro bono* yang bebas dari campur tangan pemerintah mulai kembali marak di Eropa tahun 1990-an. Salah satu faktor yang mempengaruhi bangkitnya praktik *pro bono* di Eropa adalah institusionalisasi praktik *pro bono* oleh para kantor hukum di Amerika Serikat dan Inggris.[314]

Praktik *pro bono* yang terorganisir di Amerika Serikat sebenarnya baru muncul tahun 1960-an, sebagai sebuah dampak dari gerakan hukum kepentingan publik *(public interest law movement).* Di masa ini, kantor hukum yang bergerak di bidang hukum kepentingan publik dianggap lebih menarik dibanding kantor hukum yang bersifat komersial. Akhirnya, para mahasiswa hukum tidak banyak yang bergabung dengan kantor hukum komersial.[315]

---

[312] Khadar, *Op.Cit*. hlm. 10.
[313] *Ibid.*
[314] Khadar. *Op.Cit*., hlm. 12.
[315] Boutcher, Steven Allen*, 2010, "The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs*," Dissertation submitted *in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology*, hlm. 21-22.

Untuk menanggulangi keadaan tersebut, para kantor hukum komersial di Amerika Serikat mulai mengadakan program *pro bono* di kantor mereka. Setidaknya ada 24 kantor hukum besar di Amerika Serikat yang memiliki program tersebut di tahun 1970- an.[316] Beberapa dari kantor hukum tersebut bahkan mendirikan unit khusus untuk menangani kasus-kasus secara *pro bono* di kantor mereka.[317]

Pada tahun 1983, *American Bar Association* mewajibkan seluruh pengacara Amerika Serikat untuk memberikan jasa hukum kepada orang yang memiliki keterbatasan atau untuk kelompok atau organisasi yang mengusung misi sosial, tanpa memungut biaya atau dengan biaya yang sudah dikurangi. Satu dekade kemudian, kewajiban tersebut direvisi dengan menambahkan ketentuan bahwa jasa *pro bono* harus diberikan setidaknya 50 jam setiap tahun.[318]

Sedangkan di Inggris, perkembangan praktik *pro bono* sudah diusahakan sejak awal tahun 1990-an dengan adanya upaya pemberlakuan kewajiban yang serupa dengan ketentuan *pro bono* dari *American Bar Association*. Namun, upaya tersebut tidak mendapat sambutan yang baik, hingga akhirnya *Solicitors Pro Bono Group* (sekarang dikenal sebagai *Law Works*) dibentuk. Memulai kegiatannya sejak tahun 1996, *Solicitors Pro Bono Group* berkembang dengan cepat dan mempunyai 130 anggota kantor hukum pada tahun 2000. Sekitar 40% dari jumlah anggota tersebut adalah kantor hukum ternama, dan

[316]Cummings, Scott L., 2004. *"The Politics of Pro Bono," UCLA Law Review* 52.1, hlm. 36.

[317]Handler, Joel F., 1978. *Ellen Jane Hollingsworth, and Howard s. Erlanger, "Lawyers and the Pursuit of Legal Rights," New York: Academic Press*, hlm. 123.

[318]Boutcher, *Op.Cit*., hlm. 24.

beberapa di antaranya mempekerjakan manager dan direktur khusus untuk bidang *pro bono*.[319]

Budaya *pro bono* yang ada di Amerika Serikat dan Inggris mulai menyebar ke berbagai belahan dunia seiring dengan ekspansi usaha mereka. Ketika membuka cabang di negara lain, para kantor hukum asal Amerika Serikat dan Inggris tersebut mendorong para pengacara di kantor cabang mereka untuk turut melaksanakan komitmen *pro bono*.[320]

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia pada permulaan abad kedua puluh, tepatnya di tahun 1910. Beriringan dengan hal tersebut, konsep *pro bono* pun mulai dikenal di Hindia Belanda, walaupun bantuan hukum tersebut tidak berlaku untuk golongan Bumi Putera.[321] Contoh konkrit konsep *pro bono* di masa Hindia Belanda tersebut tertuang dalam Pasal 250 *Herzien Inlandsch Reglemen* (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dengan ancaman hukuman mati. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum tersebut wajib memberikan jasanya secara cuma-cuma.

Setelah merdeka, Indonesia memposisikan diri sebagai negara hukum dalam konstitusinya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ("UUD 1945").[322] Sebagai negara hukum, Indonesia

---

[319]Boon, Andrew, and Avis Whyte, 1999*, "'Charity and Beating Begins at Home': The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico," Legal Ethics 2.2, hlm*. 176 dan 183.

[320]Khadar, *Op.Cit*. hlm. 17.

[321] Frans Hendra Winarta. 2009. *Pro bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum.* PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29.

[322] Suhayati, Monika, "*Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat"*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 2, (Desember, 2012), hlm. 227.

mengakui hak setiap warga negaranya untuk dianggap sama di hadapan hukum serta hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[323] Salah satu upaya untuk memenuhi fitrah negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan *(access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* adalah pemberian bantuan hukum.[324] Dalam perkembangannya, upaya menjamin pemenuhan hak warga negara terhadap keadilan tidak hanya melekat pada negara semata. Advokat, sebagai profesi yang mulia, pun dianggap mempunyai kewajiban tersebut.[325] Namun, kewajiban tersebut belum terformalisasi hingga akhirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") disahkan. Secara spesifik, Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Istilah "bantuan hukum cuma-cuma" ini lah yang sebenarnya dianggap sebagai alih bahasa dari istilah *"pro bono"* di Indonesia.

Meski sudah enam belas tahun UU Advokat diundangkan, termasuk kewajiban pro bono yang ada di dalamnya, masih sulit ditemukan data yang bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaksanaan pro bono di Indonesia sehingga banyak narasi yang

[323] Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945.
[324] Suhayati, *Op.Cit*., hlm. 237.
[325] Ibid, hlm. 238.

berkembang, seperti: rendahnya kultur pro bono di Indonesia dan belum optimalnya peran organisasi advokat.[326]

Dalam rangka mendapatkan data mengenai implementasi pro bono di Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pun berusaha untuk melakukan survei dengan melibatkan advokat firma hukum, pengacara publik dan *in-house counsel* di beberapa kota besar Indonesia tahun lalu. Berdasarkan survei ini, ditemukan setidaknya tiga isu utama terkait implementasi *pro bono*, yaitu:[327]

1. Pemahaman yang tumpang tindih antara bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah dengan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat, atau *pro bono*;
2. Belum maksimalnya sistem pelaporan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan *pro bono*; dan
3. Kurang meratanya persebaran advokat di Indonesia, yang sedikit banyak diperburuk dengan jauhnya jarak tempuh dan/atau kendala biaya serta minimnya sisa waktu advokat untuk menjalankan kewajiban *pro bono* karena tingginya beban kerja di kantor.

Selain daripada itu, survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung meminta bantuan hukum ke lembaga bantuan

[326]Hukumonline.com, "Apa Kabar *Pro Bono* Kita? Potret Praktik *Pro Bono* di Indonesia oleh: Gita Nadia Pramesa," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c04cffa1da98/apa-kabar-pro-bono-kita-potret-praktik-pro-bono-diindonesia-oleh--gita-nadia-pramesa/, diakses pada 08/03/2022

[327]*Ibid.*

hukum dibandingkan advokat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:[328]

1. Anggapan bahwa lembaga bantuan hukum lebih berorientasi pada klien, sedangkan advokat firma hukum lebih berorientasi pada materi atau uang;
2. Keraguan masyarakat pada kualitas pelayanan *pro bono*; dan
3. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hukum.

Terlepas dari berbagai kendala tersebut, survei menunjukkan bahwa para advokat Indonesia sebenarnya masih menyambut positif keberadaan *pro bono* dan tetap berusaha mendukung pelaksanaan *pro bono*. Hanya saja, banyak hal yang memang masih harus diperbaiki dan perbaikan regulasi menjadi salah satu target yang utama. Selain regulasi, organisasi advokat juga diharapkan lebih aktif dalam mendorong anggotanya untuk melakukan *pro bono*, menjalankan sistem pelaporan, pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif, serta melakukan sosialisasi mengenai *pro bono* kepada advokat dan masyarakat secara umum.[329]

Pada Tahun 1975 Lembaga Bantuan Hukum di Belanda telah menangani kira-kira sejumlah 60.000 perkara yang mencakup bantuan konsultasi hukum maupun berhadapan dengan konflik hukum, hal tersebut akibat dari cara memberikan bantuan hukum yang mudah tercapai dan hampir tanpa biaya. Bantuan tersebut dilakukan oleh mahasiswa hukum tingkat akhir yang dibimbing oleh advokat yang

[328] *Ibid*
[329] *Ibid*

sudah berpengalaman. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum di Belanda, bertujuan antara lain:

1. Memberikan bantuan hukum kepada pribadi yang tidak ditangani oleh advokat biasa;
2. Memberikan bantuan hukum kepada kelompok sosial yang bermasalah dengan hukum;
3. Mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sistem hukum formil;
4. Mengubah struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan permasalahan hukum baru.[330]

Menurut ketentuan Bantuan Hukum Belanda, penerima bantuan hukum merupakan orang atau badan yang kemampuan kekuangan atau kekayaannya tidak mencukupi jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai publik. Lembaga Bantuan Hukum di Belanda akan menangani semua jenis perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180 Euro.[331]

Bantuan hukum di Australia dibentuk dan dibiayai sebesar $AU9.700.000 oleh Negara Persemakmuran serta $AU20.400.000 dari sumber dana lain[332] yang pelaksanaannya dilakukan secara sinergi dengan Komisi Bantuan Hukum dan Pengacara Profesional atau

[330]Schuyt, K. & Sloot B. 1976. *De Weg Naar Her Recht, Deventer: Kluwer*, hlm. 7, dan 39-40

[331]Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 26.

[332]*Loc.cit*

Pengacara Sipil.[333] Australia tidak mencantumkan hak bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam undang-undang federalnya, namun diakui dalam yurisprudensi dan undangundang negara bagian yang menciptakan komisis bantuan hukum.[334]

Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus diuji melalui tiga kriteria, yakni:

1. Uji kriteria pendapatan;
2. Uji kelayakan perkara; dan
3. Uji keriteria jenis perkara.[335]

Dalam pengujian tersebut, pemohon akan diuji dalam aspek tingkat kemungkinan menang, perbandingan efesiensi biaya berbanding dengan manfaat pemohon, dan kelayakan biaya.[336] Bantuan hukum di Thailand dibiayai oleh negara sebesar US$1,3 juta pertahun[337] dan dilaksanakan oleh pengadilan, kantor perdana menteri, kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand. Masing-masing lembaga tersebut menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin. *Section* 242 Konstitusi Thailand mengaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Thailand juga telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang

[333]Goldie, Cassandra. *Legal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote Access to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights*, Makalah ini disampaikan pada seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006, hlm. 3-4.

[334]*Ibid*

[335]*Loc.cit*

[336]*Loc.cit*

[337] Ibid, hlm. 29

memberikan jaminan untuk hak tersebut. Namun, tidak diturunkan dalam peraturan perundang-undangan.[338]

Di Taiwan kondisinya lebih bervariasi, bantuan hukum dapat dilakukan dalam wadah sebuah organisasi, yaitu organisasi-organisasi yang berada di pemerintahan daerah, asosiasi-asosiasi pengacara tingkat lokal, dan organisasi-organisasi non pemerintah. Pada tahun 2004 Taiwan memiliki undang-undang bantuan hukum (*Legal Aid Act*). Berdasar undang-undang tersebut dibentuk Yayasan Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan yang merata dan mewujudkan sumber daya yang terintegrasi serta mengatur pendanaan secara lebih efektif. Ada tiga alasan pokok keluarnya undang-undang tersebut, yaitu:

1. Biaya pengacara tidak dapat dijangkau oleh masyarakat secara umum,
2. Biaya putusan pengadilan yang sangat tinggi sehingga tidak terjangkau masyarakat yang tidak mampu dan
3. Adanya kewajiban untuk menyetorkan uang jaminan yang besarnya sepertiga dari nilai eksekusi. Untuk mengatasi hal tersebut negara hadir tidak hanya sebagai regulator, akan tetapi juga aktor dan fasilitator.[339]

Pasal 173 *Criminal Procedure Code* mewajibkan pengadilan untuk menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa

[338]*Ibid*, hlm. 29-30

[339]Jerry Cheng. 2006. *Legal Aid Movement in Taiwan and Its Present Status*, Makalah Seminar Internasional Tentang "Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinan dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006, hal 5-6.

tersebut adalah anak. Lembaga Bantuan hukum di Thailand menangani semua jenis perkara.[340]

Pada negara Inggris, kelayakan yaitu pemenuhan syarat untuk bantuan hukum akan tergantung pada: jenis kasus dan keadaan keuangan. Untuk kasus perdata (non-pidana) yaitu mencakup hal-hal seperti utang, keluarga atau masalah perumahan hanya perlu menunjukkan tidak mampu membayar biaya hukum dan masalahnya serius. Pada umumnya calon klien harus memberikan perincian dan bukti penghasilan, manfaat, tabungan dan properti pemohon batuan hukum, dan orang-orang dari pasangan calon klien. Jika berusia di bawah 18 tahun, perlu memberikan informasi tentang penghasilan orang tua atau wali.

Tetapi untuk kasus-kasus tertentu situasi keuangan calon klien tidak diperhitungkan dalam hal seperti: Tribunal kesehatan mental; anak-anak dalam perawatan; dan penculikan anak. Hal menarik dari bantuan hukum di Inggris, penerima bantuan hukum dapat membayar sebagaian biaya kasus. Biaya tersebut dapat berupa: membayar sebagian biaya di muka atau membayar kembali sebagian biaya jika orang yang berperkara tersebut memenangkan uang atau properti dari kasus.

Terdapat pula nasihat hukum gratis untuk orang setelah ditangkap dan sebelum ditanyai di kantor polisi. Jalur untuk ini adalah:

[340]Pasal 173 *Criminal Procedure Code* mewajibkan pengadilan untuk menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa tersebut adalah anak. Lembaga Bantuan hukum di Thailand menangani semua jenis perkara.

1. Meminta “pengacara tugas” kantor polisi yang tersedia 24 jam sehari dan independen dari polisi;
2. Memberi tahu polisi, bahwa seseorang tersebut membutuhkan nasihat hukum, kemudian polisi akan menghubungi Pusat Panggilan Pengacara Pembela (*Defence Solicitor Call Centre /DSCC*);
3. Meminta polisi untuk menghubungi pengacara.

Mekanisme ini tersedia karena polisi tidak dapat menginterogasi sampai orang mendapatkan nasihat hukum. Terdapat beberapa pengecualian untuk kasus-kasus serius seperti terorisme tetapi hanya jika seorang pejabat senior setuju.

Bantuan hukum juga diperoleh apabila orang dapat membuktikan ia atau anak-anaknya telah menjadi korban pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mampu membayar biaya hukum. Bukti ini tidak harus didapatkan sebelum berbicara dengan pengacara bantuan hukum atau Nasihat Hukum Sipil (CLA), tetapi mereka harus melihatnya sebelum memutuskan apakah orang tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum. Hal yang masuk kategori kekerasan domestik yang dapat mengakses bantuan hukum adalah:

1. Pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga. Bukti tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat diminta dari: pengadilan, polisi, konferensi penilaian risiko multi-agensi (MARAC), layanan social, seorang profesional kesehatan, misalnya seorang dokter, perawat, bidan, psikolog atau pengunjung Kesehatan, seorang

manajer perlindungan, layanan dukungan kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

2. Kontrol keuangan, misalnya dihentikan dari mengakses rekening bank bersama.

Membandingkan layanan bantuan hukum (oleh negara) antara Indonesia dengan Afrika Selatan mungkin dapat dianggap tidak berimbang. Afrika Selatan sudah memulai program bantuan hukum ini melalui *Legal Aid Board* sejak tahun 1969 (*Legal Aid* Act No. 22 of 1969) dan mulai dilaksanakan pada tahun 1971. Dari segi dana yang dialokasikan oleh negara, Afrika Selatan mengalokasikan 1,5 milyar Rand (Rp 1,5 trilyun) untuk bantuan hukum dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22 juta jiwa (sekitar Rp 68.000,00 per kapita penduduk miskin). Sementara, Indonesia dengan anggaran bantuan hukum sekitar Rp 48 milyar dan penduduk miskin sekitar 28 juta jiwa, alokasi anggaran bantuan hukum per kapita penduduk miskin hanya sekitar Rp 1.700,00 saja. Meski demikian, kita bisa belajar banyak dari bagaimana bantuan hukum Afrika Selatan dirumuskan dan diimplementasikan.[341]

Kebijakan bantuan hukum sudah lahir pada saat Afrika Selatan masih di bawah sistem *apartheid*. Saat itu, layanan bantuan hukum disediakan oleh negara dengan anggaran yang sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi warga kulit putih. Pada tahun 1994 dengan lahirnya konstitusi baru, layanan bantuan hukum dapat dinikmati oleh warga kulit hitam. Sistem yang digunakan juga berubah dari sebelumnya

[341]Donny Ardianto. 2017. *Penyediaan Bantuan Hukum di Afrika Selatan: Perbandingan dengan Indonesia*, buletin bantuan hukum edisi 03 2017, hlm. 22.

menggunakan sistem Inggris *(judicare)*, di mana bantuan hukum dilakukan oleh pengacara privat atas rujukan dari Legal Aid Board, menjadi layanan bantuan hukum yang lebih variatif dan sistematis.[342]

Sepanjang tahun 1971 hingga awal 1990-an, kebutuhan layanan bantuan hukum maupun anggaran bantuan hukum terus meningkat. Sistem *judicare* kemudian dianggap tidak lagi efisien dari segi anggaran. Dengan sulitnya kontrol terhadap biaya yang diajukan oleh pengacara privat ketika memberikan bantuan hukum, total biaya bantuan hukum menjadi sangat tinggi. Runtuhnya rezim *apartheid* pada tahun 1994 membuka ruang untuk membangun sistem bantuan hukum yang baru. Berbagai uji coba terhadap alternatif-alternatif sistem/ mekanisme bantuan hukum yang ada terus dilakukan, hingga akhirnya pada tahun 1997 pemerintah memutuskan untuk mengutamakan penggunaan model pengacara publik yang direkrut dan bekerja untuk *Legal Aid Board*. Setelah itu, pemerintah membentuk pula kantor-kantor pengacara publik yang diberi nama *Justice Centre* di berbagai daerah di Afrika Selatan. Hal ini diputuskan berdasarkan pengalaman Afrika Selatan sendiri, bahwa skema bantuan hukum nasional tidak akan berhasil apabila pengacara yang memberikan layanan bantuan hukum tidak memperoleh imbalan yang memadai.[343]

Pemerintah tetap mendorong tradisi *pro bono* di Afrika Selatan. Sebuah organisasi bernama *probono.org* berperan sebagai *clearing house* yang menghubungkan sekaligus menyediakan pengacara yang

[342]*Ibid*, hlm. 22-23.
[343]*Ibid*, hlm. 23

hendak melakukan *pro bono* dengan warga yang membutuhkan jasa hukum. Pemerintah juga mempertahankan model rujukan kasus ke pengacara privat di area di mana tidak terdapat *Justice Centres.* Demikian juga bila *Justice Centres* tidak dapat menangani perkara tersebut, baik dengan alasan logistik maupun etik, seperti misalnya konflik kepentingan maupun keterbatasan kapasitas atau pengalaman.[344]

Model lainnya yang juga terus dikembangkan adalah dengan merekrut dan menggaji pengacara magang untuk memberikan layanan bantuan hukum di *Satellite Office* (pos khusus yang dimiliki *Justice Centres*, semacam LBH Pos bagi LBH Kantor) dan daerah pedesaan. Bagaimanapun juga, dana yang dibutuhkan merekrut dan menggaji pengacara magang ini lebih murah dibanding dengan biaya untuk membentuk *Justice Centre* baru dan membayar gaji pengacara.[345]

Pada tahun 2014, lahir UU Bantuan Hukum baru yaitu Act 39 of 2014 yang semakin mempertegas model bantuan hukum yang mengutamakan *Justice Centre* sebagai pemberi layanan bantuan hukum dengan pengacara publik yang digaji oleh negara. Sampai saat ini terdapat 64 *Justice Centre serta 64 Satellite Offices* di seluruh wilayah Afrika Selatan dengan 1,057 pengacara permanen, 578 pengacara kontrak, 333 manajer, dan 168 paralegal. Meski demikian, model-model pemberian layanan bantuan hukum lainnya tetap dijalankan sebagai

[344]*Ibid*
[345]*Ibid*

pelengkap dan menutup kekurangan bantuan hukum yang sudah ada dengan *sistem in-house lawyer*.[346]

Peran paralegal di tingkat komunitas juga diakui oleh sistem bantuan hukum Afrika Selatan. Banyak organisasi yang berbasis pada kerjakerja paralegal komunitas yang memberikan akses terhadap keadilan dengan mendidik masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta melatih paralegal untuk memberikan nasihat hukum. Dari sekitar 350 organisasi komunitas, salah satunya adalah Orange *Farm Human RightsAdvice Centre* yang berjarak kurang lebih 45 km dari Johannesburg. Seperti halnya *Community Advice Offices* lainnya di Afrika Selatan, mereka menjadi pelengkap bagi skema layanan bantuan hukum berbasis pengacara konvensional. Dengan basis komunitas, mereka memainkan peran penting dalam memberikan informasi dan nasihat dasar, serta memberikan rujukan ke layanan bantuan hukum berbasis pengacara. Di tingkat nasional, organisasi bantuan hukum berbasis komunitas ini telah membentuk *The National Association for the Development of Community Advice Offices* (NADCAO). Asosiasi ini dibangun untuk membantu pengembangan dan pendanaan lebih dari 350 *Community Advice Offices* di negara tersebut dengan pelatihan dan penggalangan dana.

Di samping model-model layanan bantuan hukum di atas, beberapa model layanan juga terus dikembangkan di Afrika Selatan dalam bentuk pendanaan negara untuk kerja-kerja: litigasi kepentingan

[346]*Ibid*, hlm. 24.

publik *(public interest litigation)*, klinik hukum universitas, serta layanan nasihat hukum melalui telepon. Bisa kita lihat bahwa Afrika Selatan berpegang pada prinsip bahwa tidak ada model sistem bantuan hukum yang bersifat paripurna. Masing-masing model atau sistem layanan bantuan hukum memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dengan dasar itu, eksperimen-eksperimen piloting terus dilakukan di Afrika Selatan terhadap berbagai model layanan bantuan hukum yang ada.[347]

Tahun depan, implementasi UU bantuan Hukum di Indonesia sudah memasuki tahun kelima. Sudah waktunya pula bagi kita untuk melihat lebih dalam, melakukan refleksi, evaluasi, dan reformasi. Sistem rujukan *(referral)* kepada pemberi bantuan hukum yang terakreditasi (OBH) mungkin sudah saatnya dilengkapi juga dengan sistem *in house lawyer*. Advokat bantuan hukum *in-house* ini bakal lebih memastikan kualitas layanan, sekaligus memberi *benchmark* bagi advokat yang bekerja di OBH. Selain itu, pembentukan komisi khusus bantuan hukum juga perlu dipikirkan kembali. Tanpa menafikan hasil dan kerja keras yang dilakukan oleh BPHN beserta jajarannya, komisi khusus bantuan hukum akan lebih memastikan fokus kerja dari institusi yang diberi mandat untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Komisi bantuan hukum juga akan lebih efektif dalam memberikan dan mengembangkan layanan bantuan hukum, baik yang bersifat informasi,

[347]*Ibid.*

konsultasi, maupun pendampingan hukum dengan membentuk unit-unit khusus untuk itu.[348]

Sistem *referral* yang berlaku saat ini akan lebih tepat sasaran apabila diutamakan pada OBH-OBH yang beroperasi di daerah-daerah terpencil, maupun mendorong OBH-OBH baru di daerah tersebut. OBH-OBH yang saat ini terkonsentrasi di perkotaan akan didorong untuk lebih fokus pada *legal empowerment* melalui informasi dan konsultasi hukum, serta melakukan kerja-kerja litigasi kepentingan publik *(public interest litigation).* Sementara itu, dalam hal kerja-kerja pendampingan hukum *(case works),* advokat OBH tetap akan bisa memberikan pendampingan hukum dan akan terpacu kualitas kerjanya dengan adanya perbandingan dan *"benchmarking"* dari advokat *in house*.[349]

Tantangan untuk melakukan reformasi sistem bantuan hukum tak akan jauh berbeda. Keberadaan dan kekuatan sebuah sistem bantuan hukum utamanya ditentukan oleh kapasitas finansial negara dan kemauan politik pemerintah. Namun, ada sedikit perbedaan antara momen awal penyusunan UU Bantuan Hukum dengan situasi saat ini. Baik RPJMN 2015-2019, Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK) 2016-2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Paket Reformasi Hukum Jilid II dari pemerintahan Joko Widodo merupakan peluang bagi dimulainya reformasi sistem bantuan hukum. Dengan demikian, kita sudah

[348]*Ibid,* hlm. 25.

[257]*Ibid*

memiliki sistem hukum dan konstitusi yang menunjang kebijakan bantuan hukum serta pengalaman implementasi kebijakan layanan bantuan hukum yang sudah berjalan. Dengan itu semua, kita tetap perlu mengingatkan kembali bahwa komitmen negara untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi warganya dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi sistem dan implementasi layanan bantuan hukum.[350]

Negara	Aturan Hukum	Syarat Pemberian Bantuan Hukum
Indonesia	Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9	Masyarakat yang tergolong msikin dan tidak mampu.
Afrika Selatan	Section 28 dan section 35 The Constitution of south of Africa. Legal aid act No. 22 of 1969, south Africa bill of Rights; act 108 of 1999, public finance management act; restitution of land Rights security of tenure dan criminal procedures act.	Masyarakat miskin; penghasilan gabungan suami-istri di bawah 250 USD per bulan
Inggris	Article 6(1) ECHR , Article 6(3) (c)	Jenis kasus dan keadaan keuangan. Untuk kasus perdata (non-pidana) yaitu mencakup hal-hal seperti utang, keluarga atau masalah perumahan hanya perlu menunjukkan tidak mampu membayar biaya hukum dan masalahnya serius. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu situasi keuangan calon klien tidak diperhitungkan dalam hal seperti: Tribunal kesehatan mental; anak-anak dalam perawatan; dan penculikan anak.
Australia	Yurisprudensi dan undang-undang negara bagian yang menciptakan komisi bantuan hukum	Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus diuji melalui tiga kriteria, yakni: a. Uji kriteria pendapatan; b. Uji kelayakan perkara; dan c. Uji keriteria jenis perkara. Dalam pengujian tersebut, pemohon akan diuji dalam aspek tingkat kemungkinan menang, perbandingan efesiensi biaya berbanding dengan manfaat pemohon, dan kelayakan biaya.

[258]*Ibid*

Negara	Aturan Hukum	Syarat Pemberian Bantuan Hukum
Belanda	European Convention on Human Rights and the Constitution of the Netherlands, The Legal Aid Act of 1994	Kemampuan kekuangan atau kekayaannya tidak mencapi jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai publik. Lembaga Bantuan Hukum di Belanda akan menangani semua jenis perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180 Euro.
Thailand	Section 242 Konstitusi Thailand	Terdakwa yang miskin, diancam dengan hukuman mati dan diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa tersebut adalah anak.

B. Rekonstruksi Nilai Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu agar Bernilai Keadilan Pancasila

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai "penjaminan hak-hak sosial" *(the granting of social rights)* kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifi tas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia *(human investment)* yang terencana dan melembaga.[351]

[351]Sentanoe Kertonegoro. 1997. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Jakarta: Mutiara Sumber Widya, hlm. 17.

Konsep bantuan hukum dalam UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu.

Cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang Undang; Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syaratsyarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima

bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kemudian, apabila dihubungkan dengan teori atau paham negara hukum, tampaknya UUD 1945 menjamin pula bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit, melainkan negara hukum dalam arti material atau dalam arti luas. Kesimpulan ini dipertegas oleh alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu.[352] Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk memastikan

[352]Mien Rukmini. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 50

sejauh mungkin hak orang lain dihormati. Thomas Paine dalam bukunya *Rights of Man* menyatakan: *"A Declaration of Rights is, by reciprocity, a Declaration of Duties also. Whatever is my right as a man, is alsothe right of another and it becomes my duty to guarantee, as well as to possess"* (Dikutip dari Patrick J.O.Mahony).[353]

Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Hak asasi manusia di bidang hukum di antaranya adalah hak untuk mendapat persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum.[354]

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan persamaan di depan hukum.

Dikatakan dalam Pasal 6 dari Deklarasi tersebut: *"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law"*[355]

Sementara itu Pasal 7 juga menyebutkan:

"All are equal before the law and are entitled without any discriminationto equal protection of the law. All are entitled to equal

[353]Binziad Kadafi, et al., 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, hlm. 218.

[354]*Ibid*, hlm. 218.

[262]*Ibid*, hlm. 219.

protectionagaints any discrimination in violation of this Declaration and againtsany incitement to such discrimination."

Selain itu dalam *International Covenant and Civil and Political Rights* jugadijamin tentang persamaan di hadapan hukum terhadap setiap warga negara. Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyebutkan:[356]

"everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law" Prinsip ketiga dari *the Basic Principles on the Role of Lawyers* yang mensyaratkan negara/pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup dan infrastruktur lainnya yang tidak beruntung. Suatu negara hukum *(rechtstaat)* baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokarsi dan hak asasi manusia manusia.

Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar *(on equal footing)*, kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan *wewenang (detournement de pouvoir)* dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara *(abuse of power)* terhadap warga negaranya.

Bantuan hukum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam APBN untuk merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap

[263]*Ibid*, hlm. 210.

fakir miskin yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.[357]

Berdasarkan teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan pemikiran HAM, yaitu:

1. HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia
2. HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya
3. HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain apakah mereka para individu ataukah pemerintah.[358]

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.[359]

Menurut Franz Magnis Suseno: Hak-hak asasi manusia tidak diciptakan dari udara kosong, melainkan mengungkapkan sejarah pengalaman sekelompok orang yang secara mendalam mempengaruhi

[357]Frans Hendra Winarta, *op.cit*, hlm. 174-183.

[358]Todung Mulya Lubis dalam Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: FH-UI, hlm 91.

[359]Miriam Budiardjo. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 120.

cara seluruh masyarakat menilai kembali tatanan kehidupannya dari segi martabat manusia. Sejarah itu berwujud penderitaan, ketidakadilan, dan pemerkosaan. Penetapan suatu hak asasi merupakan hasil suatu proses dialogis dalam masyarakat yang berjalan dan berlangsung dalam waktu yang lama dari pengolahan pengalaman negatif masa lalu yang kemudian diyakini sebagai peristiwa yang merupakan pelanggaran prinsipil terhadap apa yang dianggap wajar dan adil berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.[360]

Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat, yang jika tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak dasar, karena merupakan suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan penghormatan terhadap hak asasi tersangka, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana indonesia, apalagi kalau kita lihat dimasa lampau pada pemberlakuan HIR *(Herziene Inlandsch*

[360]Franz Magnis-Suseno. 2003. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 136.

Reglement) di Indonesia sampai dengan tahun 1981, bahwa masyarakat hukum indonesia telah lama memperjuang-kan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

Ketentuan yang terdapat didalam HIR di atas dapat di ketahui bahwa pada masa HIR pun sudah ada jaminan bantuan hukum bagi hak-hak tersangka walaupun dalam tatanan hukum yang ancamannya sebagai hukuman mati atau pada saat pemeriksa jaksa atau pemeriksaan di muka persidangan, masih sempitnya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, yaitu pada tatanan yang tertentu saja.

Tatanan hukum acara sekarang yang dinaungi KUHAP yaitu didalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 KUHAP dapat disimpulkan, bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang *(equality before the law)*, yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana.

Pejabat negara pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan penjara lima tahun atau lebih bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang tidak mempunyai penasehat hukum Bahwa pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat

manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) propesional. Dalam keadan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Untuk dapat terjaminnya terpenuhinya hak-hak terpidana tersebut sangat diperlukan adanya program bantuan hukum yang senantiasa memantau pelaksanaan pemberian hak-hak terpidana tersebut.

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara karena belas kasihan dari negara, hal ini penting, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan. Namun dalam prakteknya penerapan bantuan hukum sebagai belas kasihan negara tersebut belum terealisasi sebgai mana yang di cita-citakan negara dalam undang-undangnya.

Permasalahan lain mungkin adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum sebagai hak-haknya yang harus di penuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar tersangka atau terdakwa mengetahiu hak-haknya, sehingga kadang terkesan menghalang-halangi

proses pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses pemeriksaan dan dalam segala tingka peradilan. Dengan adanya bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparatur penegak hukum misalnya banyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah dita-han melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan.

Layanan *pro bono* diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kriteria 'tidak mampu' pada dasarnya mengacu pada ketidakmampuan secara ekonomi.[361] Namun, didasari pemikiran bahwa *pro bono* adalah sarana perwujudan *access to justice*, maka layanan *pro bono* juga diberikan kepada masyarakat yang secara umum kurang atau tidak memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum, seperti: perempuan, anak-anak, buruh migran, pencari suaka, masyarakat adat, korban pelanggaran hak asasi manusia berat, masyarakat berkebutuhan khusus dan masyarakat minoritas (misalnya karena kepercayaan, suku/ras, atau orientasi seksualnya). Dengan kata lain, layanan *pro bono* dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara sosial-politik.[362]

[361]https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/Panduan-Pro-Bono.pdf, hlm. 18, diakses pada 08/03/2022

[362]*Ibid*

Pihak yang dapat menerima layanan *pro bono* dapat berupa individu atau kelompok yang mewakili para individu yang memenuhi kriteria penerima layanan *pro bono*.[363] Seseorang dapat dikatakan tidak mampu secara ekonomis jika, di antaranya, memiliki pendapatan bulanan setara atau di bawah upah minimum. Selain itu, seseorang juga dapat dikatakan miskin jika terdaftar dalam daftar penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik atau sebagai peserta program bantuan pemerintah.[364]

Untuk membuktikan bahwa calon penerima layanan *pro bono* memenuhi kriteria tidak mampu secara ekonomis, advokat dapat meminta calon penerima layanan *pro bono* untuk memberikan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu secara ekonomi, seperti:

1. Surat keterangan tidak mampu;
2. Tagihan rekening listrik selama beberapa bulan terakhir;
3. Bukti pembayaran pajak penghasilan terbaru; dan
4. Bukti kepesertaan dalam program bantuan pemerintah.[365]

Jika calon penerima layanan *pro bono* adalah kelompok yang mewakili para individu yang tidak mampu, maka ketidakmampuan kelompok tersebut dapat ditunjukkan melalui dokumen pendukung lain, seperti laporan keuangan selama beberapa bulan terakhir atau data individu-individu yang diwakilinya.[366]

---

[363]*Ibid*
[364]*Ibid*, hlm. 19.
[365]*Ibid*
[366]*Ibid*

Dalam keadaan mendesak, advokat mempunyai diskresi untuk menentukan apakah seorang individu atau suatu kelompok layak menerima layanan *pro bono* tanpa terlebih dahulu meminta dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan di atas. Jika tidak menggunakan dokumen, penentuan diberikan atau tidaknya layanan *pro bono* juga dapat didasarkan pada wawancara antara advokat dengan calon penerima layanan *pro bono*.[367]

Sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya, seseorang dapat dikatakan tidak mampu secara sosial-politik karena individu tersebut kurang atau tidak memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum. Proses membuktikan bahwa seseorang tidak mampu secara sosial-politik biasanya dilakukan dengan metode wawancara, karena biasanya sulit untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan ketidakmampuan tersebut (bisa karena calon penerima layanan *pro bono* tidak mempunyai atau keberatan untuk menunjukkan dokumen yang bersangkutan). Sebagai alternatif lain, penerima layanan *pro bono* dapat membuat surat pernyataan mengenai ketidak mampuannya secara sosial politik. Contoh surat pernyataan tersebut dapat dilihat pada Lampiran II panduan ini.[368]

Ketika memberikan layanan *pro bono*, advokat memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata ‘cuma-cuma’ di sini berarti bahwa advokat tidak

[367]*Ibid*
[368]*Ibid*, hlm. 19-20.

menerima pembayaran honorarium atas jasa hukum yang diberikannya.[369]

Namun, dalam suatu proses berperkara, terdapat biaya selain biaya jasa hukum yang dapat membebani seorang pencari keadilan yang tidak mampu, seperti biaya administrasi. Ketika memberikan layanan *pro bono,* advokat yang bersangkutan diharapkan untuk menanggung biaya-biaya lain tersebut.[370] Bahkan, Peraturan PERADI 1/2010 secara tegas melarang advokat yang memberikan layanan *pro bono* untuk menerima dana untuk kepentingan apapun dari pencari keadilan yang tidak mampu.[371]

Selain mengandalkan dana pribadi, advokat diperbolehkan untuk mengandalkan sumber pendanaan lain, seperti bantuan dana dari organisasi advokat, kantor hukum, sesama advokat dan/atau hasil penggalangan dana oleh masyarakat. Jika layanan *pro bono* diberikan di bidang litigasi, advokat juga dapat mengusahakan agar klien mendapatkan layanan pembebasan biaya proses berperkara *(pro deo)* dengan membantu membuatkan dan mengajukan permohonan layanan tersebut kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.[372]

---

[369]*Ibid*, hlm. 20.

[370]Dalam praktiknya, petugas pengadilan seringkali membebankan biaya yang jumlahnya lebih tinggi dari jumlah resmi dalam peraturan perundang-undangan untuk sebuah layanan administrasi, hanya karena layanan tersebut dimohonkan oleh seorang advokat. Tidak hanya salah, praktik seperti ini menghambat dan mematahkan semangat advokat dalam memberikan layanan *pro bono*. ibid

[371]*Ibid.*

[372]Layanan pembebasan biaya proses berperkara dimohonkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu, sebagai pihak yang berperkara, kepada pimpinan dari pengadilan (Ketua Pengadilan) di mana perkara yang bersangkutan diproses di tingkat pertama. Permohoan tersebut dikabulkan jika permohonan dianggap layak dan anggaran untuk memberikan layanan tersebut masih tersedia. Ketentuan lebih rinci mengenai layanan pembebasan biaya berperkara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014

Yang perlu diingat adalah advokat dilarang membedakan kualitas layanan yang diberikannya kepada penerima layanan *pro bono*, walaupun tidak mendapatkan bayaran atas jasa hukum yang diberikannya pada pihak tersebut. Advokat wajib memberikan layanan *pro bono* dengan kualitas yang sama dengan pemberian layanan jasa hukum secara berbayar. [373]

Permohonan *pro bono* dapat diajukan melalui organisasi advokat, kantor hukum, atau langsung ke advokat yang bersangkutan.[374] Permohonan layanan *pro bono* pada dasarnya harus dibuat secara tertulis oleh pemohon sendiri atau wakilnya yang sah. Namun, jika pemohon tidak bisa menulis, advokat wajib membantu pemohon untuk menulis permohonan. Dalam hal ini, tanda tangan pemohon dapat digantikan dengan cap jempol. Advokat atau kantor hukum yang menerima permohonan *pro bono* seharusnya menembuskan seluruh permohonan *pro bono* yang diterimanya ke organisasi advokat untuk tujuan koordinasi dan administrasi. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak dilakukan.[375]

Di kantor hukum, misalnya, permohonan *pro bono* biasanya hanya akan didiskusikan secara internal oleh partner[376] dengan para advokat di kantor hukum tersebut. Dokumentasi dan administrasi hal-hal yang berkaitan dengan permohonan-permohonan *pro bono*,

---

tentang Pedoman Pelayanan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ibid, hlm. 20-21.

[373]*Ibid*, hlm. 21.

[374]*Ibid*, hlm. 22.

[375]*Ibid*.

[376]*Ibid*.

termasuk pelaksanaannya, pun dilakukan secara internal, misalnya dengan pencatatan pelaksanaan layanan *pro bono* dalam *timesheet* advokat yang bersangkutan.

Sebelum menerima atau menolak suatu permohonan *pro bono*, penerima permohonan perlu melakukan penilaian kelayakan permohonan dengan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal berikut:

1. Kriteria ‘tidak mampu’ Penerima permohonan *pro bono* dapat menilai apakah pemohon memenuhi kriteria ‘tidak mampu’ atau tidak secara dan/atau melalui wawancara. Kriteria ‘tidak mampu’ secara ekonomi relatif dapat dinilai secara administratif. Namun, untuk bentuk ketidakmampuan lain (secara sosial politik), penilaian biasanya dilakukan dengan cara mewawancarai pemohon.
2. Konflik kepentingan Advokat terikat pada ketentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) dalam melaksanakan kewajiban pro bono. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam KEAI, advokat wajib menghindari konflik kepentingan antara para kliennya. Penilaian mengenai konflik kepentingan juga dapat dilakukan secara administratif dan/atau melalui wawancara.
3. Kompleksitas layanan *pro bono* Penerima permohonan *pro bono* mempelajari kompeksitas layanan *pro bono* yang dibutuhkan untuk dapat menentukan alokasi beban kerja dan advokat-advokat yang akan ditunjuk.

Dengan penilaian ini, alokasi beban kerja setiap advokat yang terlibat dapat menjadi lebih jelas sehingga menghindari kemungkinan

penambahan advokat di masa depan, meskipun penambahan tersebut tetap diperbolehkan.[377]

Dalam praktik, banyak advokat dan kantor hukum yang mengalami kesulitan dalam mencari klien *pro bono*. Untuk memenuhi anjuran jumlah waktu pemberian *pro bono,* advokat dapat memberikan layanan *pro bono* atas inisiatifnya sendiri, tanpa terlebih dahulu menerima permohonan *pro bono* dari pencari keadilan yang tidak mampu.[378]

Menurut Peraturan PERADI 1/2010, layanan yang diberikan atas dasar inisiatif advokat ini mencakup layanan di bidang non-litigasi. Sama halnya dengan layanan *pro bono* yang diberikan berdasarkan permohonan, pelaksanaan layanan *pro bono* sepihak pun harus dilaporkan kepada organisasi advokat.[379]

Untuk meningkatkan kualitas layanan *pro bono,* organisasi advokat dan kantor hukum perlu melakukan evaluasi terhadap layanan *pro bono* yang sudah diberikan advokat mereka. Evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak di luar organisasi advokat atau kantor hukum, misalnya klien atau hakim.[380]

Secara umum, evaluasi dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas pelaksanaan layanan *pro bono*. Dari segi kuantitas, hal yang dievaluasi bisanya mengenai jumlah jam yang diberikan untuk melaksanakan layanan *pro bono*. Dari segi kualitas, hal yang dievaluasi

[377]*Ibid,* hlm. 22-23.
[378]*Ibid,* hlm. 29.
[379]*Ibid*.
[380]Iibid, hlm. 30.

biasanya mengenai kesesuaian pemberian layanan dengan apa yang telah dijanjikan atau disepakati di awal dan/atau pemenuhan hak-hak klien penerima layanan *pro bono*.[381]

Melalui laporan yang diberikan oleh advokat kepada organisasi advokat, maka organisasi dapat mengevaluasi apakah advokat sudah memenuhi anjuran jumlah waktu pemberian layanan *pro bono* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, organisasi advokat dapat menentukan beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pemberian layanan *pro bono*, di antaranya:

1. Pemberian bantuan hukum yang dibiayai oleh negara;
2. Pemberian bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang tidak memenuhi kriteria 'tidak mampu' misalnya: memberikan pendidikan hukum kepada mahasiswa universitas ternama, memberikan bantuan perancangan dokumen hukum kepada lembaga pemerintahan, atau memberikan bantuan hukum kepada yayasan atau non-governmental organization yang bonafit secara finansial;
3. Pemberian bantuan hukum dengan tetap menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang menerima bantuan hukum tersebut; dan
4. Kegiatan administrasi kepengurusan organisasi advokat.[382]

Jika suatu kegiatan tidak dianggap sebagai layanan *pro bono*, maka waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan anjuran jumlah waktu pemberian

[381] *Ibid.*
[382] *Ibid*, hlm. 30-31.

layanan *pro bono*. Dalam praktik, berkembang pemikiran bahwa pemberian donasi kepada pihak lain yang melakukan kegiatan *pro bono* seharusnya dapat diklasifikasikan juga sebagai layanan *pro bono.* Berkaitan dengan hal ini, maka perlu diingat bahwa pemberian layanan *pro bono* merujuk pada pemberian jasa hukum oleh advokat. Jadi, yang seharusnya diberikan adalah kemampuan dan keahilannya, bukan dalam bentuk materiil yang dimilikinya.[383]

Terkait dengan penghitungan jam, organisasi advokat mengutamakan sistem penilaian sendiri *(self-assessment)* di mana advokat melakukan penghiitungan waktu pemberian layanan *pro bono* nya secara mandiri. Pada praktiknya, penghitungan tersebut diterima oleh organisasi advokat tanpa proses verifikasi lebih lanjut.[384]

Walaupun demikian, organisasi advokat tetap dapat melakukan verifikasi karena advokat seharusnya melampirkan bukti pendukung atas informasi yang tertera pada laporan pelaksanaan layanan *pro bono*. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, maka organisasi advokat dapat memberlakukan sanksi yang sesuai (misalnya: menunda penerbitan kartu advokat yang bersangkutan).[385]

Terkait dengan evaluasi atas kualitas layanan yang diberikan, organisasi advokat dapat menerapkan beberapa upaya, seperti:

1. Meminta evaluasi dari klien yang menerima layanan *pro bono* (misalnya: dengan menhubungi klien tanpa sepengetahuan advokat

[383]*Ibid*, hlm. 31.
[384]*Ibid*.
[385]*Ibid*.

yang memberikan layanan *pro bono* atau meminta klien mengisi kuesioner terkait kualitas pemberian layanan *pro bono*); dan/atau

2. Menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan survei atas kualitas pemberian layanan *pro bono*.[386]

Untuk mengevaluasi jumlah waktu yang digunakan oleh para advokatnya dalam memberikan layanan *pro bono*, kantor hukum dapat mewajibkan para advokat yang bersangkutan untuk memasukkan jumlah waktu pelayanan *pro bono* mereka ke dalam *timesheet.* Kantor hukum dapat juga membuat *timesheet* khusus terkait pelaksanaan *pro bono* seorang advokat.[387]

Dengan mekanisme pengisian *timesheet,* kantor hukum pada dasarnya mengandalkan sistem penilaian sendiri. Sama halnya dengan organisasi advokat, penghitungan jam yang disampaikan oleh advokat juga tidak melalui proses verifikasi lebih lanjut.[388]

Terkait dengan kualitas layanan *pro bono*, kantor hukum dapat menunjuk partner yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan kegiatan *pro bono,* termasuk pemantauan dan evaluasi kualitas pelaksanaan layanan *pro bono* yang diberikan oleh para advokat di kantor hukumnya. Partner tersebut dapat melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara mandiri atau menunjuk senior *associate* yang mempunyai jam terbang dalam memberikan layanan *pro bono* sebagai perpanjangan tangannya.[389]

---

[386]*Ibid,* hlm. 31-31.
[387]*Ibid,* hlm. 32.
[388]*Ibid*.
[389]*Ibid*

Selain mekanisme yang di atas, untuk mengevaluasi kualitas layanan *pro bono*, kantor hukum juga dapat meminta evaluasi dari klien yang menerima layanan *pro bono* dan/atau membentuk unit yang terpisah (misalnya: unit yang terdiri dari advokat yang tidak terlibat dalam layanan *pro bono* yang sedang dievaluasi) untuk melakukan evaluasi secara independen.[390]

Sebagai pihak yang menerima layanan *pro bono*, klien *pro bono* berhak untuk melakukan evaluasi. Selain atas inisiatifnya sendiri, klien juga dapat diminta oleh organisasi advokat dan/atau kantor hukum untuk melakukan evaluasi terhadap layanan *pro bono* yang diterimanya.[391]

Untuk memudahkan proses evaluasi, organisasi advokat dan kantor hukum dapat membuat kuesioner terkait dengan pelaksanaan layanan *pro bono*. Kuesioner tersebut diisi langsung oleh klien, bukan advokat. Jika klien yang bersangkutan tidak dapat melakukannya (misalnya: karena buta huruf), maka perwakilan dari organisasi advokat atau kantor hukum (selain advokat yang memberikan layanan yang akan dievaluasi) dapat membantu melakukan pengisian kuesioner dengan informasi yang didapat langsung dari yang bersangkutan. Evaluasi juga dapat diminta dari hakim (dalam hal layanan yang diberikan adalah layanan *pro bono* litigasi). Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan advokat, hakim mempunyai kapasitas

[390]*Ibid*
[391]*Ibid*, hlm. 33

untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan *pro bono* seorang advokat.[392]

Pemberian layanan *pro bono* adalah kewajiban bagi para advokat Indonesia demi menghadirkan kembali wajah hukum serta keadilan di tengah masyarakat. Pada kenyataannya, layanan *pro bono* belum dilaksanakan oleh semua advokat. Untuk mendorong pemberian layanan *pro bono* oleh advokat, perlu dibangun kultur *pro bono* yang tidak hanya melibatkan para advokat, termasuk juga para pemangku kepentingan lain di bawah ini.[393]

Organisasi advokat perlu menambahkan materi tentang *pro bono* dalam kurikulum program pendidikan advokat. Selain itu, organisasi juga dapat melakukan *roadshow* dari kampus ke kampus untuk memperkenalkan konsep *pro bono*.[394]

Organisasi advokat perlu membentuk infrastruktur jaringan dan basis data yang dapat menampung seluruh informasi relevan mengenai *pro bono*, mulai dari permohonan-permohonan *pro bono hingga* daftar para advokat yang tersedia untuk memberikan layanan tersebut. Bersamaan dengan infrastruktur jaringan dan basis data, organisasi advokat juga perlu membentuk berbagai sistem yang dapat mempermudah pelaksanaan dan pemantauan layanan *pro bono*, seperti sistem pengajuan permohonan dan sistem pelaporan pelaksanaan layanan *pro bono*.[395]

---

[392]*Ibid.*
[393]*Ibid*, hlm. 35.
[394]*Ibid.*
[395]*Ibid.*

Saat ini, pemberian sanksi atas tidak dilakukannya *pro bono* dianggap tidak efektif untuk mendorong para advokat dalam memberikan lebih banyak layanan *pro bono* karena kultur *pro bono* itu sendiri belum terbangun. Pemberian penghargaan dan insentif dianggap lebih menarik. Oleh karenanya, organisasi advokat perlu menciptakan suatu mekansime pemberian penghargaan dan insentif untuk menghargai advokat yang sudah melaksanakan kewajiban *pro bono* dengan baik dan mendorong advokat lainnya untuk melakukan *pro bono*.[396]

Organisasi advokat dapat memfasilitasi advokat untuk bekerjasama dengan fakultas hukum dalam mendirikan dan menjalankan klinik hukum sebagai sarana pelatihan mahasiswa. Materi-materi tentang *pro bono* juga dapat disisipkan dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum.[397]

Organisasi advokat dapat meningkatkan upaya mereka dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai *pro bono* melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang biasanya, misalnya melalui program riset yang hasilnya dipublikasikan untuk umum.[398]

Kerjasama antara organisasi advokat dengan LBH dan Lembaga Penegak Hukum penting adanya untuk menciptakan suatu wadah atau

[396]*Ibid*, hlm. 35-36.
[397]*Ibid*, hlm. 36.
[398]*Ibid.*

sistem yang dapat menjadi pusat bertemunya kebutuhan layanan *pro bono* dengan ketersediaan advokat yang dapat memberikannya.[399]

Kantor hukum dapat membangun kultur *pro bono* dengan memperlakukan pemberian layanan *pro bono* seperti pekerjaan kantor biasa (untuk klien berbayar). Selain itu, kantor hukum juga dapat mempertimbakan pemberian layanan *pro bono* sebagai salah satu indikator kinerja advokatnya, yang dapat menjadi dasar untuk penilaian jenjang karir, pemberian bonus, atau bentuk penghargaan lainnya.[400]

Seperti organisasi advokat, kantor hukum juga diharapkan untuk menjalin kerjasama dengan LBH dan para penegak hukum lainnya untuk menciptakan suatu wadah atau sistem yang mempertemukan kebutuhan layanan *pro bono* dengan advokat yang dapat memberikannya.[401]

Pemerintah dapat bekerjasama dengan organisasi advokat, kantor hukum dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pemberian layanan *pro bono* untuk membentuk kebijakan nasional yang mendorong sosialisasi dan perluasan *pro bono*, khususnya di daerah-daerah yang relatif sulit dalam mengakses hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat mensinergikan kebijakan nasional terkait *pro bono* dengan kebijakan nasional terkait pemberian bantuan hukum dalam lainnya di Indonesia.[402]

---

[399]*Ibid.*
[400]*Ibid*, hlm. 36-37.
[401]*Ibid*, hlm. 37.
[281]*Ibid.*

Pelaksanaan *pro bono* yang efektif dan efisien membutuhkan data sebagai dasar dari pembentukan kebijakannya. Pemerintah berada dalam posisi yang baik untuk memfasilitasi pengumpulan data tersebut, terutama dari daerah pelosok yang relatif sulit dalam mengakses hukum.[403]

C. Rekonstruksi Norma Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagai suatu profesi yang terhormat *(officium nobile)*, advokat juga diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (1) UU Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau dikenal dengan *pro bono publico* atau disingkat dengan *pro bono*.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UU Advokat, Pemerintah juga mengatur ketentuan tentang tata cara *pro bono* juga diatur dalam PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955). Di dalam PP diatur bahwa, perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan

[282] *Ibid.*

hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Selain itu, PP juga mengatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Selain diatur dalam undang-undangdan PP, dalam konteks internal organisasi advokat, *pro bono* juga diatur di dalam Kode Etik Advokat, (lihat pasal 7 butir (h) Kode Etik Advokat). Ketentuan tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 yang mewajibkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma paling sedikit 50 jam dalam setahun. Meskipun Peraturan Peraditidak menyebutkan sanksi yang diberikan kepada advokat yang tidak menjalankan peraturan tersebut, pada dasarnya hal tersebut tidak merupakan kewajiban *(mandatory)*. Pada hakikatnya, sebagai profesi terhormat, sudah selayaknya setiap advokat menjalankan *pro bono* sebagai panggilan hati nurani.

Permasalahannya adalah mengapa kewajiban tersebut apakah efektif dilapangan, sudah berapa prosentase advokat yang melakukan kewajiban tersebut, dalam bentuk apa kewajiban tersebut dicatat, dan bagaimana kualitas pendampingan yang dihasilkan dari kewajiban advokat tersebut. Hal ini tentunya perlu dikaji bukan hanya didasarkan dari kewajiban pemerintah saja, tetapi dari segi organisasi advokat yang

melaksanakan dan mengorganisasikan advokatnya dalam melaksanakan kewajiban tersebut.[404]

Selain masalah mengenai pelaksanaan yang masih belum masif dilaksanakan, masalah substansi lain adalah Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu jika di awal tadi kita sudah bahas mengenai etika, dan kode etik pasal 7 butir (h) Kode Etik Advokat). Ketentuan tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma, maka apakah kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu adalah kewajiban hukum atau kewajiban etik.[405]

Hal inilah sebenarnya yang perlu dilakukan rekonstruksikan. Kewajiban hukum tentunya harus diikuti dengan konsekuensi hukum berupa sanksi. Pasal 22 ayat (2) UU Advokat tentunya harus memuat sanksi hukum apabila ingin dikatakan sebagai kewajiban hukum. Permasalahannya adalah apakah mau berbagai macam advokat diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jawabannya adalah mau tidak mau, karena konsekuensi kewajiban tersebut dijadikan kewajiban hukum adalah patut secara *Rechtmatig* untuk dilaksanakan.[406]

---

[404]Kurniawan Tri Wibowo, Hj. Elza Syarief., dan Sugeng. Ade Saptomo. ETIKA PROFESI DAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA, Surabaya: PUSTAKA AKSARA, Hlm. 251

[405]*Ibid*

[406]*Ibid*

Lalu bagaimana dengan sanksinya, apa sanksinya jika advokat tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah kembali, karena advokat tidak di gaji pemerintah, maka proses pengawasannya tidak berada di tangan pemerintah, tetapi melalui representatif pemerintah, kewenangan tersebut diberikan ke organisasi advokat, maka sanksi tentu saja akan diberikan kepada organisasi advokat.[407]

Biarlah tidak dilakukan proses legislatif terhadap sanksi hukum, tetapi proses turunan peraturan dari organisasi perlu diperjelas dan diperkuat. Organisasi profesi advokat harus mengatur mengenai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Akan sangat mungkin apabila organisasi advokat secara serempak mengatur kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagai persyaratan registrasi ulang kartu advokat.[408]

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagai persyaratan registrasi ulang kartu advokat diperlukan dengan melampirkan formulir yang ditanda tangani pencari keadilan minimal 2 perkara, dan dilampirkan Surat Tanda Keterangan Tidak Mampu. Dengan demikian maka advokat akan menjalankan kewajiban hukum tersebut. Selain itu

[407]*Ibid*, hlm. 252

[408]*Ibid*

sekaligus mencari para pencari keadilan untuk melaksanakan proses tersebut.[409]

Dampak yang terjadi kertika adanya kewajiban tentunya juga akan menimbulkan permasalahan etik, dengan demikian advokat bukan lagi bersifat pasif namun bersifat aktif. Apabila advokat berlomba-lomba mencari pencari keadilan yang miskin tentunya tidak akan menjadi masalah yang begitu signifikan, hal ini sama seperti orang berada yang mencari orang miskin untuk ladang sodakoh, hanya saja, mungkin caranya perlu di atur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai perkara yang ditangani hanya merupakan rekayasa semata.[410]

Selain itu, pemberian bantuan hukum bukan hanya dijadikan hal yang sempit, bahwa harus membantu masyarakat miskin saja, tetapi bisa juga melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan, konsultasi hukum masal, dan pendampingan hukum. Proses-proses ini harus diatur skala dan poinnya, sehingga pemberian bantuan hukum bersifat subtitutif, namun tetap substantif.[411]

Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Minimnya akses ini disebabkan oleh :

1. Akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya; Ketidaktahuan masyarakat marginal akan sistem hukum dan prosedur hukumnya atau buta hukum;

[409]*Ibid.*
[410]*Ibid.*
[411]*Ibid*, hlm. 253.

2. Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat marjinal tidak mampu membayar proses hukum;
3. Tidak terlaksana secara efektif kebijakan jasa bantuan hukum melalui profit;
4. Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.[412]

Bantuan hukum yang diberikan Advokat dalam konteks *pro bono,* berlandasakan kepada kewajiban *ethic* seorang Advokat, dan berada dibawah pengaturan UU Advokat dan peraturan pelaksananya yaitu PP No.38/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; SK No.016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 tentang Pembentukan PBH Peradi dan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma. Peradi menetapkan setiap angotanya minimal memberikan layanan *pro bono* 50 jam dalam setahun. Maka, setiap Advokat, baik yang bekerja di kantor hukum, mandiri, maupun di NGO memiliki kewajiban menyisihkan 50 jam untuk layanan *pro bono*. Dan untuk di Indonesia, Peradi telah menetapkan *pro bono* diberikan kepada :

1. Pencari keadilan yang tidak mampu;
2. Termasuk ke dalam pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik; dan
3. *Afi rmative action* untuk perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM Berat.

[412]Ahmad Muntolib and Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora, (Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3, tahun 2017, 637–642.

Target group pemberian bantuan hukum menurut Peradi ini sangat progresif dibandingkan dengan skema bantuan hukum yang diberikan negara. Dan untuk pengawasan, baik pengawasan kode etik, standar layanan bantuan hukum dengan sendirinya menjadi kewajiban organisasi profesi. Demikianhalnya untuk pendanaan, *pro bono* harus bersumber dari Advokat itu sendiri atau dana kantor hukum yang dialokasikan untuk itu. Sedangkan organisasi profesi berkewajiban memberikan reward terhadap advokat/kantor hukum yang telah memberikan layanan bantuan hukum secara *pro bono*.

Sedangkan, *legal aid system* merupakan pelaksanaan konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan asas negara hukum, dan hak keadilan. Bantuan hukum dalam konteks ini, diatur pelaksanaannya melalui UU Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi. Pemberi bantuan hukum dalam konteks ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan, Advokat, Paralegal (tergabung di LBH), Dosen, Mahasiswa yang tergabung di LBH Kampus. Untuk menentukan kelayakan para pemberi bantuan hukum tersebut, negara melakukan proses seleksi melalui verifi kasi dan akreditasi LBH yang akan menjadi pemberi bantuan hukum. Dan untuk memastikan layanan yang diberikan memiliki standar yang baik, maka menjadi kewajiban negara untuk menentukan standar mutu layanan bantuan hukum yang

diberikan. Dan target groups dari bantuan hukum ini terbatas pada Orang Miskin (Ekonomi). Dan dikarenakan sumber dana berasal dari APBN atau APBD, maka Negara yang diwakili Menteri Hukum dan HAM melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran, dan tidak boleh pada kasus yang dibelanya.

Terkait verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum terdapat masalah yang muncul : apakah proses verifikasi dan akreditasi tersebut sebagai bagian dari legalisasi pemberi bantuan hukum, atau hanya sebatas prosedur untuk dapat mengakses anggaran bantuan hukum? Jika verifikasi dan akreditasi dimaknai sebagai legalisasi akan menjadi masalah yang cukup serius, karena itu artinya lembaga-lembaga bantuan hukum yang selama ini sudah memberikan bantuan hukum dan tidak lolos akreditasi maka dia menjadi illegal atau tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan hukum. Lain halnya jika proses itu hanya dimaknai sebagai prosedur untuk dapat mengakses bantuan hukum, karena walaupun tidak lolos verifikasi dan akreditasi, lembaga yang bersangkutan masih memungkinkan memberikan bantuan hukum dengan mendapatkan pendanaan dari selain pemerintah. Masalah lain yang juga penting diperhatikan adalah, apa pengaruhnya jika organisasi bantuan hukum memilih untuk tidak mengikuti verifikasi dan akreditasi, dan juga tidak ingin mengakses dana bantuan hukum dari negara. Verifikasi dan akreditasi pada satu sisi sangat positif, karena proses ini akan mengontrol kualitas dan kualifikasi dari pemberi bantuan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan mendapatkan

pelayanan bantuan hukum yang maksimal, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada sisi lain proses tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan berbeda dengan tujuan utamanya dan berubah menjadi sarana kontrol negara terhadap lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, sehinga LBH-LBH yang sering berhadapan dengan negara tidak akan lolos dalam verifikasi dan akreditasi. Kekhawatiran yang lain adalah tidak tepat sasaran mengingat LBH juga memiliki banyak varian ada yang bekerja secara bertanggungjawab, dan tidak dipungkiri ada juga LBH yang hanya didirikan untuk mencari keuntungan dengan menerima anggaran bantuan hukum dari pemerintah. Kekhawatiran yang terkahir adalah verifikasi dan akreditas menjadi wahana korupsi, kolusi dan nepotisme, karena anggaran bantuan hukum berpotensi menjadi ladang baru korupsi. Verifikasi dan akreditasi dalam regulasi bantuan hukum harus dimaknai sebagai prosedur untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum, bukan mekanisme legalisasi organisasi bantuan hukum. Pemerintah harus tetap membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan hukum, meskipun mereka tidak mendapatkan anggaran dari negara. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat untuk tetap mendapatkan bantuan hukum secara layak.

Regulasi bantuan hukum perlu tetap menjamin bagi organisasi bantuan hukum yang memilih untuk tidak mengikuti proses verifikasi dan akreditasi dan tidak mangakses dana bantuan hukum dari pemerintah, tetapi mereka tetap memberikan layanan bantuan hukum.

Sehingga keduanya, baik *System Pro bono* maupun Sistem *Legal Aid*, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Sistem *pro bono* bukanlah penganti dari sistem legal aid, tetapi ikut mendukungnya dengan keterlibatan para advokat sebagai salah satu pemberi layanan. Advokat tetap dapat terlibat dengan "minimum payment" dalam arti, ia berhak mendapatkan pergantian biaya pelayanan hukumnya sesuai dengan standar yang ditentukan negara, melalui proses kontrak antara LBH tempatnya bergabung dengan negara. Namun, sistem *legal aid* juga tidak meniadakan kewajiban *pro bono* advokat.

Kerancuan dalam memahami kedua sistem pemberian bantuan hukum tersebutlah yang menjadi dasar permohonan uji materi. Sehingga, sebelum membahas pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu meluruskan konsep *pro bonosystem* dan *legal aid* system sebagai berikut [413]:

UU Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). UU Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang

[413]Putusan MK No.88/PUU-X/2012

tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum. Apabila advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat;

Terkait pembatasan pelayanan bantuan hukum oleh Advokat, karena adanya paralegal, dosen dan mahasiswa yang memberikan bantuan hukum, Majelis Hakim merujuk pada UU Advokat yang juga mengatur bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sehingga meskipun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum melalui UU Bantuan Hukum, "kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum".[414]

[414] *Ibid*, hlm. 146.

Sedangkan, untuk dalil adanya dualisme penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu melalui Menteri Hukum dan HAM, dan Organisasi Advokat, majelis hakim kembali mengingatkan bahwa tanggung jawab negara yang diimplementasikan melalui UU Bantuan Hukum juga melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum. Dan bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang miskin, dan dana yang berasal dari APBN maka upaya bantuan hukum mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu (1) aspek perumusan aturan hukum, (2) aspek pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar aturan hukum ditaati, dan (3) aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum dihayati Berkaitan dengan ketiga aspek tersebut, peranan menteri sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan bantuan hukum secara optimal. Sehingga menurut Majelis Hakim, penyusunan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum oleh menteri merupakan suatu keharusan.[415] Standar bantuan hukum yang ditetapkan menteri, akan menjadi pedoman bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa: "...penetapan menteri mengenai kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai advokat. Kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum dan standar bantuan hukum tersebut

[415] *Ibid*, hlm. 146

justru mempermudah program pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan juga untuk meningkatkan akses bagi orang miskin dan buta hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.[416]

Pendek kata, Majelis menyatakan bahwa adanya dua penyelenggaraan bantuan hukum tidaklah bertentangan, karena berada dibawah undang-undang yang berbeda. Menteri merumuskan berbagai peraturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk pemberi bantuan hukum (LBH, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa), yang kemudian diikat untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Sehingga, hanya Advokat yang tergabung dengan LBH yang terikat kontrak untuk memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar Menteri, khususnya terkait kriteria penerima bantuan hukum dan pertanggungjawaban pembiayannya. Sedangkan bagi LBH atau Advokat yang tidak terikat kontrak dengan negara, dengan sendirinya tidak tunduk pada standar bantuan hukum dan pengawasan dari Menteri.

Para Pemohon mendalilkan bahwa UU Bantuan Hukum menghambat para Pemohon dalam menjalankan profesinya karena menghilangkan eksistensi pengawasan dalam UU Advokat. Oleh karena itu, pengawasan dalam UU Bantuan Hukum merugikan hak konstitusional advokat yang juga merupakan penegak hukum, sehingga bertentangan dengan kontitusi.[417]

---

[416]*Ibid*

[417]*Ibid*

Untuk menguji dalil ini, Majelis Hakim merujuk Putusan Mahkamah Nomor 067/PUU-II/2004, bertanggal 15 Februari 2005, tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) terhadap UUD 1945. Pengujian UU Mahkamah Agung tersebut diajukan oleh pemohon yang sama yaitu Dominggus Maurits Luitnan, S.H. dkk.

Pada pengujian UU Mahkamah Agung, pasal yang diujikan adalah Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris". Padahal menurut para pemohon Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003, pengawasan terhadap Advokat dilakukan Organisasi Advokat. Argumen yang diajukan pemohon dalam uji materi UU MA dan UU Bankum ini tidak berbeda jauh. Yaitu adanya dua badan pengawasan yang diatur dengan undang-undang yang berlainan terhadap suatu materi muatan ayat yang sama, maka timbullah dualisme hukum dan terjadinya pertentangan antara dua undang-undang yang berlaku. Akibatnya telah terjadi ketidakpastian hukum dalam pengawasan terhadap Pemohon dan Advokat umumnya. [418]

Untuk memutuskan masalah dualisme pengawasan ini, maka Mahkamah merujuk kembali pertimbangan dalam Putusan Mahkamah

[418]Bandingkan dengan Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya Disebut UU Nomor 5 Tahun 2004) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diakses http:// hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_67_2004.pdf

Nomor 067/PUU-II/2004, bertanggal 15 Februari 2005, yang menyatakan sebagai berikut: "Menimbang bahwa pengawasan terhadap suatu profesi, lebih-lebih yang fungsinya melayani kepentingan publik, adalah suatu keniscayaan, bahkan dapat dikatakan merupakan hal yang bersifat melekat *(inherent)* pada profesi itu sendiri. Sehingga, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi suatu profesi yang melayani kepentingan publik dimaksud merupakan kebutuhan sekaligus keharusan agar publik yang dilayani oleh profesi itu tidak dirugikan. Oleh karena itu, independensi atau kemandirian suatu profesi tidak boleh diartikan bebas dari pengawasan. Namun, pengawasan juga tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dibedakan dengan campur tangan yang terlalu jauh yang mengakibatkan seseorang yang menjalankan suatu profesi, dalam hal ini profesi advokat, menjadi terhambat dalam melaksanakan fungsinya secara independen";[419] "Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendirian Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945, pendirian Mahkamah tersebut tidak dimaksudkan untuk diartikan bahwa Advokat sama sekali terlepas dari pengawasan oleh pihak-pihak lain di luar organisasi advokat. Pemerintah, begitu pun lembaga peradilan, dengan sendirinya tetap memiliki kewenangan yang bersifat melekat *(inherent power)* untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan profesional sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Advokat, seperti halnya

[419]Putusan Mahkamah Nomor 067/PUUII/2004, bertanggal 15 Februari 2005, halaman 26-27

pengawasan terhadap organisasi Advokat dan pengawasan terhadap Advokat dalam beracara di persidangan pengadilan";[420]

Begitu pula dalam hal pengujian UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah, posisi advokat sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma justru dipertegas dalam UU Bantuan Hukum. Oleh karena itu, mekanisme dan pengawasan pemberian bantuan hukum oleh menteri terhadap advokat, adalah "bentuk pertanggungjawaban negara guna optimalisasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat".[421] Pengawasan pemberian bantuan hukum oleh menteri terhadap advokat dibutuhkan agar pelaksanaan bantuan hukum memenuhi asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Dengan demikian UU Bantuan tidak melanggar indepedensi Advokat dalam memberikan bantuan hukum. Karena, yang diawasi oleh Menteri tidak pada konten kasus yang dibela Advokat, melainkan lebih kepada mekanisme bagaimana Advokat sebagai kepanjangan tangan negara memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sesuai kriteria, layanan yang diberikan harus sesuai standar mutu yang ditetapkan, dan pengelolaan dana negara yang digunakannya.

Menurut para Pemohon, UU Bantuan Hukum menimbulkan dualisme pelayanan bantuan hukum. Di satu sisi, para Pemohon selaku advokat memberikan pelayanan bantuan hukum, namun di sisi lain, pelayanan bantuan hukum dilakukan pula oleh paralegal, dosen, dan

[420]Vide Putusan Mahkamah Nomor 067/PUUII/2004, bertanggal 15 Februari 2005, halaman 33

[421]*Op.cit*, hlm. 149.

mahasiswa fakultas hukum dengan diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, UU Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.[422]

Terhadap dalil Pemohon, selain mendengar saksi dan ahli di bidang Pendidikan Hukum Klinis,[423] Makamah kembali merujuk kepada keputusan sebelumnya. Yaitu Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, tentang Pengujian Pasal 31 UU Advokat terhadap UUD 1945,[424] yang dalam putusannya menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum tidak hanya Advokat.[425] Dan menurut Mahkamah, UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.[426]

---

[422]*Ibid*

[423]Ahli untuk issue Pendidikan Hukum Klinis adalah Bpk. Nandang Sutrisno dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

[424]Rumusan Pasal 31 UU Advokat menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat padahal bukan Advokat sebagaimana ditunjuk undang-undang ini, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah". Pasal ini telah mengkriminalisasi 'selain bukan advokat' yang memberikan bantuan hukum, khususnya menimpa dosen-dosen yang bergabung di LKBH Kampus.

[425] Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004 tentang permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang terhadap UUD 1945 http://hukum.unsrat.ac.id/etc/Putusan006PUUII2004rev91204.pdf

[426]*Op.cit*, hlm 152

Penolakan pemohon terhadap peran dosen dan mahasiswa sebagai pemberi bantuan hukum dengan mendalilkan bahwa dalam Tridaharma Perguruan Tinggi, tidak terdapat point “Bantuan Hukum”, melainkan :

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengembangan; dan
3. Pengabdian terhadap Masyarakat.

Sehingga, dosen dan mahasiswa hukum seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan hukum. Untuk menjawab dalil ini, Mahkamah merujuk kembali Putusan Nomor 006/PUUII/2004, tertanggal 13 Desember 2004, yang berpendapat antara lain sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan

hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat".

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, maka menurut Mahkamah, pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Pertimbangan tersebut menunjukkan konsistensi MK dalam menilai pentinganya Pendidikan Hukum Klinis melalui layanan bantuan hukum. Walau tidak ada yang baru dalam putusan ini, namum konsistensi ini dapat menjadi dasar konstitusional untuk terus mendorong peran LKBH Kampus dalam memberikan bantuan hukum yang setara dengan Advokat. Kesetaraan dalam memberikan bantuan hukum, ditegaskan bahwa "paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu."[427]

Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasehat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan dalam menjamin adanya persamaan

[427] *Ibid*, hlm. 153.

dihadapan hukum *(equality before the law)*, demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, memiliki hubungan erat dengan upaya untuk menjamin keadilan bagi semua. Implementasi bantuan hukum non struktural yang selama ini tidak maksimal bagi masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa hal sehingga penerapan asas *equality before the law* menjadi tidak terlaksana secara baik, sehingga dalam menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat.[428]

Bantuan hukum struktural mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang. Apabila paradigma lama bantuan hukum hanya bertumpu pada bantuan hukum melalui jalur hukum saja, tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut. Kajian ini membahas problematika pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural.[429]

Pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural dipengaruhi oleh kerangka hukum normative pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja, dll, sedangkan refleksi asas *equality before the law*

[428]Setyo Rahmat Ramadhan, Rekonstruksi Asas *Equality Before The Law* Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Fundamental Vol. 10 No. 2. Juli-Desember 2021 hlm. 131-141.

[429]*Ibid.*

berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal Ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).[430]

Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu Negara kesejahteraan. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisir ketidakpastian kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada legal aid. Ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Bagi masyarakat awam, besar kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud bahwa Pemberian bantuan

[430]*Ibid*

hukum secara Cuma-cuma atau yang lebih dikenal sebagai bantuan hukum *pro bono (pro bono publico)* atau *legal aid* adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan bagi semua orang.[431]

Ruang lingkup Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah Persyaratan untuk pemberi bantuan berbadan hukum, kantor yang tetap, memenuhi persyaratan dapat disebut sebagai hukum antara lain terakreditasi, memiliki memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum. Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum *pro bono* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam mengurus perkara cumacuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.[432]

[431] *Ibid*

[432] *Ibid*

Sementara Kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyrakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum structural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik berarti hukum maupun dilapangan ekonomi. Ini pelaksanaan dan pengembangan dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.[433]

Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat tidak mampu masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima hukum yang telah Persyaratan untuk pemberi bantuan berbadan hukum, kantor yang tetap, memenuhi persyaratan. dapat disebut sebagai hukum antara lain terakreditasi, memiliki memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum.[434]

---

[433]M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut, Cet. Ke-5.* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

[434]Setyo Rahmat Ramadhan, *op.cit.*

Selain diatur dalam UU tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum *pro bono* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum. Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien menengah keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil.[435]

Ketidaktahuan akan hukum mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum akan atau seseorang tersebut dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah. Sebab ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum

[435]Marudut Tampubolon. 2014. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi AdvokatKlien*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 11.

tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.[436]

Bahwasanya bantuan hukum struktural dan non struktural adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* dan pemberian jasa hukum serta pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang. Refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum structural dan non struktural, hal Ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum *(rechstaat)*, yaitu supremasi hukum *(supremacy of law)*, kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law)*, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum *(due process of law)*.[437]

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu buta hukum dan tertindas ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan *acces to justice* merupakan refleksi asas *equality before the law*. Dalam praktiknya, pendampingan bagi masyarakat

[436]Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, (Jurnal Konstitusi 15, no. 1 2018), hlm. 50–72.

[437]Setyo Rahmat Ramadhan, *op.cit.*

miskin menjadi sebuah tugas yang diharuskan dalam mencari keadilan bukan berdasarkan atas hati nurani. Kondisinya saat ini, asas *equality before the law* belum dijadikan patokan utama dalam pemberian bantuan hukum. Padahal, jika secara benar dan patut asas ini direfleksikan ke dalam penegakan hukum di Indonesia, seyogyanya tidak ada lagi masyarakat miskin mengalami diskriminasi dan ketidakadilan hukum.[438]

Dari perpandingan tersebut kita dapat melihat secara mudah melalui tabel sebagai berikut:

Di bawah ini peneliti coba rekonstruksi ketentuan dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dianggap belum berbasis nilai Keadilan Pancasila

Tabel I

Rekonstruksi UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

No	Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Pasal Sesudah di Rekonstruksi
1	Pasal 1 angka 2 penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.	Penormaan pada Pasal 1 angka, mengenai penerima bantuan belum mampu mewujudkan atau mengakmodir seluruh/unsur warga masyarakat, yang tidak manpu secara ekonomi, dan atau/tidak mampu secara fisik, mental maupunintelektual (disabilitas)	Pasal 1 angka 2 penerima bantuan hukum adalah hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dan atau/tidak mampu secara fisik, mental maupun intelektual (disabilitas)
2	Pasal 8 (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh	Penormaan pada Pasal 8 ayat 2	Pasal 8 (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum

[438]*Ibid.*

	Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.		yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; kecuali lembaga bantuan berada di bawah perguruan tinggi b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; kecuali lembaga bantuan berada di bawah perguruan tinggi mengikuti akreditasi perguruan tinggi/instrisusinya masing-masing; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum
3	Pasal 7 Ayat 3 Verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.	Waktu verifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu lama bagi Calon Pemberi Bantuan hukum yang sudah menyiapkan persyaratan yang diperlukan. Selain itu waktu 3 tahun juga terlalu bagi masyara kat miskin/kelompok marginal untuk mendapatkan haknya menerima bantuan hukum. Waktu akreditasi bagi pemberi bantuan hukum setiap 3 tahun dianggap terlalu singkat bagi	Pasal 7 Ayat 3 Verifikasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun, dan Akreditasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

		Calon Pemberi. Akreditasi Pemberi Bantuan hukum idealnya berlaku selama 5 tahun, dengan pertimbangan lebih banyak masyakakat miskin mendapatkan haknya menerima bantuan hukum	

Tabel II

Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 63 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

No	Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Pasal Sesudah di Rekonstruksi
1	Pasal 1 angka 3 Penerima Bantuan Hukum adalah hukum adalah orang atau kelompok orang tidak miskin	Penormaan pada Pasal 1 angka, mengenai penerima bantuan belum mampu mewujudkan atau mengakmodir seluruh/unsur warga masyarakat, yang tidak mampu secara ekonomi, dan atau/tidak mampu secara fisik, mental maupun intelektual (disabilitas)	Pasal 1 angka 3 Penerima bantuan hukum adalah hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu atau masyarakat yang tidak manpu secara ekonomi, dan atau/tidak mampu secara fisik, mental maupun intelektual (disabilitas)

Tabel III

Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

No	Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Pasal Sesudah di Rekonstruksi
1	Pasal 4 Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang harus memenuhi syarat ; a. Berbadan hukum b. Terakreditasi , c. Memiliki kantor atau sekertariat yang tetap, d. Memiliki pengeurus dan, e. Memiliki program bantuan hukum	Pemberian bantuan hukum sulit untuk mendapatkan akreditasi	Pasal 4 Pemberian bantuan hukum mendapatkan akreditasi lebih mudah : a. Boleh memberikan bantuan hukum walaupun tidak mempunyai badan hukum. b, boleh memberikan bantuan hukum meski tidak terakreditasi, c. Boleh memberikan bantuan hukum meskipun tidak memiliki kantor atau sekertariat tetap, d.boleh memberikan bantuan hukum meski tidak memiliki pengurus dan e, tetap memberikan bantuan hukum walau tidak mempunyai program bantuan hukum.

Tabel IV

Rekonstruksi Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 3 Tahun 2013

No	Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Pasal Sesudah di Rekonstruksi
1	Pasal 30 (1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mengkategorikan PemberiBantuan Hukum menjadi: a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A; b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan c. Pemberi Bantuan Hukum katagori C.	Tentang ketentuan akreditasi lembaga yang menyebabkan adanya kualifikasi (tingkatan) akreditasi lembaga yang menyebabkan atau OBH yang akreditasi A, B dan C dan ada juga yang tidak terakreditasi. Akrediasi lembaga atau OBH sebagai pemberi bantuan hukum tetap perlu di akreditasi, tetapi tidak lagi dikaitkan akreditasi itu dengan jumlah	Pasal 30 (1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum menjadi: d. Pemberi Bantuan Hukum katagori A; e. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan f. Pemberi Bantuan Hukum katagori C. g. Pemberi Bantuan Hukum katagori D merupakan lembaga bantuan hukum yang berada di bawah perguruan tinggi.

		perkara yang dapat ditanganinya untuk di danai pemerintah. Jadi akses masyarakat tidak mampu untuk dapat bantuan hukum dan di danai melalui lembaga-lembaga bantuan hukum atau OBH dapat memenuhi nilaian keadilan Pancasila.	
2	Pasal 12 Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat; a.berbadan hukum , b. Memiliki kantor atau sekertariat yang tetap, c. Memiliki pengurus, d. Memiliki program bantuan hukum, e. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi dan , f.telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.	Pemberian bantuan hukum sulit untuk mendapatkan akreditasi	Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang mengajukan permohonan verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat : a, yang belum berbadan hukum dapat di berikan akreditasi dan verifikasi, b. Lembaga tidak harus memiliki kantor atau sekertariat yang tetap untuk mendapatkan verifikasi dan akreditasi, c. Lembaga bantuan hukum bisa saja mendapatkan verifikasi dan akreditas tanpa harus memiliki pengurus, d. Lembaga bantuan hukum dapat di berikan verifikasi dan akreditasi walaupun tidak memiliki program bantuan hukum, e. Lembaga bantuan hukum walaupun tidak mempunyai advokat yang terdaftar dapat di berikan akreditasi dan verifikasi, f. Lembaga hukum tidak mesti harus menangani 10 kasus agar mendapatkan verifikasi dan akreditasi

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa regulasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu selama ini belum berbasis keadilan Pancasila, karena berkenaan dengan kategori penerima bantuan hukum, hanya orang atau kelompok orang tidak mampu, pemberian bantuan hukum dibatasi oleh Undang-Undang 16 tahun 2011 Pasal 8 tentang Pemberi Bantuan Hukum , Peraturan menteri Hukum dan Ham No.3 Tahun 2013 Pasal 29 dan 30 tentang akreditasi dan kualifikasi akreditasi , Peraturan Pemerintah No.42 Pasal 4 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum, bahwa OBH atau Pemberi Bantuan Hukum harus terakreditasi dan Pemberi Bantuan Hukum atau OBH yang terakreditasi hanya sedikit oleh sebab itu menghambat proses pemenuhan keseimbangan hak hak masyarakat tidak mampu untuk akses bantuan hukum
2. Kelemahan pada substansi hukum yaitu berupa peraturan perunda-undangan yang di anggap belum berkeadilan; struktur hukum, ketentuan akreditasi lembaga pemberian bantuan hukum menyebabkan kelemahan lembaga dalam operasional; dan kultur hukum, menyangkut lemahnya akses masyarakat tidak mampu untuk terpenuhinya hak mereka atas bantuan hukum.

3. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam,regulasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Indonesia adalah dengan mengedepankan pendekatan nilai keadilan Pancasila dengan berbasis pada keseimbangan dan pemerataan pemenuhan hak warganegara akan akses terhadap bantuan hukum sebagai implementasi equality before the law. Nilai-nilai keadilan pancasila tersebut sebagai dasar dalam merekontruksi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 16 tahun 2011 dan Peraturan Hukum dan Ham No.63 tahun 2016 Pasal 1 angka 3 bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu atau masyarakat yang tidak manpu secara ekonomi, dan atau/tidak mampu secara fisik, mental maupun intelektual (disabilitas).

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR Perlu melakukan perubahan/rekonstruksi pada pasal 7 UU Bantuan Hukum dan Pasal 29-30 Permenkumham No 3 Tahun 2013 merupakan regulasi tentang akreditasi dan kualifikasi akreditasi, yang menghambat proses pemenuhan keseimbangan hak-hak masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses bantuan.
2. Perlu adanya perubahan/rekonstruksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum rumusan Pasal 1 angka 2, yang semula: Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu. Perlu dilakukan perubahan menjadi: Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak

mampu, korban, dan kelompok masyarakat lainnya yang diwajibkan mendapat bantuan hukum menurut Undang Undang ini

3. Perlu adanya perubahan/rekonstruksi regulasi yang mengatur tentang akreditasi pengkualifikasian mengenai pemberian bantuan hukum yang di tetapkan oleh institusinya agar masyarakat yang tidak mampu dapat di berikan bantuan hukum hak yang sama dan merata seperti yang tertuang pada nilai-nilai keadilan pancasila bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum / equality before the law dengan memenuhi hak-hak dasar warga masyarakat

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Paradigmatik, yaitu adanya pergeseran paradigma tanggung jawab dana bantuan hukum yang harus didukung dan dibantu oleh pemerintah daerah dan swasta tempat atau wilayahnya.
2. Implikasi praktis, yaitu dengan adanya rekonstruksi nilai yang berbasis keadilan dalam regulasi bantuan hukum akan mendorong peran pemerintah daerah dan swasta dalam mendukung program bantuan hukum di wilayahnya. Sedangkan rekonstruksi norma bantuan hukum yang berkeadilan akan memudahkan LBH dan Organisasi Kemasyarakatan untuk berperan dalam memberikan bantuan hukum, sehingga lebih merata dijangkau oleh orang / kelompok tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

---------- 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

---------- 2000..*Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

---------- 2011. *Teori Umum Tentang Hukum & Negara.* Bandung : Nusa Media.

---------- 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media.

---------- 1983. *Bantuan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press.

---------- 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi*. Bandung: Fakultas Hukum.

---------- 1979. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Mencapai Keadilan.* Jakarta: Grafiti.

---------- 2006. *Pembahasan Dan Permasalahan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam KUHAP*. Jakarta: Sinar Grfika.

---------- 2010. *Politik Hukum Di Indonesia.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

---------- 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulwahhab, Solichin. 2002. *Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Eresco.

Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.

Ali, Achmad. 2004. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta:* Kencana Prenada Media Group.

Ali, Zainuddin . 2011. *Metode Peneltiian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Alkostar, Artidjo 2001.*Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Univeritas Islam Indonesia.

Aminah, Siti. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia.* Jakarta: YLBHI.

Asshiddiqie, Jimly. 1994.*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Asshiddiqie., Jimly. 1996.*Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah.* Jakarta: UI Press, 1996.

Attamimi.A.HamidS. 1992. *PidatoPengukuhan Guru Besar*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Bagaskara, Adam. 2006.*Bantuan Hukum Dalam Perjalanan Waktu.*Jakarta: Yustisia.

Bakhtiar, Amsal. 2011. *Filsafat Ilmu.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

BKPH Lampung. 1977.*Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Blac's Law Dictionary With Pronunciations. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co.

Budiardjo, Miriam. 1980. *Dasar Dasar ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.

Budiono, Herlien. 2001.*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.

Cruz, Peter dD. 2012. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, And Socialist Law.* Bandung: Nusa Media & Jakarta: Diadit Media.

Darmodihardjo, Dardji. 1984. *Santiaji Pancasila*. Bandung: Pustaka.

Darmodiharjo. Dardji. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum.* Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,

Dias, Clarence J. 2012. *Human Rights and the Third World: Issues and Discourses.* Lexington Books.1 edition December.

Friedrich, Carl Joachim. 2010. *Filsafat Hukum Perspektif Historis.* Bandung : Nusa Media.

Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Adiyta Bakti.

Hadjon, Philipus M. 1988. *Pengkajian Ilmu Hukum.* Surabaya: Program Pascasarjana Unair,

Hamzah, Andi. 1989. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Harold, Lasswel, dan Abraham Kaplan, 1970, *Power And Society*, New Heaven: Yale University Press.

Hart, H.L.A. 2011. *Konsep Hukum*.(terjemahan) Bandung : Nusa Media.

Hartono, Sunaryati, C.F.G., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

Ikhsan, Edy. 2010. *Konfilk Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor.

Kadduri. Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti.

Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Paradigma.

Kansil, CST. dan Cristine S. T. Kansil. 2007. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kelsen, Hans. 2011. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung : Nusa Media.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: ASWAJA.

Kusumaatmadja,Mochtar 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Citra.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Lubis, Mulya. 1990. *Bantuan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Machfud, Moh. MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.

Manan, Bagir. 2009. *Politik Hukum Nasional Indonesia.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

Marsaulina,Teti. 2011.*Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya.* Bandung: Universitas Parahyangan, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Mertokousumo, Sudikno 1989. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. 2004.. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Muljadi dan G. Widjaja.*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.

Nasution, Adnan Buyung.1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1983. *Bantuan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Poedjosoewojo, Kusumadi. 1980. *Pengantar Hukum Indojesia.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Pudjosewojo, Kusumadi. 2007.*Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi.* Yogyakarta: UII Press.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1994. *Renungan Tentang Filsafat Hukum* .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum.*Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rawls, John. 1973. *A. Theory of Justice.* London : Oxford University.

Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Raz, Joseph. 1980. *The Concept of a Legal System; An Introduction to the Theory of Legal System.* London: The Calendon Press.

Roger Cotterrell. *Sosiologi Hukum.* Bandung : Nusa Media, 2012.

Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tdak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung : PT. Alumni.

Rush, Michael dan Althoff Phillip. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sartono dan Bhekti Suryani. Prinsip-Prinsip Dasar Advokat Dunia Cerdas. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Sasongko, Wahyu. 2010.*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.* Lampung: Universitas Lampung.

Situmorang, Morgan. Dkk. 2011. *Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan hukum Kepada Masyarakat.* (Ahli Peneliti Utama, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemadiningrat, Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali).* Bandung : Refika Aditama.

Sosronegoro, Herqutanto. 1984. *Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kenegaraan*. Yogyjakrta: Liberty.

Sunggono, Bambang &Susanto Aries. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Bandung: CV.Mandar Maju.

Suny, Ismail.1975. *Pergeseran kekuasaan Eksekutif.* Jakarta: Aksara Baru.

Suseno, Frans Magnis. 1994.*Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta:Gramedia.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syukron, Achyar. 2012. *Tangungjawab Negara Menuju Masyarakat Adil Makmur*. Solo: Panepen Mukti.

Tanya, Bernard L. 2011. Tanya. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama.*Yogyakarta : Genda Publishing.

Wahjono, Padmo 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wignyosoebroto, Soetandyo 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Ifdhal Kasim (Ed.). ELSAM dan HUMA.

Winatra, Frans Hendra. 2010.*Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta: YLBHI.

Hasil Penelitian, Makalah dan Jurnal

Juju Juhariah. *Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana PenipuanFinansial melalui Media Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Bandung : Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia,2007.

Teuku Muhammad Radhie.*Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasinal*. Jurnal Prisma No. 6 Tahun II. 1973.

Artikel Internet :

Teti Marsaulina.*Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*, Dari: http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/.

NoorTri Hastuti. http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/ article/ view/240.

Damanhuri fattah, dalam:gws_rd=cr,ssl&ei=LxWsVqS6F8WiuATfhqS4CA#q=teori +keadilan+john+rawls (diakses, 12 Mei 2020)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية